



RESEARCH TEAM
 Pius Sugeng Prasetyo
 Tutik Rachmawati
 Theresia Gunawan
 Yosefa
 Trisno Sakti Herwanto
 Kristian W. Wicaksono

to Establish
 Prominent and
 Sustainable Village

INNOVATION

First Edition



NOVATION to Establish Prominent and Sustainable Village
 INOVASI untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan

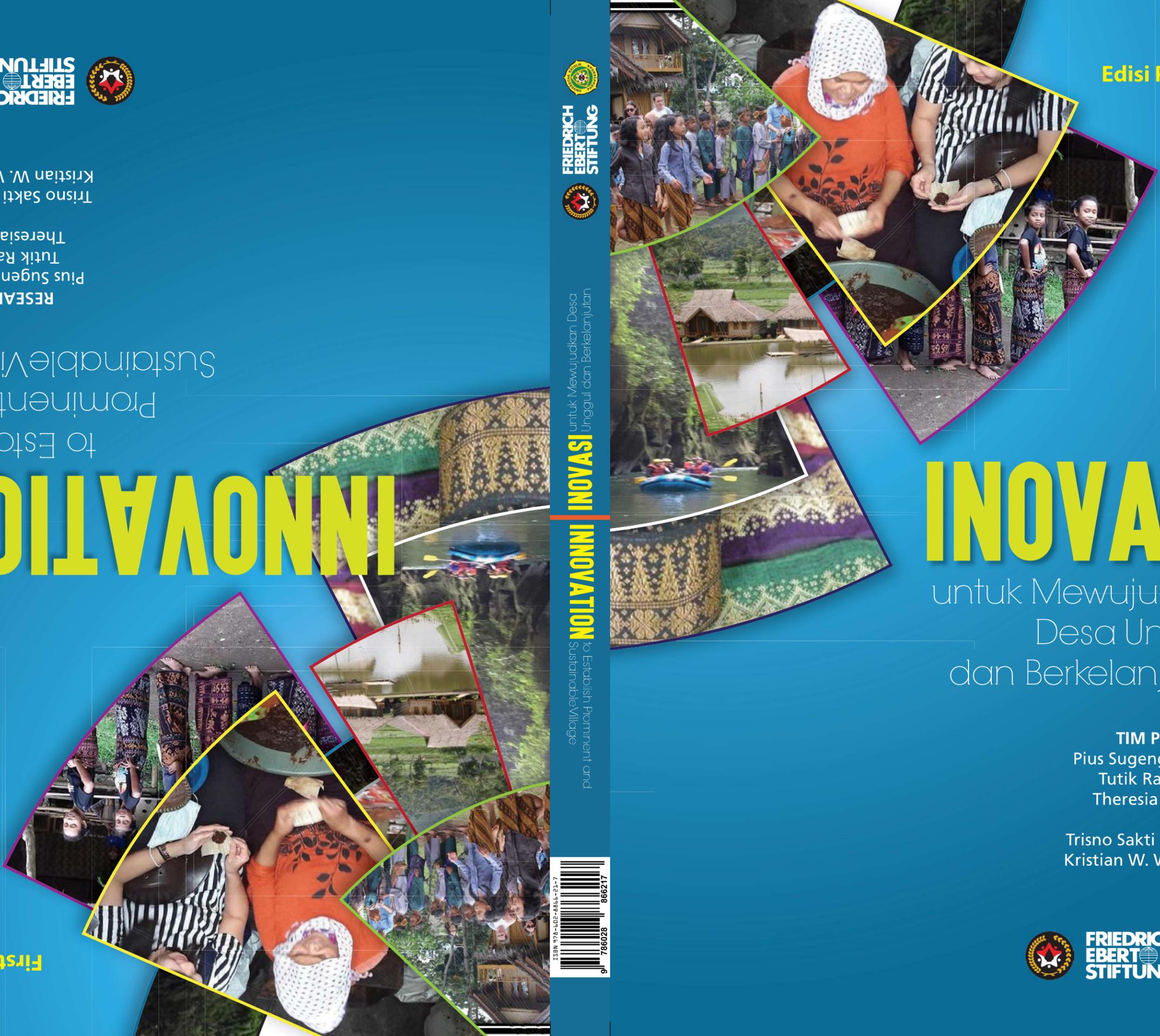


Edisi Pertama

INOVASI

untuk Mewujudkan
 Desa Unggul
 dan Berkelanjutan

TIM PENYUSUN
 Pius Sugeng Prasetyo
 Tutik Rachmawati
 Theresia Gunawan
 Yosefa
 Trisno Sakti Herwanto
 Kristian W. Wicaksono



Edisi Pertama

INOVASI

untuk Mewujudkan
Desa Unggul
dan Berkelanjutan

TIM PENYUSUN

Pius Sugeng Prasetyo

Tutik Rachmawati

Theresia Gunawan

Yosefa

Trisno Sakti Herwanto

Kristian W. Wicaksono



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**



Edisi Pertama

INOVASI

**untuk Mewujudkan
Desa Unggul dan Berkelanjutan**

TIM PENYUSUN

Dr. Pius Sugeng Prasetyo | Tutik Rachmawati, Ph.D.
Dr. Theresia Gunawan | Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M.PA
Kristian W. Wicaksono, S.Sos.,M.Si. | Yosefa S.T., M.M.

Diterbitkan oleh

Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia

Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730, Indonesia
P.O. Box 7952 JKSKM
Jakarta 12079, Indonesia
Telp: (62-21) 7193711 (hunting)
Fax: (62-21) 71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes-indonesia.org

Bekerjasama dengan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan
Universitas Katolik Parahyangan

Cetakan Pertama Oktober 2017

ISBN: 978 - 602 - 8866 - 21 - 7

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun,
termasuk fotokopi tanpa ijin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjualbelikan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Inovasi untuk Keunggulan dan Keberlanjutan Desa	1
1.2 <i>Innovative Governance</i> untuk Desa Unggul dan Berkelanjutan	3
1.3 Bidang-bidang Pembangunan Desa Unggul dan Berkelanjutan	5
1.4 Kerangka Konsep Pengembangan Desa Unggul dan Berkelanjutan	8
BAB II INOVASI DAN Praktik BAIK DESA SUKALAKSANA	11
2.1 Gambaran Umum Desa	11
2.2 Inovasi-inovasi Desa	12
2.3 Pengelolaan Air Bersih	13
2.4 Tujuan Program PAMSIMAS	15
2.5 Sistem Pengelolaan	16
2.6 Pengurus BP – SPAMS Karya Laksana	17
2.7 Pengembangan Ekonomi Lokal	19
2.8 Kesimpulan dan Rekomendasi Untuk Langkah Lanjut	26
BAB III MENGGANTUNGGAN HARAPAN PADA ALAM: INOVASI DESA BULUH DURI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN	29
3.1 Gambaran Umum, Tantangan, dan Permasalahan Desa Buluh Duri	29
3.2 Faktor-faktor Penentu Inovasi Desa Buluh Duri	32
3.3 Pembangunan Desa Wisata Olahraga Arung Jeram	39
3.4 Dampak Inovasi Desa Buluh Duri sebagai Desa Wisata Olahraga	41
3.5 Kesimpulan dan Rekomendasi	42

BAB IV	DINAMIKA INOVASI PEMBANGUNAN DESA: PEMBELAJARAN DARI DESA MALLARI	49
4.1	Pengantar: Profil dan Potensi Pembangunan Desa	49
4.2	Bentuk-Bentuk Inovasi Desa	52
4.2.1	Proses Pembangunan <i>Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel</i>	52
4.2.2	Program Stop SBS (Buang Air Besar Sembarangan) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i>	52
4.2.3	Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Bawang Merah	53
4.3	Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Desa	54
4.3.1	Kearifan Lokal Masyarakat	54
4.3.2	Politik Dinasti	54
4.3.3	Kepemimpinan Kepala Desa	55
4.3.4	Peran Aktor Luar Desa	57
4.3.5	Faktor Historis	58
4.4	Proses Inovasi Desa	59
4.4.1	Proses Pembangunan <i>Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel</i>	59
4.4.2	Program Stop SBS (Buang Air Besar Sembarangan) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i>	61
4.4.3	Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Bawang Merah	62
4.5	Dampak Inovasi Desa	63
4.6	Kesimpulan dan Saran	65
BAB V	MEMAHAMI PRAKTIK BAIK: INOVASI PEMBANGUNAN DESA NITA	67
5.1	Profil Dan Dinamika Pembangunan Desa	67
5.2	Bentuk-Bentuk Inovasi Desa	75
5.2.1	Proses Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan Desa Transparan dan Akuntabel	75
5.2.2	Partisipasi Anak dalam Musrenbang	76
5.2.3	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	77
5.2.4	Revitalisasi BUMDes	78
5.2.5	Pemerataan Layanan Kesehatan	79
5.3	Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Desa	79
5.4	Proses Inovasi Desa	84
5.5	Analisis Dampak Inovasi Desa	88
5.6	Kesimpulan dan Rekomendasi Bagi Inovasi Pembangunan Desa	90

BAB VI	MEMBANGUN INOVASI DESA YANG BERKELANJUTAN: PERJALANAN DESA SEBAYAN DALAM MENGGAPAI IMPIAN	93
6.1	Lokasi dan Profil Desa Sebayan	93
6.2	Potret Desa dalam Aspek Ketahanan Pangan, Kesehatan, Pendidikan dan Sanitasi	95
6.3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sebayan dan Tantangannya	97
6.3	Praktik Baik dan Potensi Inovasi di Desa Sebayan	100
6.4	Dampak Praktik Baik dan Inovasi di Desa Sebayan	108
6.5	Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Keberlanjutan Praktik Baik dan Inovasi Desa Sebayan	109
CATATAN PENUTUP		113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Pengembangan Desa Melalui Inovasi untuk Mewujudkan Desa Unggul (<i>Prominent</i>) dan Berkelanjutan (<i>Sustainable</i>)	9
Gambar 2.1	Keindahan Desa Sukalaksana	11
Gambar 2.2	Alur Inovasi Desa	13
Gambar 2.3	Sistem Distribusi Air (Sistem Cacing)	14
Gambar 2.4	Distribusi Air Menggunakan Bak Penampungan	16
Gambar 2.5	Distribusi Air Menggunakan Water Meter	17
Gambar 2.6	Debit Air ke Rumah Warga Pelanggan	17
Gambar 2.7	Petani Sayur Sosin	20
Gambar 2.8	Pemupukan	20
Gambar 2.9	Pengrajin Makanan Wajid dan Rangginang	21
Gambar 2.10	Pengrajin Tas Rak Sepatu	22
Gambar 2.11	Hasil produksi Tas Rak Sepatu	22
Gambar 2.12	Saung Ciburial-Lokasi Kampung Wisata	24
Gambar 2.13	Tamu Immersion Program-Australia	24
Gambar 2.14	Immersion Program di Saung Ciburial	26
Gambar 3.1	Penambangan Pasir dan Batu Kali di Sungai Bah Bolon di Dekat Titik Buluh Duri Indah	46
Gambar 3.2	Aktivitas Arung Jeram di Sungai Bah Bolon	46
Gambar 3.3	<i>Base Camp</i> Ancol Arung Keram yang Dikelola Oleh Bapak Teddy	47
Gambar 3.4	Rute Arung Jeram	47
Gambar 3.5	Rute Arung Jeram	47
Gambar 4.1	Rumput Laut, Salah Satu Komoditas Hasil Laut Unggulan Desa Mallari	50
Gambar 4.2	Andi Wahyuli, Kepala Desa Perempuan yang Muncul dari Politik Dinasti Desa Mallari	56
Gambar 4.3	Unit Usaha Kerajinan Peci/Songkok Lontar Beranggotakan Perempuan dan Difabel	60
Gambar 5.1	Peta Wilayah Administrasi Desa Nita	68
Gambar 5.2	Jumlah Penduduk Desa Nita 2009-2013	69
Gambar 5.3	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nita	70
Gambar 5.4	Penghargaan bagi Desa Nita Sebagai Juara 1 Lomba Desa Regional Papua, Maluku dan NTT 2016	74
Gambar 5.5	Infografik RAPBDes Nita yang Diunggah ke Media Sosial <i>Facebook</i>	76

Gambar 5.6	Musyawarah Pembangunan Forum Anak Nita (FANTA)	77
Gambar 5.7	Visi Jangka Panjang dan Tahunan Desa Nita Selalu Menjadi Slogan dalam Berbagai Acara	80
Gambar 5.8	Partisipasi Masyarakat juga Tampak pada Berbagai Lomba Menyambut 50 Tahun Desa Nita	85
Gambar 5.9	Latihan Menari Anak di Halaman Sanggar Kesenian	89
Gambar 5.10	Bidan Desa dan Bidan Dusun Desa Nita	90
Gambar 6.1	Peta Desa Sebayan	94
Gambar 6.2	Hasil Komoditas Desa Sebayan: Lada, Padi dan Karet (Dari Kiri ke Kanan)	98
Gambar 6.3	Hasil Produksi Desa Sebayan: Capil Dan Kain Songket (Dari Kiri ke Kanan)	99
Gambar 6.4	Permasalahan Umum yang Dihadapi Pelaku Usaha Desa Sebayan	100
Gambar 6.5	BUMDes Sarana Pertanian dan Perkebunan	101
Gambar 6.6	Portal Website Desa Sebayan	103
Gambar 6.7	Pernikahan Adat Desa Sebayan	105
Gambar 6.8	Budaya Gotong Royong dalam Kegiatan Pesta Setempat	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Demografi Desa Buluh Duri	31
Tabel 3.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buluh Duri	31
Tabel 5.1	Luas Wilayah Desa Nita Perdusun	67
Tabel 5.2	Riwayat Pimpinan Desa Nita	69
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2009-2013	69
Tabel 5.4	Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Nita Hingga 2013	71
Tabel 5.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Nita 2009-2013	72
Tabel 5.6	Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Nita Hingga 2013	72
Tabel 5.7	Jumlah Sarana Kesehatan Desa Nita Hingga 2013	72
Tabel 5.8	Tingkat Perkembangan Jalan dan Drainase Desa Nita Hingga 2013	73
Tabel 5.9	Keadaan Jalan Desa Nita Hingga 2013	73
Tabel 5.10	Jenis UKM di Desa Nita Hingga 2013	78
Tabel 6.1	Fasilitas untuk Warga Desa Sebayan	94
Tabel 6.2	Desa Sebayan dalam Angka Demografis 2016	95

PENGANTAR

Penelitian ini pada dasarnya merupakan wujud kepedulian berbagai pihak akan kondisi perkembangan pembangunan desa – desa di Indonesia. Harus diakui bahwa pembangunan di pedesaan hingga saat ini telah banyak mencapai kemajuan baik dalam hal pembangunan manusia maupun pembangunan lingkungan di pedesaan dengan aneka rupa potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Banyak desa yang sudah menunjukkan kemajuan-kemajuan tersebut di berbagai kawasan di Indonesia. Di sisi lain juga tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak desa di Indonesia yang belum dapat mencapai kemajuan sebagaimana yang sudah dialami oleh desa-desa yang menjadi lokasi survei penelitian ini.

Kesenjangan kondisi desa-desa di Indonesia inilah yang mendorong pihak- pihak yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), bersama dengan pihak non pemerintah yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan Bandung, yang didukung oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia berkomitmen untuk melakukan penelitian dan kajian di 5 desa di Indonesia.

Penelitian dengan topik: “Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan” (*Innovation for Prominent and Sustainable Village*) pada dasarnya ingin mengeksplorasi praktik-praktik baik yang dilakukan oleh desa-desa dalam bidang ketahanan pangan, ekonomi lokal, pemanfaatan energi terbarukan, edukasi, sanitasi/kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterlibatan demokratik. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu model atau pola inovasi yang nantinya dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di desa-desa yang lain yang tentu saja dengan tetap mempertimbangkan potensi dan keunikan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, inovasi pembangunan yang dilakukan diharapkan tetap memperhatikan juga kearifan lokal dan berbasis pada komunitas setempat agar dapat menemukan padanan dan jati diri desa yang bersangkutan.

Buku laporan penelitian ini merupakan sebagian dari keseluruhan rencana atau tahapan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap berikutnya akan dilakukan lagi survei kebeberapa desa yang merepresentasikan beberapa kawasan di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih lengkap mengenai desa-desa di Indonesia. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan

rekomendasi kebijakan yang strategis bagi kerjasama antara pihak pemerintah dan non pemerintah dalam mewujudkan desa yang unggul dan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang membantu untuk mengumpulkan data baik melalui wawancara dan pengamatan mereka selama bersama-sama melakukan survei bersama Tim Peneliti. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dhia Kalila Rinjani, Felicia Andreany, Yosef Noferius Gea, dan Eka Chandra yang telah banyak membantu dengan penuh dedikasi dan kesungguhan hati. Demikian juga ucapan terima kasih kami ucapkan untuk nara sumber baik warga desa maupun pemerintah di Desa Sukalaksana - Jawa Barat, Desa Buluh Duri – Sumatera Utara, Desa Nita – Nusa Tenggara Timur, Desa Malari – Sulawesi Selatan, dan Desa Sebayon – Kalimantan Barat.

Kami tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu atas kontribusinya memfasilitasi penyusunan laporan ini.

Kami memohon maaf apabila masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Bandung, Oktober 2017
Koordinator Tim Peneliti,

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



PENDAHULUAN

1.1 Inovasi untuk Keunggulan dan Keberlanjutan Desa

Kebijakan untuk melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan memang sudah banyak diterapkan dalam berbagai program. Program yang telah dilakukan tersebut dalam tingkatan tertentu telah memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program yang telah diterapkan melalui kebijakan yang ada selama ini menampilkan kesan bahwa belum terlihat suatu pola atau formula yang signifikan yang dapat secara berkelanjutan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, khususnya di desa-desa yang tergolong miskin. Kecenderungan yang ada menampakkan bahwa program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa lebih banyak berdimensi *top-down* sehingga pijakan ke bawah menjadi kurang kuat. Masyarakat desa miskin lebih banyak didekati sebagai “obyek” yang harus disembuhkan dari sakit dan tidak didorong untuk bisa “menyembuhkan” diri sendiri dengan bantuan pihak lain.

Kajian ini merupakan langkah untuk mengeksplorasi, memahami secara mendalam dan mengembangkan kemungkinan sebuah model aplikatif yang bisa berfungsi sebagai *center of excellence* yang merupakan wadah inovasi yang implikasinya diarahkan untuk mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan. Secara terfokus penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam proses inovasi pemerintahan dan implikasinya pada kualitas pelayanan publik berdasarkan praktik baik (*best practices*) di beberapa desa di Indonesia. Dari praktik baik yang dilakukan tersebut kemudian akan diperoleh masukan untuk merumuskan pola yang dapat menjadi pedoman atau bahkan standar dalam membangun dan mengembangkan desa menjadi desa yang dapat berinovasi untuk bisa mandiri dan berkelanjutan. Dengan kata lain, bisa diwujudkan apa yang disebut “Desa Unggul dan Berkelanjutan” yaitu desa yang mengandalkan basis komunitasnya secara inklusif dan adil untuk menopang berbagai kebutuhan dasarnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Aplikasi inovasi saat ini tidak lagi menjadi dominasi sektor swasta namun telah menjadi perhatian penting di sektor publik. Berbeda dengan sektor swasta yang menerapkan inovasi untuk meningkatkan keuntungan finansial, sektor publik menerapkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Salge & Vera, 2012).

Kajian mengenai inovasi sendiri merupakan sebuah kajian yang sudah cukup lama berkembang pada disiplin ilmu Administrasi Publik. Hal ini dikarenakan organisasi sektor publik dituntut untuk mampu terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat selaku pembayar pajak (Hughes, Moore, & Kataria, 2011). Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa inovasi publik menjadi konsep yang penting untuk terus dikaji dan dikembangkan. Inovasi yang dilakukan pada tataran desa memang diorientasikan pada upaya untuk penguatan bidang-bidang yang dapat menjadi penopang kemandirian dan keberlanjutan desa. Bidang-bidang tersebut antara lain ketahanan pangan, kesehatan dan sanitasi, ekonomi lokal, pendidikan, keterlibatan masyarakat yang demokratis, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Di sisi lain juga sangat disadari bahwa inovasi hanya bisa terjadi ketika ada faktor yang dapat menjadi motor pendorong antara lain kepemimpinan, kerjasama/jejaring, dan pelembagaan berbagai kegiatan dan program agar terus bisa dijaga keberlanjutannya.

Perhatian terhadap inovasi publik saat ini semakin mengemuka seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai ketentuan terbaru yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang tersebut secara tegas menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat berinovasi dengan mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak terdapat konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Hasil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak untuk kepentingan diri sendiri (Bab XXI, UU No 23 tahun 2014).

Melalui ketentuan ini, berbagai permasalahan publik di daerah diharapkan dapat direspon dengan cepat. Ide dan kreativitas sebagai komponen penting inovasi diharapkan dapat muncul di tingkat pemerintahan lokal tanpa menunggu ide dan arahan dari pusat. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan menjadi dampak utama yang diharapkan dari praktik inovasi sektor publik.

Fokus terhadap penerapan inovasi publik saat ini bahkan mulai tertuju pada pemerintahan di tingkat desa. Pada 2015, pemerintah pusat telah melakukan alokasi dana desa bagi seluruh desa di Indonesia. Ketika pemerintahan di desa memiliki ide dan kreativitas serta mampu menerapkan inovasi, sumber daya finansial tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara signifikan terhadap pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Sebaliknya, apabila tidak diiringi dengan ide, kreativitas serta inovasi, dana desa dikhawatirkan tidak dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan alur pikir yang telah diuraikan, tim peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses dan implikasi berbagai inovasi termasuk didalamnya inovasi pemerintahan/tata kelola (*innovative governance*) untuk mewujudkan “Desa Unggul dan Berkelanjutan” yang berbasis komunitas. Dari hasil penelitian ini kemudian akan dihasilkan suatu usulan model kebijakan nasional yang tetap mengedepankan karakteristik desa-desa di Indonesia .

Buku ini memuat hasil kajian:

- a. Analisis proses inovasi yang implikasinya diarahkan untuk mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan.
- b. Analisis faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya proses inovasi pembangunan desa untuk mewujudkan “Desa Unggul dan Berkelanjutan.”
- c. Pemodelan dan referensi untuk mendukung kebijakan nasional dalam pemberdayaan dan pengembangan desa “Desa Unggul dan Berkelanjutan.”

1.2 Innovative Governance untuk Desa Unggul dan berkelanjutan

Konsep inovasi dapat dipahami sebagai penciptaan, pengembangan, dan adaptasi dari ide atau perilaku baru (Damanpour dalam Salge & Vera, 2012). Proses penciptaan, pengembangan hingga adaptasi atau perilaku baru ini tentu memiliki tujuan tertentu. Pemikiran ini terkonfirmasi melalui definisi inovasi yang dihadirkan Peter Drucker bahwa inovasi sebagai langkah perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja atau *performance* (Hesselbein, Goldsmith & Somerville, 2002).

Inovasi sektor publik memiliki logika yang sangat berbeda dengan inovasi sektor swasta. Inovasi yang dilakukan sektor swasta sangat didorong oleh *market competition* (Potts dan Kastle, 2010). Sebuah organisasi atau perusahaan swasta terus melakukan inovasi atas dasar lingkungan yang kompetitif. Melalui penjelasan ini, diperoleh pemahaman bahwa tujuan utama penerapan inovasi di sektor swasta adalah keinginan untuk terus dapat berkompetisi dalam rangka mendapatkan profit.

Berbeda dengan logika inovasi di sektor swasta, inovasi yang diterapkan di sektor publik lebih didorong oleh motif efisiensi (Potts & Kastle, 2010). Organisasi atau

birokrasi publik perlu berinovasi agar berbagai barang dan jasa publik dapat mencapai sasaran secara efisien. Pemahaman ini dipertegas dengan karakteristik monopoli yang biasanya dimiliki organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang tidak memiliki kompetitor sehingga inovasi yang dilakukan bukan diarahkan untuk berkompetisi namun menyediakan barang dan jasa pelayanan publik secara lebih baik.

Dalam perkembangan paradigma administrasi publik, proses inovasi di sektor publik tidak hanya terfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik namun seluruh *stakeholders* yang memiliki kepentingan dan perhatian terhadap penyediaan barang serta jasa publik. Paradigma keilmuan administrasi publik tidak lagi terbatas pada kajian mengenai pemerintah (*government*) yang berfokus pada aktor namun semakin mengarah pada kajian mengenai pemerintahan (*governance*) yang memiliki perhatian pada tata kelola dan interaksi antar aktor (bukan hanya pemerintah) dalam mengelola berbagai permasalahan publik (Frederickson, 1997). Pergeseran paradigma keilmuan administrasi publik tersebut memberi penjelasan mengenai arah kajian inovasi publik yang sebenarnya memiliki fokus pada pada inovasi pemerintahan (*innovation in governance*) (Hartley, 2005).

Perkembangan diskusi mengenai inovasi pemerintahan selanjutnya membawa orientasi pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang inovatif (*innovative governance*). *Innovative governance* secara mendasar tampak apabila terdapat bentuk baru keterlibatan aktor yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan seperti warga masyarakat dan lembaga-lembaga demokrasi (Hartley, 2005). Keterlibatan aktor yang lebih luas dibanding pemerintah diharapkan dapat menyokong kapabilitas inovasi yang kemudian mendorong terjadinya aktivitas inovasi. Ketika telah tercipta kapabilitas dan aktivitas inovasi, pada akhirnya akan tercipta dampak pada kinerja (Hughes, Moore, & Kataria, 2011).

Melalui pembelajaran dari beberapa literatur, *innovative governance* dapat terwujud ketika terdapat beberapa aspek sebagai berikut:

1) Kolaborasi (*Collaboration*)

Kolaborasi atau keterlibatan aktif dari berbagai aktor dalam sebuah sistem pemerintahan menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan inovasi. Ide sebagai awal kemunculan inovasi membutuhkan keterlibatan aktor-aktor yang lebih luas dari sekedar peran pemerintah. Kemunculan inovasi juga memerlukan upaya fasilitasi dari berbagai pihak yang memiliki kapasitas terhadap penanggulangan permasalahan-permasalahan publik. Pemerintah, masyarakat, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan para aktor yang memiliki kepentingan dalam sistem pemerintahan desa perlu berkolaborasi untuk dapat mewujudkan inovasi.

2) Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan menjadi modal penting dalam upaya mewujudkan inovasi. Kepemimpinan dapat mendorong terciptanya ide dan inovasi namun pada sisi lain justru dapat menjadi sebuah tantangan. Untuk dapat mewujudkan *innovative governance* dibutuhkan kepemimpinan yang terbuka terhadap ide-ide dan cara-cara baru dalam menyelesaikan permasalahan. Kepemimpinan tidak hanya mencakup kepemimpinan formal, namun juga meliputi kepemimpinan informal yang seringkali memberikan dampak konstruktif dalam proses pembangunan masyarakat. Kepemimpinan yang terbuka terhadap ide-ide baru serta proses pelembagaan terhadap inovasi perlu mendapat perhatian.

3) Pelembagaan (*Institutionalization*)

Inovasi yang telah terbentuk seringkali bersifat tidak berkelanjutan. Budaya keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk pemecahan permasalahan masyarakat juga seringkali terhenti karena tidak terdapat dukungan secara kelembagaan. Pada tahap ini, dibutuhkan proses pelembagaan untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan inovasi yang telah diinisiasi. Proses pelembagaan dapat dilakukan dalam berbagai upaya seperti pembentukan organisasi, pembentukan aturan-aturan baru, dan sistem pengelolaan yang lebih mapan.

4) Nilai-nilai Lokal (*Local Values*)

Inovasi yang ada seharusnya tidak merusak tatanan nilai-nilai lokal, bahkan inovasi harusnya berakar dari nilai dan budaya lokal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi keunikan pembangunan dan sebagai penopang pelestarian kearifan lokal.

Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan perhatian dan akomodasi terhadap nilai-nilai lokal masyarakat pada rancangan inovasi. Akomodasi nilai-nilai lokal tersebut dapat menjamin keberlanjutan proses inovasi karena masyarakat memiliki keterikatan dan rasa kepemilikan terhadap inovasi yang telah dirumuskan bersama. Pada akhirnya nilai-nilai lokal yang masih melekat pada masyarakat desa perlu diakomodasi untuk menjamin keberlanjutan inovasi desa.

1.3 Bidang-bidang Pembangunan Desa Unggul dan Berkelanjutan

Desa seringkali diidentikan dengan daerah yang terbelakang. Pembangunan di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi bahkan masih berjalan lambat. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor seperti infrastruktur yang terbatas, kapasitas sumber daya manusia yang masih cenderung rendah serta kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat belum memiliki nilai tambah yang terlalu tinggi. Hal ini juga didorong oleh pola pikir masyarakat desa yang cenderung melakukan urbanisasi untuk

meningkatkan kesejahteraannya. Desa semakin menjadi daerah terbelakang karena generasi muda yang seharusnya membangun perekonomian lokal justru terserap oleh aktivitas perekonomian di kota.

Urbanisasi dan pembangunan yang berlangsung cepat di kota kemudian menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara desa dan kota. Kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah bukan menjadi permasalahan di perkotaan. Laju perekonomian yang pesat di kota bahkan memunculkan masyarakat kelas menengah baru yang mengalami peningkatan daya beli dan peningkatan taraf pendidikan formal. Hal ini berimplikasi pada tingkat konsumsi masyarakat perkotaan yang semakin tinggi.

Isu kesenjangan pembangunan antara kota dan desa kemudian memunculkan sebuah konsep pembangunan desa yang sering disebut *Desa Unggul dan Berkelanjutan*. Secara mendasar *Desa Unggul dan Berkelanjutan* merupakan konsep pembangunan desa yang menggunakan pendekatan pembangunan kota dengan tetap mempertahankan ciri khas dan nilai-nilai masyarakat desa (Heap, 2015). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembangunan desa adalah pemanfaatan aplikasi teknologi. Melalui teknologi, berbagai kendala pembangunan seperti keterbatasan informasi, pengetahuan masyarakat dan infrastruktur dapat diatasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kemunculan konsep *Desa Unggul dan Berkelanjutan* sebenarnya berfokus pada aktivitas penanggulangan berbagai permasalahan pembangunan desa yang salah satunya bisa dengan pemanfaatan teknologi pembangunan kota yang tepat guna. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa permasalahan pembangunan kota tidak selalu serupa dengan permasalahan pembangunan desa. Berbagai kondisi lingkungan seperti aspek sosial dan daya dukung sumber daya alam di perkotaan juga seringkali sangat berbeda dengan kondisi di pedesaan. Oleh karena itu berbagai potensi desa termasuk kearifan lokal yang ada akan dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat yang bersangkutan untuk membangun dan mengembangkan potensinya.

Melalui konsep *Desa Unggul dan Berkelanjutan* terdapat lima orientasi pokok penanggulangan permasalahan pembangunan di desa (Heap, 2015) yaitu:

1) Ketahanan Pangan (*Food Security*)

Meskipun seringkali diposisikan sebagai area produksi berbagai komoditi pangan, permasalahan kecukupan gizi masih menjadi permasalahan besar di desa. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian karena masalah kecukupan gizi dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Permasalahan gizi buruk tersebut perlu ditanggulangi dengan pemanfaatan teknologi yang diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan di desa.

2) Keterlibatan Demokratis (*Democratic Engagement*)

Keterlibatan masyarakat secara demokratis perlu dibangun untuk menjamin keberlanjutan berbagai upaya pembangunan. Bentuk keterlibatan demokratis tersebut dapat diinisiasi dengan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan berbagai media partisipasi lainnya.

3) Kesehatan dan Kesejahteraan (*Health and Welfare*)

Pembangunan aspek kesehatan dan sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat masih seringkali menemui berbagai kendala. Infrastruktur, kemampuan ekonomi hingga pola pikir masyarakat masih menjadi beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi upaya mewujudkan kesehatan masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat disediakan secara lebih efektif dan efisien. Kesehatan masyarakat yang telah tercipta kemudian menjadi modal penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

4) Pendidikan

Pendidikan masyarakat terus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah. Meskipun demikian, perlu upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Pendidikan tentu saja tidak hanya sebatas pada format pendidikan formal saja, melainkan dapat juga menerapkan format pendidikan non formal misalnya "Rumah Belajar" sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini dapat pula memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat di kawasan-kawasan luar yg masih terbatas fasilitas pendidikannya. Sejauh dimungkinkan teknologi dapat berperan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan kualitas masyarakat.

5) Kegiatan Bisnis Masyarakat (*Local Business*)

Aktivitas bisnis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perlu dikelola secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Potensi-potensi usaha kecil dan menengah (Small Medium Enterprise - SME) yang sudah ada di masyarakat perlu difasilitasi untuk dapat berkembang dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna yang sesuai dengan kebutuhannya dapat juga diterapkan sehingga bisa mempercepat daya ungkit bagi pengembangan usaha-usaha ekonomi masyarakat.

6) Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi, khususnya informasi, diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan desa. Konsep ini dapat dikatakan sebagai sebuah teknologisasi pada proses pembangunan desa. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi yang diterapkan di desa sebaiknya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat. Segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *Desa Unggul dan Berkelanjutan* harus berpusat pada pemberdayaan masyarakat (*community based*) agar proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkan dan menciptakan teknologi tepat guna dalam berbagai aktivitas pembangunan, diperlukan sebuah pemerintahan lokal yang inovatif (*innovative governance*) yang mendukung pemanfaatan teknologi.

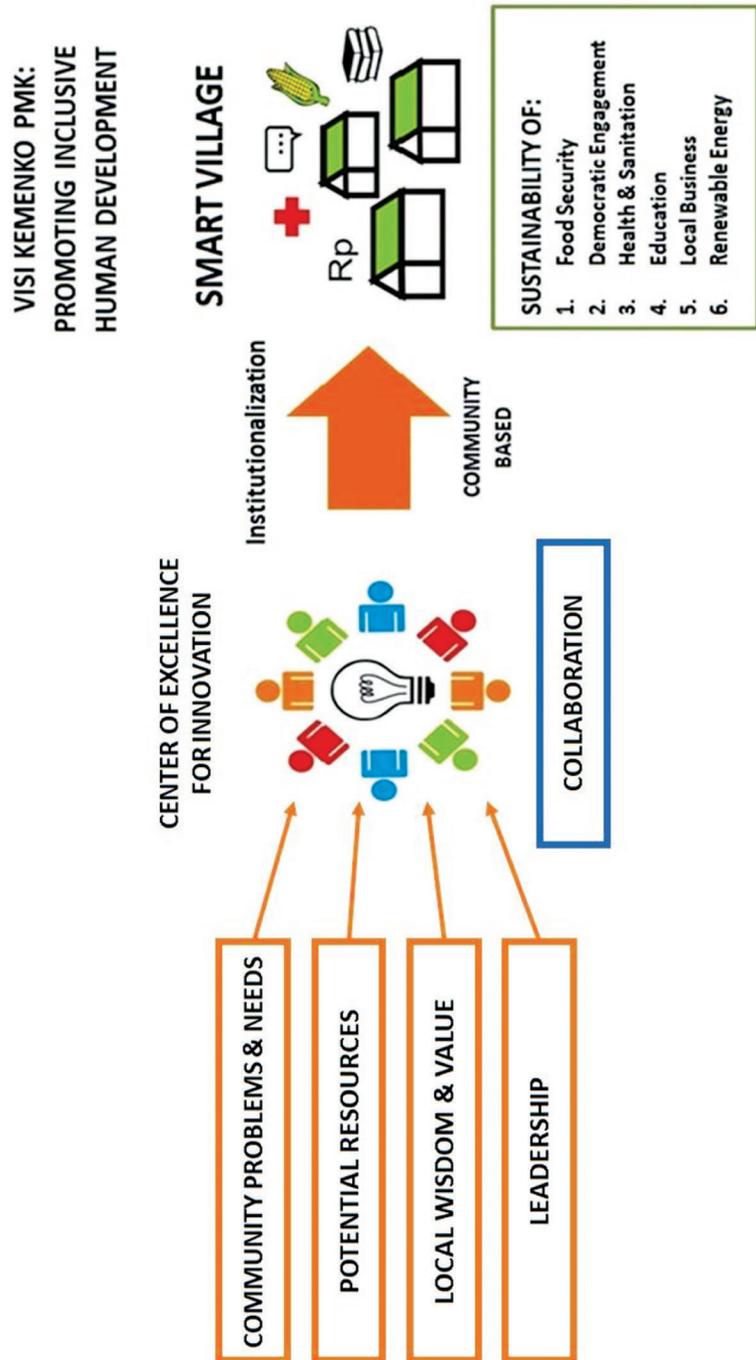
7) Energi Terbarukan

Krisis sumberdaya yang tidak dapat dibaharui merupakan tantangan yang mendesak bagi negara maju maupun negara berkembang, bahkan termasuk desa. Desa juga dapat mengatasi kekurangan energi tersebut dengan menggunakan potensi energi terbarukan. Energi terbarukan relatif mudah diperoleh karena cukup tersebar di berbagai wilayah geografis. Beberapa contoh energi terbarukan adalah energi matahari, angin, air dan biomasa (kotoran hewan). Potensi energi terbarukan ini dapat diposes dalam waktu yang jauh lebih singkat dan lebih sedikit polusi dibanding energi fosil bumi. Oleh karena itu energi terbarukan dapat menjadi solusi atas kurangnya pasokan listrik dan gas di desa.

1.4 Kerangka Konsep Pengembangan Desa Unggul dan Berkelanjutan

Secara konseptual, model yang hendak dikembangkan bermula dari proses identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di desa. Secara simultan, hal ini disertai dengan menggali potensi sumberdaya desa serta pengenalan lebih mendalam nilai-nilai filosofis serta kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di desa tersebut. Kemudian hal ini bisa dikaji dan diolah di dalam sebuah unit atau lembaga yang berfungsi sebagai *Center of Excellence* yang lebih menekankan pada inovasi-inovasi guna mengembangkan berbagai macam dimensi yang dimiliki desa. Proses ini dikawal dengan kepemimpinan dan kerjasama (kolaborasi) antar berbagai pemangku kepentingan. Hasilnya kemudian dikembangkan dengan basis komunitas masyarakat desa guna menghasilkan *Desa Unggul dan Berkelanjutan* yang memiliki orientasi kesinambungan ketahanan pangan, ketelibatan demokratis, kesehatan dan sanitasi, edukasi, usaha lokal dan energi yang terbarukan. Hal ini secara sinergis akan menunjang pewujudan visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yakni pembangunan manusia yang inklusif.

Secara sederhana uraian proses yang telah dilaborasi di atas dapat diilustrasikan melalui gambar berikut:



Gambar 1.1
Model Pengembangan
Desa Melalui Inovasi
untuk Mewujudkan Desa
Unggul (Prominent)
dan Berkelanjutan
(Sustainable)



INOVASI DAN PRAKTIK BAIK DESA SUKALAKSANA

Pius Sugeng Prasetyo

2.1 Gambaran Umum Desa

Desa Sukalaksana terletak di wilayah Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, dengan luas wilayah 203.426 Ha. Adapun jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan hasil pendataan 2014 sebanyak 4.476 jiwa yang terdiri dari 2.235 laki-laki, dan 2.241 perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 1.228 KK yang tersebar di 2 dusun dan terbagi lagi menjadi 7 RW dan 25 RT.

Desa Sukalaksana terletak di daerah perbukitan sehingga menjadikan banyaknya wilayah yang sangat sulit mendapatkan sumber air, di samping daerah-daerah yang sumber airnya cukup. Adapun daerah yang paling sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari adalah wilayah RW 01, 02, 03, dan RW 07 yang diakibatkan topografi daerahnya yang terletak di dataran tinggi. Desa Sukalaksana merupakan salah satu desa yang termasuk kategori “Desa Emas” dari 20 desa ditingkat provinsi dan menjadi perwakilan dari 3 desa terpilih di Kabupaten/Kota Garut, dua desa lainnya adalah Desa Mandalakasih dan Desa Cikandang.



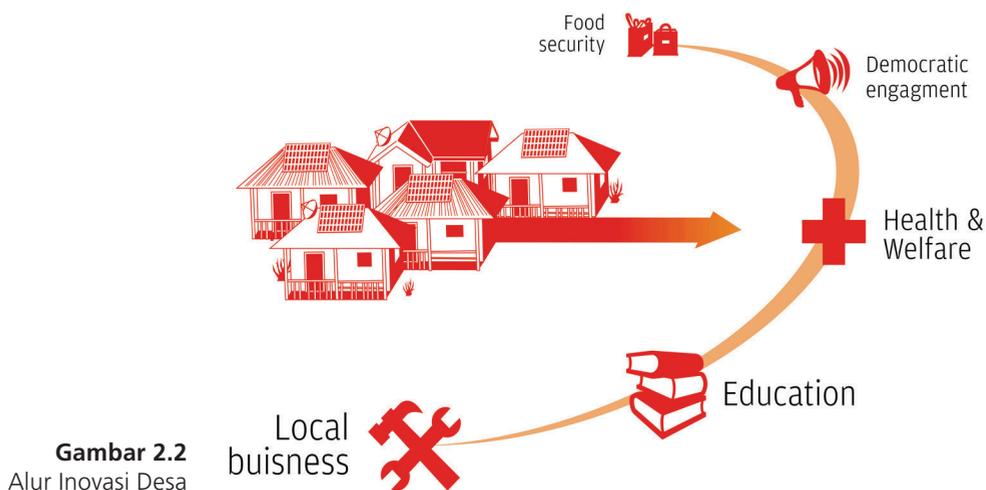
Gambar 2.1
Keindahan Desa
Sukalaksana

Terpilihnya Desa Sukalaksana menjadi salah satu dari 3 desa terpilih se-Kab/Kota Garut tentu bukan tanpa alasan, yakni dengan keunggulan di bidang wisata sehingga dijuluki “Desa Wisata” dan juga dibidang agrokultur (pertanian sayur-mayur). Desa ini bisa dikatakan mengalami perkembangan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan juga sarana prasarana fisik yang akhirnya bisa membawa Desa Sukalaksana bisa menjadi juara 1 lomba desa di tingkat Kabupaten Garut, dan juara 2 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan ke arah kemajuan yang terjadi di Desa Sukalaksana tentu saja melibatkan banyak pihak baik pihak internal yaitu masyarakat dan aparat desa, maupun pihak eksternal baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah termasuk dari kalangan perguruan tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan pembangunan untuk berinovasi banyak dilakukan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah Desa Sukalaksana juga memanfaatkan hasil studi banding ke beberapa desa di daerah-daerah untuk dijadikan sebagai masukan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan di Desa Sukalaksana. Beberapa kemajuan yang bersifat inovatif yang akan dilaporkan dari hasil penelitian antara lain dalam bidang sanitasi/kesehatan khususnya dalam hal penyediaan dan pengelolaan air minum, serta dalam bidang pengembangan ekonomi lokal (pedesaan). Kedua bidang tersebut pada kenyataannya telah berimplikasi positif dan meluas pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2 Inovasi-Inovasi Desa

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sukalaksana mempunyai berbagai potensi yang sudah dikembangkan dan yang bisa dikembangkan untuk masa yang akan datang. Dari praktik yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Sukalaksana menunjukkan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Fakta juga menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan tersebut telah membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Inovasi yang dilakukan di Desa Sukalaksana yang nyata memberikan dampak, yaitu: pengelolaan air bersih dan wisata. Untuk memahami inovasi yang dilakukan di desa bisa menggunakan alur konsep seperti di di bawah ini :



Gambar 2.2
Alur Inovasi Desa

Model di atas ingin menegaskan bahwa inovasi desa untuk menunjang keberlanjutan desa paling tidak dapat dilakukan pada beberapa aspek seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, sanitasi/kesehatan, dan keterlibatan demokratis. Dalam hal penelitian di Desa Sukalaksana memang tidak bisa menemukan pengembangan semua tersebut. Namun demikian pengembangan dalam hal pengelolaan air bersih dan pembangunan kawasan wisata desa pada akhirnya dapat berimplikasi positif pada aspek lainnya. Uraian berikut akan memaparkan inovasi yang dilakukan di Desa Sukalaksana.

2.3 Pengelolaan Air Bersih

Inovasi yang paling menonjol yang telah dilakukan Desa Sukalaksana adalah pendistribusian air yang melimpah. Distribusi air ini diurus oleh Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi – BP SPAMS – “Karya Laksana”. Desa Sukalaksana adalah salah satu dari 82 desa yang ada di wilayah Kabupaten Garut yang melaksanakan program PAMSIMAS. Tahun 2012 Desa Sukalaksana mendapatkan bantuan dari Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yang dialokasikan untuk Dusun I, RW 01, RW 02, dan RW 07. Inovasi ini mampu menyumbang pendapatan desa sebesar 8 juta hingga 10 juta rupiah per bulan, dengan jumlah sekitar 500 pengguna. Untuk mendapatkan distribusi air ini setiap rumah yang membutuhkan harus membayar biaya pemasangan (pipa dan meteran) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terpenuhinya kebutuhan air bersih dari tiga RW tersebut memicu pengembangan pelayanan oleh tim pengelola ke berbagai wilayah lainnya, yakni RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, atau dengan kata lain pemenuhan kebutuhan akan air bersih sudah hampir merata ke semua wilayah di Desa Sukalaksana. Sebelum Program Nasional PAMSIMAS digulirkan, sebagian warga masyarakat Desa Sukalaksana mendapatkan

kebutuhan airnya dari sumur gali, air sungai yang terdapat di sekitar desa, dan sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman yang unsur kesehatannya kurang terjamin. Akibatnya banyak warga yang sering menderita berbagai penyakit, seperti penyakit diare, kulit, dan lain-lain. Hal ini disebabkan pula dengan kurangnya sarana MCK (Mandi Cuci Kakus) dan perilaku penduduk yang melakukan pembuangan limbah rumah tangga sembarangan, khususnya limbah tinja yang masih banyak dibuang ke sungai atau kolam warga.

Sebelum munculnya inovasi ini, sistem pengairan di setiap rumah warga dilakukan dengan sebutan "*Sistem Cacing*", yakni pendistribusian air oleh masing-masing rumah yang ingin mendapatkan aliran air dari sebuah lokasi sumber yang telah disediakan. Sistem ini hanya memberi akses bagi mereka yang mampu membeli peralatan sendiri (pipa/selang) untuk mendapatkan air, selain itu sistem ini tidak dapat mengontrol kuantitas/volume air yang mengalir sehingga banyak air yang terbuang karena tidak menggunakan meteran dan peralatan yang memadai. Setelah dilakukan evaluasi, sistem ini dinilai tidak efektif, sehingga Desa Sukalaksana kemudian beralih pada sistem baru yang lebih tertata dan berkelanjutan melalui pengelolaan Pamsimas, walaupun demikian masih ada sebagian kecil masyarakat masih menggunakan "*sistem cacing*".

Gagasan inovasi penyediaan air minum ini muncul dari kegelisahan aparat desa untuk mencari solusi terhadap pemanfaatan sumber air yang tersedia, sehingga dari hasil studi banding aparat Desa Sukalaksana ke Yogyakarta memunculkan inspirasi untuk membangun sistem distribusi air yang lebih baik. Ide ini kemudian dibahas dalam musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dan disetujui oleh sebagian besar masyarakat desa.

Dampak yang muncul setelah diterapkannya inovasi distribusi air ini sangat baik bagi perkembangan masyarakat. Dampak positif yang baik terlihat pada kenaikan



Gambar 2.3
Sistem Distribusi Air
(Sistem Cacing)

taraf kesehatan masyarakat. Selain mendapat air bersih yang lebih merata, masyarakat desa juga dibekali pengetahuan “*Open Defecation Free*” atau ODH yang memberi pemahaman pentingnya untuk tidak membuang hajat sembarangan. Dampak lainnya adalah mulai munculnya kesadaran warga bahwa setiap rumah sudah seharusnya memiliki MCK (mandi cuci kakus) sendiri, hal ini juga sekaligus menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan akses distribusi air.

2.4 Tujuan Program PAMSIMAS

- a. Meningkatkan jumlah warga masyarakat desa yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, dari yang sebelumnya kurang terlayani dan juga masyarakat yang pendapatannya rendah di wilayah pedesaan dan peri-urban.
- b. Meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDG's (*Milenium Development Goals*), khususnya sektor air minum dan sanitasi, melalui perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Dari tujuan tersebut bisa dilihat bahwa program tersebut telah mencapai target-target sebagaimana yang ditunjukkan dari data penelitian yaitu :

- a. Terpenuhinya kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat sesuai dengan target yang sudah direncanakan (untuk kebutuhan masyarakat Desa Sukalaksana), bahkan sudah mampu mengembangkannya hingga ke beberapa wilayah lain di luar desa.
- b. Jumlah pemanfaatan air bersih sebelum adanya program PAMSIMAS sebanyak 456 KK (1695 jiwa) / 39,83%, meningkat menjadi 743 KK (2.762 jiwa) / 65%.
- c. Target pemanfaat untuk peningkatan akses SAB (Sarana Air Bersih) yaitu sebanyak 402 KK (1495 jiwa) / 25,07%.
- d. Terciptanya pola hidup atau budaya yang lebih bersih dan sehat di tengah masyarakat dengan adanya sanitasi yang baik.
- e. Jumlah akses dan kondisi sanitasi yang memenuhi syarat sebelum adanya program PAMSIMAS adalah sebanyak 174 KK (647 jiwa) / 15,20%, dan setelah terlaksananya program PAMSIMAS tercatat bahwa pemilik/ pengguna jamban meningkat menjadi 612 KK (2275 jiwa) / 53%.
- f. Peningkatan akses sanitasi sebesar 38,25%, dengan adanya jamban permanen sebanyak 14 KK, jamban semi permanen 580 KK, sharing 18 KK.

2.5 Sistem Pengelolaan

- a. Pembentukan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat berdasarkan hasil musyawarah. Dibentuk pada tanggal 21 September 2012 dengan nama "Karya Laksana", disahkan melalui SK Kepala Desa No. 141.1/02/SK/2012.
- b. Tugas utama BP-SPAMS adalah melakukan pemeliharaan dan pelestarian hasil bantuan program.
- c. Guna menunjang upaya pemeliharaan dan pelestarian Sarana Air Bersih yang sudah dibangun, maka ditetapkan Peraturan Desa Sukalaksana No. 04 Tahun 2012 Mengenai Tarif Pemasangan SR dan Tarif Bulanan Pemakaian Air Bersih Oleh Masyarakat Konsumen.

Aset BP-SPAMS Karya Laksana meliputi 2 unit Penangkap Mata Air (*broncapturing*), 2 unit Bak Penampung (*Reservoir*), Perpipaan 6.570 m, 10 (sepuluh) unit Keran Umum (KU), 1 (satu) unit Jamban Sekolah, 18 (delapan belas) unit Tempat Cuci Tangan, dan 3 (tiga) unit Bak Sampah. Hingga saat ini, Sambungan Rumah (SR) tercatat sebanyak 388 SR dan 23 sambungan sosial.

Teknis pengumpulan data pemakaian air dilakukan oleh pengurus setiap awal bulan. Sementara untuk pembayaran tarif per bulan dihitung berdasarkan jumlah pemakaian air yang dihitung dengan menggunakan meteran air, dan iuran disampaikan langsung oleh masyarakat ke sekretariat pengurus. Sesuai dengan Peraturan Desa No. 04 Tahun 2012, maka besaran tarif dasar pemakaian air bersih ditetapkan sebagai berikut:

Tarif pemasangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Tarif pemakaian per M3 : SR = Rp. 750,- KU dan sambungan sosial = Rp. 500,- ditambah abodemen Rp. 3.000,- / bulan.



Gambar 2.4
Distribusi Air
Menggunakan Bak
Penampungan



Gambar 2.5
Distribusi Air
Menggunakan
Water Meter



Gambar 2.6
Debit Air ke Rumah
Warga Pelanggan

Sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran iuran sebesar Rp. 3.000,- (jika melebihi tanggal 20/bulan) dan jika 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran maka sambungan otomatis akan diputus, untuk pemasangan kembali dikenakan biaya Rp. 200.000,-

2.6 Pengurus BP – SPAMS Karya Laksana

Struktur Pengurus BP-SPAMS Karya Laksana adalah sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Kepala Desa
Ketua	: Masrun Supriadi
Sekretaris	: Okim Sodikin
Bendahara	: Siti Julaeha
Staf	: Siti Nuraeni
UP Teknik	: Iyan Sujana, Ahmad Sopandi, Dede Pia, Tute Rohidin
UP Kesehatan	: Ente, Wiwi, Lisna, Ani Budiani.

Catatan penting yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa inovasi dalam hal penyediaan air bersih yang dapat dikonsumsi untuk air minum memang merupakan suatu hal yang sangat fenomenal di Desa Sukalaksana. Ada perubahan dari pola tradisional ke arah pola yang lebih modern yang dalam hal ini adalah perubahan cara memanfaatkan air yang berasal dari sumber air yang semula dengan menggunakan saluran plastik/karet (selang) secara pribadi ke arah pola dimana pemanfaatan air bersih dikelola secara kelembagaan dan dengan sistem jaringan pipa air minum dan juga dilengkapi dengan meteran untuk mengukur jumlah penggunaan air oleh warga masyarakat. Perubahan cara pemanfaatan air bersih ini tentu saja tidak begitu saja mudah dilakukan.

Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa yang didukung oleh aparat seperti sekretaris desa yang bisa bekerjasama secara sinergi. Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah bahwa para pimpinan desa mempunyai gaya kepemimpinan yang demokratis dalam arti bahwa mereka benar-benar mencoba menerjemahkan dan mengelola apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan akan air bersih yang bisa dikonsumsi. Mengelola kebutuhan dengan cara baru ini tentu saja juga menuntut perubahan cara pandang dan perilaku warga desa yang sebelumnya sudah terpolakan. Cara pandang warga diarahkan untuk mengerti bahwa air mempunyai dimensi sosial dan ekonomis. Secara sosial bahwa air yang berasal dari sumber mata air yang sama dibutuhkan oleh banyak orang sehingga pemanfaatannya jangan sampai terjadi pemborosan namun juga harus mengingat akan warga lainnya yang juga sama-sama membutuhkan. Dimensi ekonomis dari pengelolaan air bersih menunjukkan bahwa ketika air tersebut dikelola secara kelembagaan maka akan dapat memberikan efek ekonomi yang menguntungkan desa yang bersangkutan. Dalam hal ini pengelolaan air bersih dengan sistem berlangganan jelas memberikan keuntungan baik bagi warga karena terjamin keberlangsungannya dalam mengkonsumsi air bersih meskipun harus membayar biaya langganan setiap bulan. Disisi lain pemerintah desa juga mendapatkan pemasukan dari langganan para warga tersebut sebagai pendapatan desa.

Hal inilah yang akhirnya menjadi sebuah inovasi yang terjadi dalam perubahan cara pemanfaatan dan pengelolaan air bersih yang akhirnya berujung pada terjaminnya keberlanjutan warga desa dalam pemenuhan air bersih. Lebih dari itu adalah bahwa perubahan dari inovasi ini akhirnya juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan warga desa karena ada untuk berlangganan air bersih warga harus membuat terlebih dahulu *septic tank* sehingga desa ini juga masuk dalam kategori *Open Defecation Free – ODF* dengan demikian hal ini semakin memberikan jaminan pada pola hidup dan lingkungan yang sehat.

Dalam hal pengelolaan juga nampak adanya suatu inovasi yang dalam hal ini adalah penerapan sistem kelembagaan dalam pengelolaan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari bahwa perlu diterapkannya pengorganisasian

mengenai pengelolaan sumber daya yang sudah dikembangkan. Pengorganisasian ini tentu saja akan menjamin aspek akuntabilitas dalam pengelolaan, namun juga untuk menjamin keberlanjutan dalam pengelolaan air bersih. Apalagi ketika pengelolaan tersebut sudah memberikan implikasi ekonomi yang dalam hal ini memberikan pendapatan desa, maka aspek akuntabilitas pengelolaan keuangannya hanya akan bisa dijamin ketika ada pengorganisasian yang didukung kejelasan struktur, fungsi, dan tugas setiap orang yang berada dalam sistem organisasi tersebut.

2.7 Pengembangan Ekonomi Lokal

Aspek lain yang menonjol dari Desa Sukalaksana untuk menopang keberlanjutan desa dan masyarakatnya adalah dalam bidang ekonomi yang bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan ekonomi produksi yang dilakukan oleh warga masyarakat. Salah satu yang menjadi andalan adalah sektor pertanian. Potensi alam di Desa Sukalaksana menunjukkan bahwa lahan pertanian yang ada banyak ditanami sayur-sayuran seperti sosin, brokoli, dan tomat yang setiap hari dikelola secara produktif dan dijual ke daerah lain. Kegiatan usaha pertanian ini sangat nampak mulai dari pagi sampai menjelang sore ketika para petani warga desa mulai menanam, merawat dan memanen sayur-sayuran. Panenan yang kemudian diangkut dengan mobil-mobil angkutan seperti truk nampak hilir mudik menyemarakkan kegiatan ekonomi pertanian desa tersebut.

Jenis tanaman sosin memang merupakan produk andalan di Desa Sukalaksana. Tanaman ini bisa dikatakan mempunyai rentang waktu tanam yang pendek mulai dari saat tanam sampai dengan panen hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Mengingat kondisi lahan yang ada di Desa Sukalaksana yang memang cocok untuk pertanian sayur maka kegiatan ekonomi pertanian ini terus dikembangkan di Desa Sukalaksana. Warga Desa Sukalaksana mayoritas memiliki profesi sebagai petani. Warga cenderung mengurus bidang pertanian sayur sosin, ada yang memiliki lahan sendiri tapi sebagian besar bekerja di lahan orang lain. Bagi mereka yang bekerja di lahan orang lain umumnya mereka bekerja dari pagi pukul 7.30 Wib hingga pukul 12.00 Wib dengan gaji sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / hari.

Kegiatan pertanian khususnya tanaman sayur yang dilakukan di sebagian besar lahan pertanian di desa menunjukkan bahwa ekonomi pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain dapat menopang aspek perekonomian masyarakat desa, hal ini juga mendukung aspek ketahanan pangan, yang merupakan pilar penjamin ketersediaan pangan bagi warga. Namun demikian perlu juga dicermati juga bahwa kegiatan ekonomi pertanian yang dilakukan di Desa Sukalaksana, sebagaimana desa-desa lain, masih sangat tergantung pada mekanisme pasar, yang dikuasi pelaku ekonomi dari luar desa (tengkulak).

Petani desa dalam hal penentuan harga sangat ditentukan oleh para pembeli dari luar. Dengan kata lain para petani tidak mempunyai posisi tawar (*bargaining position*)



Gambar 2.7
Petani Sayur Sosin



Gambar 2.8
Pemupukan

dalam menentukan harga hasil pertaniannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pada suatu saat harga bisa jatuh sehingga tidak jarang para petani memutuskan untuk tidak memanen hasil pertaniannya, karena biaya memanen jauh lebih mahal dibandingkan dengan pemasukan dari hasil panennya. Namun demikian bisa dikatakan bahwa hingga sampai saat ini sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian desa secara berkelanjutan.

Perekonomian desa juga didukung oleh kegiatan ekonomi rumah tangga seperti pengrajin makanan, pande besi, dan tas. Dari hasil pengamatan bisa ditunjukkan kegiatan pengrajin tersebut misalnya :

1. Pengrajin Makanan Wajid dan Rangginang

Pembuatan makanan wajid dan rangginang ini dilakukan keluarga Ibu Apong. Untuk membuat wajid, bahan baku utama adalah ketan hitam. Kebetulan bahan baku ini tidak mudah tersedia di Desa Sukalaksana sehingga sering kali menjadi salah satu kendala karena faktor ketersediaan yang terbatas dan harganya yang mahal. Hingga



Gambar 2.9
Pengrajin makanan
Wajid dan Rangginang

saat ini ada 3 orang karyawan yang membantu dengan upah Rp. 25.000,-/hari, selain itu makanan ditanggung oleh majikan. Mereka bekerja dari pukul 9.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Penjualan setiap bulannya mencapai angka rata-rata sebanyak 5 kwintal dengan harga jual Rp. 20.000,- hingga Rp. 25.000,-. Makanan wajid ini cukup berkualitas, dan dapat bertahan hingga 3 minggu. Dalam hal pemasaran tidak mengalami kendala karena banyak konsumen datang secara langsung untuk pemesanan. Ruang lingkup usaha seperti ini berada masih di ranah keluarga, dan menjadi aset keluarga yang bersangkutan, serta merupakan usaha yang akan dilanjutkan oleh anak dari keluarga tersebut. Pada umumnya usaha yang dijalankan di Desa Sukalaksana adalah usaha masing-masing keluarga yang memiliki modal serta keahlian, kemudian mempekerjakan anak-anak muda yang tidak sekolah di desa tersebut.

Kontribusi dari pemerintah sangat minim, bahkan UPK – PNPB yang diterima dianggap bukan bagian dari pemerintah, hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang sangat minim dari pemerintah tentang program yang diberikan. Hal yang menarik dalam keanggotaan UPK ini adalah berlakunya sistem "*tanggung renteng – tanggung baut*", yang artinya apabila ada 1 orang dari anggota yang terdaftar tidak mengikuti aturan yang ditetapkan maka akan turut berdampak pada anggota lainnya, dan apabila ada yang melakukan pelanggaran misalnya tidak melakukan kewajiban pembayaran maka akan diberikan sanksi sosial yang cukup keras, yakni dikucilkan.

Sanksi yang diterapkan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh semua anggota yang terlibat pada saat musyawarah.

2. Pengrajin Tas Rak Sepatu

Usaha ini misalnya dilakukan oleh Ibu Ani. Pembuatan tas yang berfungsi sebagai rak sepatu ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Produksi yang ditargetkan adalah sejumlah 60 buah setiap hari. Karyawan ada 5 orang, dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB setiap harinya tanpa libur, kecuali ada acara yang tidak dapat ditinggalkan. Penghitungan upahnya berdasarkan jumlah produk (tas) yang dibuat, yakni mendapatkan Rp 5.000,- hingga Rp 6.000,- setiap satu produk. Jenis tas yang dibuat ada 2 kategori yakni yang besar dan kecil. Tas besar dijual dengan harga Rp 60.000,- dan yang kecil dijual dengan harga Rp 50.000,-. (Wawancara dengan Ibu Ani, pemilik usaha, 10 Desember 2016)

Karyawan yang dipekerjakan merupakan anak-anak muda yang telah putus sekolah, yang sebelumnya telah diberi pelatihan untuk mampu bekerja. Sehingga sebagian besar anak muda yang sudah tidak melanjutkan sekolah tidak ada yang menganggur tetapi memilih untuk bekerja di tempat usaha warga yang tersedia.



Gambar 2.10
Pengrajin Tas Rak Sepatu



Gambar 2.11
Hasil produksi Tas Rak Sepatu

Hingga saat ini belum ada bantuan yang berasal dari pemerintah untuk mengembangkan usaha. Hal tersebut tidak membuat usaha berhenti berjalan, namun justru tetap produktif dan mandiri. Untuk pemasaran produk tidak mengalami kendala, karena biasanya banyak konsumen yang datang ke lokasi usaha kemudian mengajukan kerjasama untuk produksi. Sistem pembayaran yang diterapkan adalah beli putus atau dengan kata lain, beli barang langsung bayar, tidak berlaku sistem bayar kemudian atau cicilan. Pesanan yang diterima banyak berasal dari Bandung dan berbagai kota lainnya, bahkan ada dari Sumatera.

3. Pengrajin Pandai Besi (Merk - IKIN)

Usaha pandai besi ini merupakan warisan dari beberapa keturunan keluarga, sehingga karena kualitas yang terjamin, produknya sudah sangat dikenal warga desa, maupun warga dari desa lain bahkan dari luar kota. Warga desa juga memiliki prinsip yang sangat kuat untuk membeli dan menggunakan produk buatan warga sekitar ketimbang membeli dari luar.

Kendala terbesar saat ini adalah tidak adanya dukungan secara teknis dan peralatan dari pihak pemerintah. Peralatan yang digunakan masih sangat tradisional dan sangat rentan dengan kecelakaan. Karyawan yang membantu ada 2 orang, dengan upah setiap hari kerja sebesar Rp 80.000,- hingga Rp 100.000,-, jam kerja dari pukul 5.30 hingga pukul 13.00 Wib. Pekerjaan dalam usaha ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan berdasar pada jumlah pesanan yang diterima. Kendala lainnya adalah sistem kerja yang harus dilakukan oleh 3 orang dalam waktu yang sama, sehingga pekerjaan tidak akan berjalan apabila salah seorang dari 3 karyawan tersebut tidak datang.

Produk yang dihasilkan oleh pandai besi – IKIN ini seperti cangkul dengan harga jual Rp 400.000,- hingga Rp 500.000,- ; parang dengan harga jual Rp 200.000,- hingga Rp 250.000,-; golok dengan harga jual Rp 250.000,- dan berbagai produk lainnya sesuai permintaan konsumen. Produk dengan merk IKIN ini menjadi pilihan warga maupun konsumen dari luar kota karena kualitas yang sangat sesuai ekspektasi warga, semakin sering digunakan maka akan semakin tajam alat tersebut, berbeda halnya dengan produk impor yang memiliki kualitas rendah, semakin sering digunakan justru semakin tumpul. Dengan kualitas tersebut, warga dan konsumen pun sangat percaya untuk membeli produk dari usaha yang satu ini. (Wawancara dengan Anak Pak Ikin, 10 Desember 2016)

Secara lebih detil, kebutuhan yang sangat diharapkan adalah alat pelebur agar tidak secara terus menerus menggunakan arang karena dapat merusak lingkungan. Keinginan untuk mendapatkan alat ini masih menjadi kendala bagi perkembangan usaha pandai besi. Kebutuhan lainnya yang sebenarnya sangat wajib disediakan adalah peralatan keamanan, karena selama ini tanpa adanya alat pengaman bagi karyawan, sehingga seringkali terjadi kecelakaan kecil terhadap karyawan.

4. Desa Wisata

Potensi lain yang terus dikembangkan oleh Desa Sukalaksana adalah inovasi untuk konsep “Desa Wisata”. Desa ini telah tercatat sebagai “Desa Wisata” sejak tahun 2009. Potensi Desa Sukalaksana adalah di sektor pertanian sayur-mayur (agrikultur), *handycraft* (berbagai jenis kerajinan tangan), pemeliharaan domba aduan, produk makanan, serta pandai besi. Ide atau gagasan untuk membawa Desa Sukalaksana menjadi salah satu Desa Wisata yang ada di Indonesia berasal dari aparat desa yang mengemban amanat warga, hal ini berdasarkan studi banding yang dilakukan sebelumnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Kemudian gagasan tersebut dimusyawarahkan dengan warga untuk disepakati dan ditindaklanjuti. Semua potensi tersebut diarahkan untuk bisa menjadi media belajar, hiburan, dan menjadi penghasilan tetap bagi pekerja. Dengan demikian konsep desa wisata ini pada akhirnya menjadi strategi untuk semakin memperkuat sektor perekonomian desa. (*Wawancara dengan Wijiono, mantan sekretaris dan mantan PLT Kepala Desa Sukalaksanan, 8 Desember 2016*).



Gambar 2.12
Saung Ciburial-Lokasi
Kampung Wisata



Gambar 2.13
Tamu Immersion
Program-Australia

Pada tahap awal, sosialisasi tentang inovasi Desa Wisata Sukalaksana ini tidak disambut baik oleh warga, atau dengan kata lain kurang tertarik karena umumnya warga berpikir instan, tidak begitu tertarik dengan hal yang belum pasti. Namun meskipun demikian, setelah diyakinkan, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Secara operasional desa wisata ini tidak mendapat bantuan dana dari pihak manapun, tetapi secara pengembangan infrastruktur desa wisata ini awalnya dibantu program CSR – Chevron sejak 2009 hingga saat ini, namun tidak setiap tahunnya, atau dengan kata lain hanya pada saat tertentu saja. Chevron juga turut membantu dengan menggandeng sebuah LSM – Pupuk untuk memberi pelatihan bagi pengelola kawasan desa wisata. Pihak Aparat desa pun tidak berminat meminta bantuan dari pemerintah, karena desa wisata ini dibangun dengan berbasis pada komunitas meskipun tetap disadari akan adanya dukungan dari pihak lain yaitu dengan memanfaatkan dana CSR.

Pemanfaatan dana CSR ini pada akhirnya juga dapat berimplikasi pada aspek lain yaitu terbangunnya jaringan kerjasama dengan pihak lain diluar pemerintah setempat. Terbangunnya kerjasama ini tentu saja merupakan langkah maju dan kebanggaan tersendiri bagi aparat dan warga jika mampu membangun kerjasama dengan CSR, meskipun hal ini juga disadari bahwa setiap kerjasama akan menimbulkan tantangan bagi aparat dan warga dalam meningkatkan kualitas layanan. (*Wawancara dengan Oban, Kepala Desa Sukalaksana, 09 Desember 2016*).

Hingga saat ini pengelola yang mengurus Desa Wisata Desa Sukalaksana tercatat ada 8 (delapan) orang. Sistem pembayaran upahnya tidak tetap, tetapi hanya mendapat upah jika ada tamu yang berkunjung. Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan, para pengelola ini pernah mendapatkan pelatihan untuk studi banding 1 kali, selebihnya diberikan pelatihan teknis yang dibantu oleh LSM – Pupuk yang juga merupakan partner dari Chevron.

Desa Wisata yang dikembangkan juga mengarah pada edukasi dan hiburan. Hal yang ditonjolkan adalah sisi kehidupan tradisional, misalnya memunculkan permainan "*kabarulem*" yang menjadi ikon dalam tiap sesi atau paket jika ada tamu yang berkunjung. Kehadiran inovasi Desa Wisata ini sangat berdampak positif, selain meningkatkan daya ekonomi, juga turut mempertahankan budaya yang sebelumnya terancam mulai hilang. Misalnya budaya beladiri "*silat*", hal ini sebelumnya menjadi salah satu atraksi wajib jika ada sebuah acara atau hajatan di desa, namun kemudian secara perlahan mulai menghilang karena masuknya dangdut setiap ada acara di desa. Namun "*silat*" kembali menjadi pusat perhatian setelah hadirnya inovasi Desa Wisata sebagai salah satu bentuk atraksi yang ditonton oleh pengunjung.

Inovasi lainnya yang sedang dikembangkan adalah kegiatan "*Festival Budaya*" dengan melakukan liwetan bersama dengan melibatkan 1000 peserta, pengembangan tempat penginapan, tempat bermain anak-anak, tempat peternakan khas domba garut, futsal di lumpur, serta pengembangan produk berupa sabun dengan aroma terapi "*akar*



Gambar 2.14
Immersion Program di
Saung Ciburial

wangi”, hal ini direncanakan akan menjadi ikon baru Desa Sukalaksana jika berhasil, dan akan bekerjasama dengan hotel-hotel di Bandung.

Secara administrasi ada 13 desa yang menjadi Desa Wisata di Kabupaten Garut, 12 diantaranya terdaftar dan mendapat kucuran dana dari Dinas Kebudayaan, sementara Desa Sukalaksana tidak demikian, tidak terdaftar di Dinas Kebudayaan dan tidak mendapat kucuran dana, meskipun justru Desa Sukalaksana yang menjadi andalan Desa Wisata di Kabupaten Garut.

2.8 Kesimpulan Dan Rekomendasi Untuk Langkah Lanjut

- a. Kepemimpinan : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa *best practices* dalam pengembangan Desa Sukalaksana baik yang berkaitan dengan isu pengelolaan air bersih dan khususnya tentang desa wisata dimulai dari ide kreatif kepala desa untuk mendatangkan orang dari luar desa agar bisa berkunjung ke Desa Sukalaksana. Oleh karena itu keputusan yang diambil adalah dengan mengembangkan desa menjadi desa wisata. Ide ini kemudian ditindaklanjuti dengan studi banding ke beberapa desa di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tentu saja dengan studi banding tersebut dapat memperoleh inspirasi yang dapat dijadikan landasan untuk menerapkannya di Desa Sukalaksana. Tindaklanjutnya adalah penentuan lokasi yang kemudian oleh kepala desa ditentukan bahwa lokasi yang menjadi pusat kegiatan wisata desa adalah di Saung Ciburial dimana terdapat mata air yang sampai saat ini tidak pernah berhenti. Oleh karena itulah maka tempat ini diyakini akan dapat memberikan berkah dan keuntungan bagi warga desa jikalau dikembangkan menjadi kawasan wisata. Demikian juga halnya dengan pengelolaan air bersih yang pada dasarnya diawali dengan ide kreatif dari pimpinan desa untuk memperkenalkan dan merubah pola pemanfaatan air bersih dari sistem yang

tradisional ke sistem yang lebih maju dan memberi dampak keuntungan ekonomi bagi desa yang bersangkutan.

Kepemimpinan yang dipraktikkan di Desa Sukalaksana jelas menjadi suatu faktor yang sangat fundamental dalam hal pengembangan desa wisata maupun pengelolaan air bersih yang diawali dengan ide kreatif kepala desa yang juga didukung oleh aparat desa lainnya dan juga oleh warga desa. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan di desa. Pemimpin yang visioner menjadi penentu arah pembangunan di desa. Aspek lain yang tentu saja merupakan hal sangat fundamental dan melekat dalam diri pemimpin adalah aspek integritas yang diartikan sebagai pemimpin yang bisa dipercaya dan jujur. Keberanian yang ditunjukkan oleh pemerintah desa Sukalaksana yang menginisiasikan Deklarasi Anti Korupsi dengan penandatanganan Pakta Integritas yang akhirnya diikuti oleh semua desa di Kecamatan Samarang dan di saksikan oleh Camat serta Bupati Kabupaten Garut di bulan Desember 2015.

- b. Partisipasi Masyarakat: Hal lain yang sangat penting untuk dicatat adalah aspek keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan inovasi di desa. Hal ini nampak dari respon warga desa untuk merelakan lahan miliknya untuk digunakan menjadi lokasi kawasan wisata desa "Saung Ciburial". Sebagaimana diketahui bahwa lahan yang ditempati sebagai pusat kegiatan wisata desa merupakan lahan atau sawah warga desa. Kontribusi warga sangat tinggi, bahkan lahan yang digunakan pun merupakan lahan yang dihibahkan oleh warga dengan luas sekitar 2 hektar. Pendapatan yang diperoleh dari inovasi Desa Wisata ini sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur dan juga untuk kegiatan sosial membantu warga desa, misalnya keluarga miskin yang sakit atau hal sejenis lainnya. Warga desa merelakan untuk meminjamkan lahannya kepada desa untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan didukung dengan kesepakatan untuk membuat skema bagi hasil terhadap pengelolaan kegiatan wisata di lahan warga desa tersebut. Partisipasi warga dalam keterlibatannya untuk mendukung kegiatan wisata desa ini tercermin juga dalam menyediakan konsumsi bagi para tamu yang berkunjung di Saung Ciburial sebagai pusat kegiatan wisata. (*Wawancara dengan Oban, Kepala Desa Sukalaksana, 09 Desember 2016*).
- c. Modal sosial seperti integritas dan kredibilitas yang dimiliki oleh pimpinan desa yang dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa pada akhirnya berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi yang diwujudkan dengan keterlibatan dan kerjasama masyarakat dalam berbagai program pembangunan di desa. Dalam hal pembangunan desa wisata dan pengelolaan air bersih, masyarakat benar-benar ambil bagian secara signifikan dalam mewujudkan impian menjadikan desanya menjadi desa wisata serta terpenuhinya kebutuhan akan air bersih yang terjamin kualitas dan keberlanjutan pemenuhannya. Modal sosial masyarakat juga menemukan wujud nyata ketika para warga merelakan lahannya untuk dipakai sebagai kawasan wisata

tanpa harus memperhitungkan dari aspek untung ruginya. Semangat gotong royong yang merupakan modal sosial masyarakat juga nampak ketika pemerintah desa juga berusaha untuk pemeratakan partisipasi warga dalam mendukung kawasan wisata “Kampung Ciburial” dengan secara bergilir memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di setiap rukun warga untuk menyediakan makanan bagi para pengunjung kampung wisata tersebut.

- d. Pengorganisasian : Aktivitas-aktivitas inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dan warga Desa Sukalaksana pada dasarnya tidak dibiarkan menjadi berbagai aktivitas yang bergerak tanpa arah , namun justru diorganisasikan dalam suatu lembaga atau unit yang diciptakan untuk mengelolanya agar inovasi-inovasi tersebut dapat memberikan dampak yang kontributif dan konstruktif bagi peningkatan kesejahteraan warga desa. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan air bersih dan kawasan wisata desa yang dilakukan oleh badan usaha milik desa (BUMDes). Unit ini pada akhirnya juga dapat berperan sebagai unit penggerak usaha-usaha lainnya yang merupakan potensi desa yang bisa dikembangkan.
- e. Kolaborasi : Kerjasama antara pemerintah, warga desa dan pihak lain di luar desa akhirnya menjadi penentu keberhasilan pembangunan di desa. Pemerintah dan warga desa sangat menyadari bahwa pembangunan tersebut akan semakin dapat dipercepat ketika ada dukungan dari pihak luar yang dalam hal ini adalah pihak korporasi yang memberikan dana CSR yang dapat mendukung proses pembangunan. Demikian juga keterlibatan lain seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga perguruan tinggi tentu saja akan semakin memberi penguatan kepada pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visinya. Kolaborasi seperti ini yang pada akhirnya diharapkan akan semakin dapat menjamin keberlanjutan desa dalam memajukan aspek-aspek kehidupan yang ada di desa sehingga semakin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



MENGGANTUNGAN HARAPAN PADA ALAM: INOVASI DESA BULUH DURI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN

Tutik Rachmawati

3.1 Gambaran Umum, Tantangan dan Permasalahan Desa Buluh Duri

Desa Buluh Duri terletak di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Desa ini merupakan salah satu dari ribuan desa lainnya di Indonesia yang letak wilayahnya berada didalam atau berdampingan dengan wilayah lahan BUMN PTPN-III Gunung Pamela. Berikut ini adalah gambaran umum Kecamatan Sipispis dimana Desa Buluh Duri terletak. Secara geografis, Kecamatan Sipispis memanjang dari Utara ke Selatan yang luasnya + 222.60 Km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar (Kab. Simalungun)

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dolok Merawan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Raya Kahean (Kabupaten Simalungun)

Secara umum, Kecamatan Sipispis termasuk dataran tinggi dengan kontur tanah yang berbukit-bukit dan terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata 400-450 Meter dari atas permukaan laut (Dpl). Di wilayah kecamatan ini terdapat sebuah gunung yang dinamakan Gunung Simbolon II dan beberapa buah sungai besar dan kecil dan yang paling terkenal adalah sungai Bah Bolon dan sungai Padang yang terletak menjadi satu dengan nama Sungai Padang. Sungai Padang ini berhulu di Kabupaten Simalungun dan bermuara di Selat Sumatera setelah melalui Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Bandar Khalifah. Sungai Bah Bolon inilah yang mengalir di sepanjang sisi Desa Buluh Duri dan dianggap sebagai satu-satunya potensi alam yang dimiliki oleh Desa Buluh Duri. Secara tradisional, sungai Bah Bolon dimanfaatkan sebagai sumber air dan juga sumber Tambang Bahan Galian C (pasir dan batu kali). Saat ini dua sungai tersebut sedang dikembangkan sebagai tempat wisata.

Sebagai bagian dari kecamatan Sipispis, Desa Buluh Duri, sejak jaman Hindia Belanda tanah-tanah yang baik dan rata untuk pertanian telah dikuasai Belanda dan dijadikan *Ordeneming/Perkebunan*. Tanah yang dikuasai/ dimiliki rakyat pada umumnya adalah areal-areal yang berada di pinggiran kebun, tanah-tanah miring kurang baik. Semenjak kemerdekaan, maka tanah-tanah yang dikuasai Belanda tersebut kemudian di akuisisi oleh Negara dan diolah oleh BUMN PT Perkebunan. Seperti yang disampaikan diatas, di wilayah Desa Buluh Duri, PT Perkebunan yang beroperasi adalah PT Perkebunan Gunung Pamela. Selain itu, tata guna lahan di Kecamatan Sipispis adalah sebagai berikut:

PT. Perkebunan Gunung Pamela dan Gunung Monako dengan jumlah areal 4.322 Ha
PT. Good Year Naga Raja : 2.486 Ha
Karet Rakyat : 204 Ha
Sawit Rakyat : 9.618 Ha
Sawah Hujan : 511 Ha
Sawah Irigasi : 204 Ha
Perumahan, Jalan, Lapangan Bola, Perkuburan dll. : 747 Ha
Hutan Lindung : 2.670 Ha

Di kecamatan Sipispis, terdapat 20 desa yang dibagi menjadi beberapa tipe yaitu:

Desa Perladangan/ Perkebunan Rakyat = 14 desa
Desa Perkebunan BUMN= 4 desa
Desa Perkebunan Swasta Asing= 2 desa

Dengan pembagian tipe desa tersebut, berdasarkan pada penjelasan Kepala Desa Buluh Duri, Desa Buluh Duri merupakan desa perkebunan BUMN tidak murni (Desa Perkebunan Campuran) karena masih ada wilayah desa yang tidak menjadi milik BUMN PTPN III Gunung Pamela sebanyak 30%. Berdasarkan data wilayah seluas 1.900 hektar dikuasai oleh BUMN PTPN III Gunung Pamela. Sebagai desa perkebunan BUMN tidak murni, maka mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai buruh/ karyawan perkebunan dan sebagian kecil penduduk yang memiliki lahan sendiri bekerja sebagai petani atau berkebun.

Desa Buluh Duri terdiri dari 7 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 3.500 jiwa dan sebagian besar adalah usia produktif dan tingkat pendidikan rata-rata SMA. Hal ini tentu adalah hal yang wajar mengingat sebagian besar masyarakat adalah karyawan perusahaan BUMN PTPN III Gunung Pamela. Dari sejumlah 3.915 Jiwa, separuh dari jumlah tersebut adalah karyawan dari BUMN PTPN III Gunung Pamela dan separuh sisanya adalah non karyawan (yang sebagian besar merupakan pensiunan karyawan PTPN III). Bagi warga desa yang merupakan karyawan PTPN III mereka memang terlihat seperti dalam kondisi perekonomian yang lebih baik karena mendapatkan fasilitas tunjangan beras sebanyak 43 kg (untuk suami istri dengan tiga anak), gaji pokok sesuai

UMR yaitu 1,9 juta perbulan, tunjangan anak sekolah (mahasiswa 300 ribu sebulan, SMA 250 ribu sebulan, dan SMP 200 ribu). Dengan *take home pay* sebesar 3,2 juta Rupiah per bulan untuk mereka yang tidak memiliki kewajiban hutang. Bagi warga yang memiliki kewajiban hutang maka *take-home-pay* akan berkurang, padahal hutang yang dilakukan kepada bank adalah hutang untuk keperluan konsumtif. Dalam hal ini, kepala Desa Buluh Duri masih terus berkomunikasi dengan pihak perusahaan PTPN III untuk sedikit mempersulit pemberian pinjaman karyawan kepada bank sehingga warga Desa Buluh Duri yang juga merupakan karyawan PTPN III dapat lebih mengendalikan diri dan mengelola keuangannya dengan lebih baik. Dengan kondisi yang demikian, maka warga karyawan PTPN III apabila tidak memiliki tambahan penghasilan maka akan kesulitan. Bagi warga yang pensiun dari PTPN III hanya mendapat 500 ribu Rupiah per bulan, sehingga tidak mengherankan apabila mereka meminta bantuan Raskin meskipun statusnya adalah pensiunan karyawan BUMN. Dengan kondisi yang seperti itu, masih banyak terdapat rumah tangga miskin di Desa Buluh Duri, bahkan pensiunan karyawan PTPN III Gunung Pamela, meskipun tampaknya memiliki tempat tinggal/rumah yang sangat baik dan layak huni, namun mereka masih meminta jatah beras miskin.

Berikut ini adalah aspek demografi Desa Buluh Duri:

Tabel 3.1 Demografi Desa Buluh Duri

Deskripsi	Jumlah
Jumlah Penduduk	3.915
Jumlah Usia Produktif	2.054
Jumlah Penduduk wanita	1.923
Jumlah Penduduk Laki-laki	1.962
Jumlah Penduduk Difabel	19

Desa Buluh Duri memiliki APBDes yang terdiri dari: Talangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak.

Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buluh Duri

Tahun Anggaran	Besarnya Anggaran
2015	Rp. 859.998.263
2016	Rp. 504.523.600

Keterangan: Jumlah Anggaran di atas tidak termasuk dengan Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buluh Duri, dan diperkuat dengan informasi yang didapatkan dari halaman *website* Desa Buluh Duri, maka dapat dipahami bahwa desa-desa di Kecamatan Sipispis menghadapi permasalahan yang hampir seragam yaitu:

Kurangnya infrastruktur jalan/transportasi,
Konflik kepemilikan lahan/tanah dan
Keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam hal permasalahan kurangnya infratruktur jalan, berdasarkan hasil observasi selama masa *fieldwork*, Desa Buluh Duri juga mengalami permasalahan yang sama dengan desa-desa lainnya di kecamatan Sipispis. Walaupun ada sebagian kecil infrastruktur jalan terutama di jalan utama akses dari Kabupaten Tebing Tinggi ke Kantor Kepala Desa sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya di Kecamatan Sipispis, namun jalan-jalan desa masih sulit untuk dilalui.

BUMN Perkebunan, PTPN III Gunung Pamela, bergerak dalam perkebunan tanaman karet dan kelapa sawit. Dengan kondisi luas wilayahnya (70%) adalah wilayah milik PTPN III Gunung Pamela, maka Desa Buluh Duri seringkali dihadapkan pada kesulitan untuk merancang kegiatan pembangunan terutama untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang membutuhkan ketersediaan lahan/ tanah serta batas-batas wilayah yang tidak jelas. Kawasan desa yang hampir sebagian besar digunakan untuk usaha perkebunan karet, membuat desa ini memiliki sangat sedikit lahan atau wilayah yang dapat dikembangkan demi menunjang pembangunan desa.

Permasalahan ketiga yang dihadapi oleh Desa Buluh Duri adalah dalam hal sumber daya manusia. Lebih dari 50% penduduk desa ini merupakan karyawan dari PTPN III Gunung Pamela. Perilaku masyarakat yang merupakan karyawan dari BUMN dan ataupun orangtua ataupun generasi sebelumnya yang juga merupakan karyawan BUMN, mengembangkan kebiasaan dan gaya hidup yang nyaman, tidak terlalu berpikir untuk melakukan perubahan, ataupun berpikir untuk mencari kegiatan yang lain untuk menambah perekonomian keluarga. Sebagian masyarakat terbiasa menerima perintah dari atasan dan tidak memerlukan berpikir inovatif atau kreatif, terbiasa menerima upah/ gaji pada tanggal tertentu dan tidak terbiasa mencari tambahan penghasilan. Kondisi masyarakat yang seperti ini menyulitkan proses pembangunan desa terutama dalam hal terkait dengan pemberian ide inovatif pembangunan desa.

3.2 Faktor-faktor Penentu Inovasi Desa Buluh Duri

Meskipun Desa Buluh Duri dihadapkan pada tiga permasalahan diatas, yang cenderung sulit untuk maju dan melakukan pembangunan desa, namun disini lain desa ini dapat digolongkan sebagai desa yang memiliki praktik baik (*good practices*) dalam hal inovasi desa.

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan inovasi Desa Buluh Duri. Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa aspek seperti:

Sumber daya alam berupa sungai Bah Bolon yang secara alami mengalir di Desa Buluh Duri

Kepemimpinan kepala desa

Local wisdom (local values)

Investasi swasta (perseorangan)

Selanjutnya dalam makalah ini akan dibahas mengenai masing-masing faktor tersebut.

1. Faktor Sumber Daya Alam (*Natural Endowment*)

Desa Buluh Duri memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia yaitu Sungai Bah Bolon yang masih terjaga ekosistemnya untuk dijadikan tujuan wisata arung jeram (*rafting*) sebagai salah satu program pembangunan utama di desanya. Dengan menjadikan Sungai Bah Bolon sebagai tujuan wisata olahraga (arung jeram/*rafting*) maka Desa Buluh Duri memulai untuk menjadi desa wisata. Arung Jeram tersebut terkenal dengan nama Arung Jeram Ancol dan sudah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan investasi dari perusahaan perorangan. Namun Arung Jeram Ancol tersebut dikelola oleh desa tetangga dan Desa Buluh Duri tidak mendapatkan bagian pendapatan yang dianggap layak. Pengelolaan Wisata Arung Jeram Ancol ini memanfaatkan potensi sungai sepanjang 16 km yang dengan sumber mata air murni disepanjang sungai dan bentukan batu cadas yang keindahannya sepadan dengan Grand Canyon. Arung Jeram Ancol merupakan salah satu jalur arung jeram terpanjang di Indonesia yang dapat dinikmati oleh hampir semua lapisan umur dari umur 6 tahun sampai dengan 60 tahun. Arung Jeram Ancol memiliki jarak tempuh 4 jam dengan tiket masuk sebesar Rp. 200.000 per orang. Dengan membayar uang tersebut, maka pengunjung mendapatkan fasilitas lengkap yaitu *rafting* dengan didampingi oleh *water-guard(skipper)*, makan siang dan fasilitas mandi yang layak. Dari pembayaran tiket masuk sebesar Rp. 200.000,- tersebut, pengelola Arung Jeram Ancol memberikan kontribusi berupa retribusi kepada Kabupaten Serdang Begadai sebesar Rp 3.000,- serta Rp 2.000,- kepada pengelola desa.

Seperti yang telah disebutkan diatas, Ancol Arung Jeram ini merupakan usaha arung jeram yang dikelola secara individual (Teddy). Sebagai pengelola Arung Jeram Ancol, perusahaan tersebut yang membangun infrastruktur dasar (berupa base camp) dan fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti lahan parkir, tempat menginap, toilet dan musholla, wahana *flying fox*, penyediaan perahu dan alat-alat arung jeram/ *rafting*. Berdasarkan hasil wawancara, Teddy memulai usaha Arung Jeram Ancol ini karena kecintaannya kepada olahraga arung jeram/*rafting*. Teddy memiliki pengalaman yang baik di bidang arung jeram, dan berdasarkan hasil observasinya, Teddy menemukan bahwa Sungai Bah Bolon dapat digunakan sebagai wahana untuk arung jeram.

Selain sebagai wahana arung jeram (*rafting*), oleh beberapa penduduk desa sepanjang sungai Bah Bolon, sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan

dengan menambang pasir dan batu kali (tambang golongan C). Kegiatan penambangan pasir dan batu kali tersebut tentunya tidak mendukung kegiatan wisata arung jeram. Sungai Bah Bolon juga dimanfaatkan sebagai sumber air dan MCK bagi penduduk desa di sepanjang 16 kilometer sungai Bah Bolon.

Dengan memperhatikan fungsi ganda sungai Bah Bolon tersebut, dan untuk tujuan tetap mempertahankan ekosistem dari Sungai Bah Bolon yang nantinya juga akan mendukung keberlangsungan usaha arung jeram, maka pengelola Arung Jeram Ancol mengingatkan secara berkala kepada turis untuk tidak membuang sampah ke sungai. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha mempertahankan keberlanjutan satu-satunya aset Desa Buluh Duri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buluh Duri, kegiatan penambangan pasir dan batu kali masih diijinkan karena skalanya sangat kecil, yaitu per individu atau kelompok masyarakat di Desa Buluh Duri. Individu atau kelompok masyarakat tersebut termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah, selain itu Kepala Desa mengenal setiap penambang di Desa Buluh Duri sehingga hal tersebut akan memudahkan pengawasan apabila kegiatan penambangan tersebut mulai merusak lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi, di beberapa titik sungai Bah Bolon yang termasuk luar wilayah Desa Buluh Duri ditemukan kegiatan-kegiatan penambangan pasir dan batu. Tidak ada informasi mengenai apakah kegiatan tersebut bersifat legal atau tidak dan terdapat kegiatan penambangan menggunakan alat berat seperti *backhoe*. Temuan diatas dapat menjadi potensi masalah di masa depan untuk Desa Buluh Duri sendiri, khususnya untuk keberadaan Arung Jeram Ancol, apabila kegiatannya tidak diatur dan dikendalikan dengan baik. Salah satu dampak yang sudah dapat dilihat saat ini adalah terdapat bagian dari jalur sungai yang airnya sudah tidak jernih lagi karena tercampur dengan aliran sungai yang di hilirnya terdapat aktivitas penambangan pasir.

Selain itu, tepat di samping *base camp* Arung Jeram Ancol, namun termasuk luar wilayah Desa Buluh Duri mulai dibangun pabrik pengolahan kelapa sawit. Di masa depan, pabrik pengolahan kelapa sawit ini akan mengancam ekosistem sungai dan juga mengancam keberlanjutan wisata arung jeram, bila tidak ada pengawasan yang baik terkait dengan pengolahan limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Desa Buluh Duri yaitu adanya potensi banjir. Mengingat penyempitan jalur sungai karena adanya aktivitas reklamasi sungai untuk jalan truk-truk penambang pasir, maka banjir akan sangat mungkin terjadi di musim hujan saat debit air meningkat.

Beberapa hal yang menjadi kekurangan dan usaha arung jeram adalah kemungkinan terdapatnya eksplotasi pekerja anak di Desa Buluh Duri bila tidak diatur dengan baik. Selain itu, masuknya wisatawan terutama wisatawan asing dengan budaya yang berbeda

dari budaya Indonesia pada umumnya (cara berpakaian, kebiasaan mengonsumsi alkohol) akan mengakibatkan *culture shock* di kalangan penduduk desa.

Namun, walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan diatas, pengelola usaha arung jeram tersebut, memiliki misi yang sangat besar untuk perkembangan Arung Jeram Ancol menjadi destinasi wisata air yang besar bahkan berskala internasional. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh kesiapan masyarakat di Desa Buluh Duri dan desa-desa di sepanjang sungai untuk menerima tamu (*hospitality*), maupun kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan arung jeram ini, misalnya dalam hal kesadaran untuk menyediakan fasilitas kamar mandi bagi tamu. Padahal bentuk kerelaan seperti itu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan arung jeram. Pada saat masyarakat berpartisipasi, maka masyarakat juga akan mendapatkan bagian dari 'kue pembangunan' Desa Buluh Duri.

2. Kepemimpinan Kepala Desa Buluh Duri

Seperti yang telah disebutkan diatas, faktor penentu keberhasilan inovasi Desa Buluh Duri adalah faktor kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala Desa Buluh Duri yang bernama Dewi Purba yang menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2007 dan saat ini menjalani periode kedua kepemimpinannya sebagai kepala desa di Desa Buluh Duri (periode 2007-2013 dan periode 2013-2019). Meskipun pada awalnya Dewi Purba tidak memiliki ambisi untuk menjadi kepala desa, namun Dewi Purba merupakan sosok yang dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Desa Buluh Duri karena aktivitasnya berjualan keliling desa. Dengan memanfaatkan pisang-pisang di desa sebelah yang tidak dimanfaatkan dan dianggap sampah, Dewi Purba mengolahnya menjadi sebuah kesempatan untuk menambah penghasilan rumah tangganya. Tidak hanya berhenti di buah pisang, dilanjutkan dengan berjualan jengkol keliling dan juga menjajakan kain panjang dan sprei keliling di Desa Buluh Duri yang modalnya didapatkan dari pinjaman kepada orang tuanya. Berdasarkan hasil *interview*, Dewi Purba mengaku menjadi kepala desa karena tersesat, namun tersesat yang disetujui oleh suami untuk maju menjadi kepala desa melawan seorang pemuka agama (laki-laki). Tidak diduga bahwa dalam Pilkades dengan lawan yang jauh lebih tangguh ternyata Dewi Purba dapat memperoleh suara mayoritas (600 suara versus 300 suara) dari warga Buluh Duri. Dengan berdasarkan hal tersebut, Dewi Purba tidak hanya mendapatkan popularitas tapi juga kepercayaan dari warga Desa Buluh Duri. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa, Dewi Purba mengaku tidak pernah memikirkan keuntungan pribadi tapi keuntungan seluruh warga Desa Buluh Duri. Hal ini juga didukung oleh komitmen dari pasangan hidupnya yang dari awal sadar bahwa menjadi kepala desa artinya mengutamakan waktu, tenaga bahkan harta kekayaan untuk orang lain, yaitu warga Desa Buluh Duri. Selanjutnya, berdasarkan pada *interview* dan observasi maka dapat dianalisa aspek-aspek kepemimpinan Ibu Dewi Purba yaitu sebagai berikut:

a. Pola Seleksi dan Rekrutmen Aparat Desa

Dalam hal seleksi dan rekrutmen aparat desa, Dewi Purba menerapkan berbagai syarat yang dapat dikategorikan sebagai syarat yang sulit. Dewi Purba menentukan syarat bahwa yang dipertimbangkan untuk menjadi staf-staf di kantor kepala desa dan aparat Desa Buluh Duri adalah mereka yang mengerti dan mampu mengoperasikan komputer, harus memiliki gelar sarjana atau paling tidak pernah berkuliah, dan harus memiliki kreatifitas yang tinggi untuk mampu melakukan inovasi yang baik bagi pembangunan desa. Cara ini merupakan cara yang ampuh bagi kinerja pembangunan desa. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang disebutkan oleh Dewi Purba, syarat-syarat untuk menjadi staf di kantor kepala desa dan aparat desa dapat dianggap cukup berat apalagi mengingat bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang baik untuk pulau-pulau di luar Pulau Jawa lebih sulit dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Bahwa Dewi Purba mampu mendapatkan staf dan aparat desa yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut diatas, maka hal ini menjadi sesuatu yang istimewa. Lebih istimewa lagi karena staf di Kantor Kepala Desa Buluh Duri mayoritas adalah perempuan, yang menurut Dewi Purba lebih mudah untuk menerima perintah dan bekerja sama untuk membangun Desa Buluh Duri. Saat ini perangkat desa Buluh Duri berjumlah 12 orang, dengan 3 orang perempuan sebagai staf kepala desa, 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang ada di jabatan KAUR (Kepala Urusan), dan terdapat 11 orang anggota BPD. Walaupun mayoritas penduduk di Desa Buluh Duri adalah muslim, namun di BPD ada perwakilan penduduk yang beragama Kristen.

b. Kemampuan Komunikasi yang Baik

Dewi Purba sebagai Kepala Desa Buluh Duri memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Selama wawancara dan observasi, Dewi Purba mengajak peneliti untuk berkeliling desa. Selama berkeliling desa ini, Dewi Purba menunjukkan bagaimana sebagai kepala desa perempuan mengenali dan hafal hampir setiap warga di desa nya. Dewi Purba mengambil peran sebagai kepala desa yang baik, sebagai ibu dari setiap warga desanya. Bahkan dengan penduduk yang menambang pasir dan batu sungai di Bah Bolon yang tentunya merusak lingkungan pun beliau masih memahami dan mengijinkan dengan pertimbangan menambang adalah satu-satunya penghidupan mereka. Dewi Purba juga dekat dengan pemuda-pemuda desa serta anak-anak desa. Pintu rumah Dewi Purba terbuka setiap saat, 24 jam sehari untuk setiap warga nya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siapapun warga Desa Buluh Duri yang ingin menemuinya. Seringkali warga yang memiliki masalah keluarga ataupun masalah perkawinan memilih untuk menghadap kepada Dewi Purba dan meminta masukan atau solusi atas permasalahan mereka, padahal di Desa Buluh Duri terdapat Kepala Urusan Kekeluargaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang tersebut. Dengan cara seperti ini, Dewi Purba dapat memahami setiap permasalahan yang dialami oleh warga nya dari permasalahan ekonomi seperti akses terhadap program raskin (beras

untuk orang miskin), permasalahan sosial seperti kenakalan remaja ataupun kriminalitas sampai pada permasalahan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga.

c. Kemampuan dalam Hal *Conflict Management*

Selain kemampuan berkomunikasi, Dewi Purba juga memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan perusahaan perkebunan PTPN III. Konflik terutama terkait dengan hal yang telah disampaikan diatas yaitu mengenai penggunaan lahan mengganggu milik PTPN III untuk digunakan sebagai lahan atau tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan Desa Buluh Duri. Dengan mendasarkan pada RPJMDes, Dewi Purba sebagai kepala Desa Buluh Duri berkomunikasi dan berkoordinasi tentang penggunaan lahan. Hal ini lah yang mendasari tidak pernah muncul kesulitan dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan di Desa Buluh Duri dibandingkan dengan wilayah desa-desa yang lainnya. Potensi konflik yang terjadi di Desa Buluh Duri tidak saja hanya konflik penyediaan lahan antara pemerintah desa dengan PTPN III Gunung Pamela, namun juga konflik penggunaan lahan antara PTPN III Gunung Pamela dengan masyarakat petani. Berdasarkan interview, PTPN III Gunung tidak mau menanami tanah atau lahan di posisi rendah (karena tanah rendah ini tidak produktif untuk ditanami oleh PTPN III) seluas hampir 150 hektar. Karena tanah atau lahan ini tidak digunakan oleh PTPN III Gunung Pamela, maka masyarakat petani menanami lahan tersebut untuk penghidupan mereka sendiri. Pada saat dilaksanakan audit atas PTPN III Gunung Pamela, maka akan ditemukan keganjilan bahwa ada luas lahan 150 hektar yang mengganggu namun digunakan oleh masyarakat. PTPN III Gunung Pamela diduga menyewakan lahan tersebut kepada petani padahal tidak ada transaksi sewa menyewa. Sejak temuan audit ini, maka PTPN III melarang masyarakat untuk menanami tanah rendah meskipun tanah tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan oleh PTPN III.

Selain berkomunikasi dan mengelola konflik, Dewi Purba juga memiliki kemampuan bernegosiasi yang sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan beliau untuk mengambil alih pengelolaan tiket retribusi dari Arung Jeram Ancol dari desa tetangga. Dengan alasan bahwa pengelolaan oleh desa tetangga tidak pernah transparan dan tidak pernah menguntungkan Desa Buluh Duri, maka Dewi Purba meminta supaya retribusi sebesar Rp. 2000,- dikelola oleh Buluh Duri. Setelah melalui berbagai diskusi dan negosiasi akhirnya hal tersebut dikabulkan oleh desa tetangga, tanpa muncul konflik yang signifikan. Hal ini sekali lagi membuktikan kemampuan Dewi Purba sebagai kepala desa perempuan.

d. Kepercayaan Masyarakat yang Tinggi

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi maka dapat di simpulkan bahwa faktor kepemimpinan adalah faktor penting dalam keberhasilan pembangunan di Desa Buluh Duri. Desa ini menjadi studi kasus yang menarik sebagai desa yang memiliki praktik baik terutama dalam hal kepemimpinan kepala desa perempuan. Desa Buluh

Duri telah membuktikan berbagai aksioma bahwa peran pemimpin perempuan dalam pembangunan adalah peran yang sangat penting. Di Desa Buluh Duri peran pemimpin perempuan membuktikan menghasilkan prestasi. Dengan menempatkan posisi sebagai kepala desa yang berperan sebagai ibu dari warga Desa Buluh Duri, Dewi Purba mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari warga desanya. Dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi tersebut maka warga desa lebih mudah untuk diajak berpartisipasi ataupun bekerjasama dalam setiap kegiatan-kegiatan pembangunan

Dengan prestasi-prestasi, kinerja dan kemampuan yang dimiliki oleh Dewi Purba tersebut, maka Dewi Purba seringkali dijadikan rujukan atau diundang sebagai nara sumber oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berbagai pengalaman terkait dengan pembangunan desa. Selain itu, dengan kepiawaiannya menjadi kepala Desa Buluh Duri, dan keberhasilan kepemimpinannya, Dewi Purba telah beberapa kali diberikan tawaran oleh berbagai partai politik untuk menjadi anggota legislatif dan maju menjadi anggota DPRD dalam pemilu, namun semuanya ditolak oleh Dewi Purba.

3. Perwiyas (Perwiritan Yasin) sebagai *Local Wisdom (Local Value)*

Salah satu tujuan dari studi tentang desa-desa inovatif di Indonesia ini adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan analisa tentang keberadaan *local wisdom* atau *local value* di desa-desa yang menjadi obyek studi, dan bagaimana *local wisdom* tersebut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan.

Aspek keunggulan Desa Buluh Duri ini menurut tim peneliti adalah terdapatnya '*democratic engagement*' yang melekat pada kepemimpinan Kepala Desa Buluh Duri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Kepala Desa Buluh Duri memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang sangat baik. Untuk menunjang komunikasi dan komitmen keterbukaan dan ketersediaan kepala desa ini, Kepala Desa Buluh Duri memanfaatkan kearifan lokal yang terdapat di desa tersebut. Sama halnya seperti arisan atau perkumpulan pengajian, perwiyas atau Persatuan Wirit Yasin yang melakukan pertemuan setiap hari Kamis ini merupakan kearifan lokal berbentuk perkumpulan informal di bidang keagamaan. Di Desa Buluh Duri dibagi menjadi beberapa 18 Lorong (kelompok) Perwiyas yang mewakili seluruh masyarakat. Dua orang ketua dan wakil dari setiap perwiritan ini akan selalu ikut dalam kegiatan penggalian gagasan untuk menyusun RKPDes dan atau APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Buluh Duri. Selain melalui perwiyas, kepala desa juga melakukan penggalian gagasan langsung kepada masyarakat (versi lain blusukan) yang tidak hanya dilakukan setahun sekali namun 2 sampai dengan 3 kali sebulan. Perwiyas dimanfaatkan sebagai alat menyampaikan informasi dan berkoordinasi antara kepala desa dengan warga desa dan aparat desa, atau antar warga desa itu sendiri. Dengan melalui perwiyas inilah alur komunikasi dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) diwadahi selama 24 jam. Apapun informasi yang perlu disampaikan oleh kepala desa kepada warganya dapat dilakukan melalui perwiyas. Sebaliknya, warga desa juga dapat menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi

kepada kepala desa melalui perwiyas. Melalui perwiyas juga kadang permasalahan dapat diselesaikan diantara warga sendiri.

4. Investasi Perseorangan

Potensi Sungai Bah Bolon dikembangkan sebagai tujuan wisata olah raga arung jeram dengan bantuan pihak ketiga individual. Individu tersebut bernama Bapak Teddy yang mendirikan CV dengan nama Arung Jeram Ancol. Perusahaan ini telah berjalan lama di Desa Buluh Duri, namun baru di masa kepemimpinan Dewi Purba, perusahaan Ancol Arung Jeram benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kas desa dan pembangunan desa.

Perusahaan Ancol Arung Jeram menjalin kerjasama yang baik dengan pihak perangkat desa, maupun dengan masyarakat dalam menyediakan paket wisata arung jeram kepada wisatawan. Secara tidak langsung, Perusahaan Arung Jeram Ancol ini menerapkan *community based tourism*, dimana pelaku dan penerima manfaat dari kegiatan pariwisata adalah masyarakat dimana potensi wisata tersebut berada. Bentuk kerjasama tersebut misalnya:

- a) Melibatkan masyarakat untuk dapat menyewakan truknya sebagai mode transportasi untuk mengangkut turis;
- b) Melibatkan ibu-ibu serta warga lainnya untuk menyediakan katering makanan;
- c) Melibatkan warga sekitar untuk menyediakan toilet dan kamar mandi serta warung sebagai tempat pemberhentian terakhir jalur *rafting*.

Dengan adanya kerjasama ini, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dan mendukung secara langsung kegiatan pembangunan desa.

3.3 Pembangunan Desa Wisata Olahraga Arung Jeram

Arung Jeram Ancol sudah ada sejak sebelum Dewi Purba menjadi kepala desa, namun sebagian besar pengurus dan ketua pengelola adalah warga desa tetangga yaitu Desa Dolok Merawan. Kepengurusan pengelolaan retribusi Arung Jeram Ancol ini difasilitasi oleh Kepala Desa Buluh Duri yang lama dengan perjanjian bahwa setiap dua tahun akan dilakukan revisi atas perjanjian pengelolaan tersebut. Namun sampai Kepala Desa Buluh Duri yang baru terpilih belum ada revisi ataupun pertemuan-pertemuan untuk membahas pertanggungjawaban pengelolaan retribusi Arung Jeram Ancol tersebut. Warga desa meminta Ibu Dewi Purba, sebagai kepala desa baru saat itu, pengelolaan kontribusi PAD Ancol Arung Jeram sebesar Rp. 5.000,-(Rp. 3.000 untuk kabupaten dan Rp. 2.000 untuk desa) dinegosiasiakan untuk dialihkan dari Desa Delok Serdang kepada Desa Buluh Duri. Pengelolaan retribusi kepada kas desa sebesar Rp. 2000,-tersebut dianggap tidak transparan, dan tidak pernah ada proses pertanggungjawaban yang jelas dari pengelola kepada warga Desa Buluh Duri. Warga Desa Buluh Duri juga

berpendapat bahwa Arung Jeram Ancol tersebut selain berada di wilayah Buluh Duri, juga menggunakan akses infrastruktur jalan di Desa Buluh Duri untuk akses masuknya. Selain itu, Sungai Bah Bolon dan segala aktivitas terkait dengan potensi sungai tersebut merupakan satu-satunya potensi ekonomi di Desa Buluh Duri, sehingga pengelolaan sungai tersebut tentunya akan membawa perbaikan bagi masyarakat Desa Buluh Duri. Dengan tiga pertimbangan tersebut, maka Dewi Purba sebagai kepala desa yang baru menggunakan kemampuannya untuk bernegosiasi dan mengambil alih pengelolaan retribusi Arung Jeram Ancol tersebut. Saat ini pengelolaan Arung Jeram Ancol berada di Desa Buluh Duri dengan diketuai oleh salah satu warga Desa Buluh Duri.

Berdasarkan wawancara, tidak ada konflik yang berarti antara Desa Buluh Duri dengan Desa Dolok Merawan dari proses pengambilalihan ini. Namun dengan pengelolaan retribusi sekarang ada di Desa Buluh Duri, maka rencana-rencana pembangunan menjadi lebih jelas. Setiap kegiatan yang akan diadakan di Desa Buluh Duri terkait dengan Arung Jeram Ancol kemudian dapat diagendakan dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes).

Selain Arung Jeram Ancol, terdapat juga wilayah desa yang menjadi tujuan wisata namun dikelola oleh swasta individu yang lain bernama Batu Nongol. Aktivitas wisata yang ada di Batu Nongol ini tidak memberikan kontribusi sama sekali ke Desa Buluh Duri karena merasa sudah memberikan retribusi sebesar Rp. 5.000,- kepada Kabupaten Deli Serdang. Namun Dewi Purba memilih untuk tidak melakukan langkah apapun terkait dengan Batu Nongol ini dengan pertimbangan langkah-langkah yang harus dilakukan harus pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan untuk mengamankan juga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Saat penelitian ini dilakukan, Desa Buluh Duri sedang melakukan pembangunan untuk titik sungai yang lain yang diberi nama Buluh Duri Indah. Pembangunan sampai pada tahap membangun infrastruktur untuk mempermudah pengunjung seperti mushola dan kamar mandi/ WC supaya juga tidak mengganggu ekosistem sungai, karena telah sangat disadari bahwa sungai Bah Bolon ini adalah satu-satunya potensi yang dimiliki oleh Desa Buluh Duri.

Saat ini Desa Buluh Duri sudah memulai untuk membentuk BUMDes dengan musyawarah desa berdasarkan SK kepala desa, setiap kepala dusun mengusulkan dua calon (saat ini pembentukannya sampai pada tahap pertimbangan Badan Pertimbangan Desa; sementara direktur, AD/ART, dan peraturan desa telah dibuat menunggu untuk mendapat persetujuan DPD). Dengan BUMDes inilah maka partisipasi dan aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan ekonomi sosial desa akan ditampung, difasilitasi dan dilaksanakan. Salah satu yang sudah dilakukan adalah partisipasi dan aspirasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan menyediakan fasilitas untuk wisatawan arung jeram (makan, *snack*, kamar mandi, mushola, tempat parkir, dan truk).

Dengan demikian BUMDes yang baru saja dibentuk ditujukan untuk mengelola beberapa unit usaha, yaitu:

Pariwisata yaitu Pengelolaan Ancol Arung Jeram dan Pengelolaan Buluh Duri Indah
Pengelolaan air bersih dan infrastruktur penyedia air bersih (sumur, pipanisasi, meteran air, *water tower*)
UKM (penjualan risol beku)

3.4 Dampak Inovasi Desa Buluh Duri sebagai Desa Wisata Olahraga

Dengan adanya inovasi pembangunan Desa Buluh Duri berupa wisata Arung Jeram Ancol, maka hal ini dapat berpengaruh dalam beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Keberadaan Arung Jeram Ancol berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa yang pada akhirnya akan juga berdampak terhadap peningkatan pembiayaan pembangunan di Desa Buluh Duri. Selain itu, dengan adanya aktivitas arung jeram maka terdapat lapangan pekerjaan bagi para pemuda-peumdi Desa Buluh Duri yaitu sebagai *Skipper* atau *waterguard* dalam aktivitas mengarungi sungai Bah Bolon. Sebagai *skipper*, para pemuda dan pemudi Desa Buluh Duri menerima upah sebesar Rp.100.000 untuk sekali mengarung. Hal yang penting untuk dicatat berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan ini adalah komitmen dari perusahaan milik Teddy untuk tidak mempekerjakan orang dari luar Desa Buluh Duri. Hal ini menjadi catatan positif untuk kepala Desa Buluh Duri bagi perusahaan Arung Jeram Ancol ini.

Selain sebagai *skipper*, perusahaan Arung Jeram Ancol milik Teddy juga melibatkan sumber daya yang ada di desa. Untuk setiap menu makan siang dan *snack* bagi para wisatawan yang hendak berarung jeram, maka Arung Jeram Ancol meminta masyarakat yang bersedia untuk memasak makanan untuk makan siang dan *snack* bagi para wisatawan. Dengan demikian, terdapat warga masyarakat Desa Buluh Duri yang melakukan aktivitas ekonomi dan mendapatkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota BPD, terdapat paling sedikit 20 rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan arung jeram ini. Sehingga, ada dampak pengurangan kemiskinan walaupun belum dapat dikatakan secara signifikan.

b. Aspek Sosial (Penguatan identitas Desa)

Dalam hal aspek sosial, inovasi yang dilaksanakan oleh Desa Buluh Duri dapat meningkatkan penguatan identitas Desa Buluh Duri terutama dari aspek prestasi olahraga. Dengan dibangunnya Arung Jeram Ancol di Desa Buluh Duri dapat menumbuhkan

bibit-bibit atlet nasional di bidang arung jeram. Selain sebagai *skipper*, beberapa pemuda dan pemudi di Desa Buluh Duri juga dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk berlatih olah raga arung jeram. Bupati Serdang Bedagai Bapak Sukirman sebagai ketua federasi arung jeram wilayah Sumatera Utara mendorong perusahaan milik Teddy bernama Arung Jeram Ancol ini untuk mendidik anak-anak remaja di Desa Buluh Duri untuk berlatih arung jeram. Hasilnya, para pemuda dan pemudi tersebut dapat menjadi wakil dari kabupaten Serdang Bedagai untuk berlaga di arena PON 2016 dan mendapatkan medali perak dan perunggu. Tahun 2018 diharapkan atlet-atlet muda dari Desa Buluh Duri dapat berlaga di tingkat internasional.

Selain melalui prestasi olah raga, walaupun Arung Jeram Ancol sudah terkenal sejak lama, namun dengan investasi yang dilakukan desa (dengan menggunakan dana desa) untuk turut membangun Arung Jeram Ancol berpengaruh terhadap penguatan identitas Desa Buluh Duri sebagai desa wisata olah raga.

Selain itu, dengan adanya keberadaan Arung Jeram Ancol, secara tidak langsung dan pelan-pelan dapat merubah *mindset* atau perubahan perilaku hidup masyarakat (terutama perilaku hidup sehat). Misalnya, karena jalur sungai sering dilalui oleh turis yang melakukan *rafting*, maka masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas MCK (terutama BAB) dan membuang sampah sembarangan di sungai.

c. Aspek Pembangunan Infrastruktur

Selain itu, perusahaan Arung Jeram Ancol juga membuka kesempatan bagi para warga masyarakat Desa Buluh Duri yang rumahnya tidak jauh dari *base camp* arung jeram dan yang memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur seperti kamar mandi untuk keperluan mandi dan berganti baju kepada para wisatawan ataupun kedai-kedai minuman bagi wisatawan untuk beristirahat. Dengan demikian secara tidak langsung terjadi percepatan perbaikan fasilitas MCK di Desa Buluh Duri.

Selain MCK, dengan adanya Arung Jeram Ancol, di Desa Buluh Duri terdapat kemajuan dalam hal pembangunan infrastruktur yang lain seperti jalan dan lahan parkir di sekitar *base camp*. Walaupun keberadaan Arung Jeram Ancol ini meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, namun karena sifatnya yang belum merata di seluruh wilayah Desa Buluh Duri, maka perlu diwaspadai kemungkinan timbulnya potensi konflik antar warga di masa akan datang apabila tidak dikelola dengan baik.

3.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisa diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Desa Buluh Duri dengan karakteristiknya sebagai desa perkebunan BUMN dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki dapat dianggap sebagai desa yang memiliki praktik baik (*good practice*) dan pembelajaran bagi desa-desa lainnya di Indonesia. Sebagai desa

yang memiliki praktik baik, Desa Buluh Duri juga menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yaitu:

- a. Pengelolaan daerah aliran sungai yang masih belum didukung dengan payung hukum atau kebijakan yang jelas
- b. Terdapat potensi konflik tentang status kepemilikan lahan dimana *base camp* didirikan. *Base camp* tersebut berada di lahan yang berada di desa yang lain bukan wilayah Desa Buluh Duri. Walaupun berdasarkan informasi dari kepala Desa Buluh Duri, pihak desa seberang tidak memperdulikan lahan tersebut, namun di masa mendatang hal tersebut dapat menjadi potensi konflik, apalagi dengan potensi arung jeram ini untuk berkembang di tingkat internasional di masa yang akan datang.
- c. Berdasarkan hasil observasi, tim peneliti memberikan masukan untuk perbaikan Arung Jeram Ancol. Perbaikan tersebut misalnya yaitu memotong rute arung jeram menjadi lebih pendek, sehingga waktu tempuh tidak terlalu panjang. Hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya jumlah jam kerja para skipper dari 1 kali dalam satu hari menjadi lebih dari sekali dalam satu hari, sehingga menambah pendapatan mereka. Hal ini tentunya akan meningkatkan produktifitas dari para skipper. Hal ini dapat terlaksana, apabila didukung dengan menambah beberapa *base camp* di desa lain dan infrastruktur pendukung lainnya.
- d. Dengan mempertimbangkan potensi banjir yang disebabkan oleh penyempitan jalur sungai karena adanya aktivitas reklamasi sungai untuk jalan truk-truk penambang pasir, maka desa ini juga perlu untuk membangun *early warning system* untuk bencana banjir di sungai Bah Bolon. Hal ini juga untuk menjamin tercapaiannya standar keamanan dari kegiatan wisata olahraga arung jeram. Hal ini akan dapat terealisasi dengan melibatkan pihak lain (swasta korporasi atau individu) yang kompeten dalam hal tersebut.

Beberapa hal yang penting untuk dicatat mengenai Desa Buluh Duri adalah:

Ketika desa tidak memiliki sumber pendapatan asli desa apapun, maka potensi alam yang dimiliki oleh desa harus diperjuangkan untuk dikelola sendiri oleh desa untuk kemanfaatan seluruh warga desa. Desa Buluh Duri tidak memiliki potensi yang banyak, yang dimiliki satu- satunya adalah potensi alam berupa Sungai Bah Bolon sepanjang 16 km yang dapat digunakan sebagai tujuan wisata arung jeram

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan guna mengelola potensi desa maka diperlukan kepemimpinan yang sangat baik oleh kepala desa. Desa Buluh Duri cukup beruntung karena mendapatkan kepala desa perempuan yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, dikenal dan mengenal semua warga

masyarakat, aktif, kreatif dan memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi serta manajemen konflik yang sangat baik.

- Guna mengelola potensi yang dimiliki desa memerlukan peran aktif dan investasi strategis dari pihak ketiga (swasta) baik individu maupun korporasi. Perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa dengan berfokus pada pemberdayaan desa. Konsep *Community Based Tourism* dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam kondisi desa yang seperti itu. Dalam kasus Desa Buluh Duri, terdapat perusahaan bernama Arung Jeram Ancol yang memiliki komitmen dan motivasi yang kuat dari pihak swasta untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pembangunan Desa Buluh Duri.

Dengan uraian kesimpulan yang seperti diatas, maka tim peneliti dapat merekomendasikan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menjamin keberlanjutan dari inovasi Desa Buluh Duri sebagai desa wisata olah raga.

- a. Berhati-hati dan lebih selektif dalam menerima tawaran kerjasama untuk membangun desa dengan lembaga yang mengatasnamakan kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah resmi lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi Purba sebagai kepala Desa Buluh Duri, desa ini pernah dihubungi oleh PSDI (Pusat Studi Desa Indonesia) yang mengaku bekerja bersama dengan KEMENDES untuk mengadakan kegiatan lomba foto desa wisata dan lintas alam dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat Desa Buluh Duri sebagai desa tujuan wisata olah raga arung jeram sehingga berdampak pada pembangunan desa. Namun dari kegiatan tersebut, Desa Buluh Duri justru merasa di eksploitasi karena dana-dana untuk penyelenggaraan kegiatan diambil dari kas desa, bahkan untuk memberikan hadiah kepada pemenang juga dari kas desa, padahal kegiatan ini adalah inisiatif dari PSDI dan dampaknya kepada pendapatan desa pun justru negatif.

- b. Mengembangkan inisiasi kerjasama antar desa untuk membentuk desa kawasan

Dengan adanya dua potensi perusak ekosistem sungai Bah Bolon yaitu penambangan galian C yang skalanya makin besar, menggunakan alat-alat berat dan tidak berijin dan didirikannya perusahaan pengolahan kelapa sawit tepat dipinggir sungai Bah Bolon maka perlu segera dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi ekosistem sungai misalnya dengan cara mengajak kerjasama seluruh desa-desa disepanjang sungai Bah Bolon untuk mengembangkan desa kawasan untuk pembangunan desa berbasis potensi sungai dan melakukan langkah-langkah untuk sertifikasi sungai Bah Bolon dan kawasan ancil.

- c. Menjamin keberlanjutan inovasi desa dengan kebijakan dan kelembagaan serta kerjasama CSR dengan BUMN PTPN III Gunung Pamela

Dengan mempertimbangkan bahwa tampaknya faktor kepemimpinan kepala desa perempuan (Dewi Purba) adalah faktor yang paling signifikan dalam inovasi di Desa Buluh Duri ini, maka tim peneliti merekomendasikan supaya kepala desa saat ini bersama dengan Dewan Pertimbangan Desa mulai membahas kebijakan-kebijakan desa atau membentuk peraturan-peraturan desa yang dapat dijadikan payung hukum setiap aktivitas berkaitan dengan olahraga wisata di Ancol sehingga di masa depan lebih dapat terjamin. Selain itu, kegiatan olahraga wisata di Ancol ini harus dilembagakan. Dengan demikian tim peneliti mendukung langkah awal desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buluh Duri. Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh desa adalah dengan melakukan kerjasama CSR dengan BUMN PTPN III Gunung Pamela mungkin dalam bidang pelatihan warga desa untuk menghasilkan produk-produk untuk memanfaatkan potensi desa sampai dengan pemasaran produk tersebut, termasuk untuk pengelolaan Arung Jeram Ancol maupun Buluh Duri Indah.

- d. Mengembangkan produk alternatif dari potensi sungai selain arung jeram

Sebagaimana sebuah produk, maka Desa Buluh Duri harus memikirkan alternatif produk sungai selain arung jeram. Dan dengan mempertimbangkan bahwa nama Arung Jeram Ancol sudah terkenal, dan juga untuk mewujudkan impian menjadi Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kiblat arung jeram di Sumatera, maka diperlukan upaya misalnya pendirian sekolah *skipper/ water guard* terbaik di Sumatera, atau pusat pelatihan olah raga arung jeram untuk wilayah Sumatera Utara atau menjadi tempat praktik atau laboratorium mata kuliah olahraga rekreasi dari mahasiswa mahasiswa yang berkuliah di Universitas Medan (UniMed).

Trend pembangunan di desa-desa di Indonesia saat ini adalah pembentukan desa wisata sebagai sarana pembangunan desa. Walaupun seringkali terdapat semacam tekanan dari pemerintah tingkat kecamatan atau kabupaten di setiap desa untuk membentuk desa wisata, karena dengan mengklaim membentuk desa wisata maka pemerintah kabupaten lebih mudah mendapatkan pendanaan dari APBD dalam bentuk dana desa. Dengan mempertimbangkan praktik baik yang ada di Desa Buluh Duri maka tim peneliti merekomendasikan bagi desa-desa yang lain yang ingin membentuk desa wisata sebaiknya tidak harus terlalu terburu-buru untuk mengklaim desanya sebagai desa wisata tanpa ada potensi wisata yang jelas. Desa Buluh Duri tidak mengklaim desanya sebagai desa wisata, dan istilah desa wisata tidak pernah menjadi wacana pembangunan di Desa Buluh Duri. Namun Desa Buluh Duri telah berhasil mendatangkan banyak wisatawan ke desanya dengan demikian terdapat aliran uang yang masuk ke kas desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa.

Pelajaran yang dapat diambil oleh desa lain adalah untuk memikirkan cara dan usaha terbaik untuk mendorong minat para wisatawan untuk datang ke desa mereka, seperti apa yang dilakukan oleh Desa Buluh Duri ini.



Gambar 3.1
Penambangan Pasir dan
Batu Kali di Sungai Bah
Bolon di Dekat Titik
Buluh Duri Indah



Gambar 3.2
Aktivitas Arung Jeram di
Sungai Bah Bolon



Gambar 3.3
Base Camp Ancol Arung
Jeram yang Dikelola
Bapak Teddy



Gambar 3.4
Rute Arung Jeram



Gambar 3.5
Rute Arung Jeram

IV

DINAMIKA INOVASI PEMBANGUNAN DESA: PEMBELAJARAN DARI DESA MALLARI

Kristian W. Wicaksono

4.1 Pengantar: Profil Dan Potensi Pembangunan Desa

Mallari adalah sebuah desa di pesisir Kabupaten Bone. Desa ini merupakan salah satu dari tujuh belas desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Wilayah Desa Mallari terbagi menjadi tiga wilayah dusun dan dua belas Rukun Warga dengan jumlah kepala keluarga yaitu 669 KK dan penduduk sekitar 2.813 jiwa. Luas wilayah Desa Mallari sekitar 800 Ha, terdiri dari lahan pertanian/perkebunan, perikanan, perniagaan dan pemukiman penduduk. Daerah ini merupakan golongan daerah dataran rendah yang beberapa wilayahnya berbatasan dengan sungai. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah utara berbatasan dengan Desa Cenrana, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kading dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Maccope.

Desa Mallari dapat dikatakan sebagai desa yang cukup terpencil. Untuk mencapai desa tersebut diperlukan waktu sekitar lima jam perjalanan darat dari kota Makassar. Sebagai desa pesisir, mayoritas penduduk Mallari bekerja sebagai petani dan nelayan. Salah satu potensi yang diharapkan dapat menunjang percepatan pembangunan Mallari adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bone dapat dilakukan pada 3 dimensi wilayah sebagai berikut :

1. Dimensi Perairan Laut Dalam

Melalui dimensi ini kegiatan pembangunan Mallari dapat diarahkan pada pengembangan usaha penangkapan ikan yang bernilai ekonomis tinggi khususnya ikan tuna, cakalang, layang, tongkol dan tenggiri.



Gambar 4.1
Rumput Laut, Salah Satu
Komoditas Hasil Laut
Unggulan Desa Mallari

2. Dimensi Perairan Pantai/ Pesisir

Kegiatan pembangunan pada dimensi ini dapat diarahkan pada pengembangan usaha budi daya tambak dengan komoditi andalan berupa udang windu, bandeng, kepiting bakau, rumput laut *Gracillaria sp* dan rumput laut *Euचेuma cottonii*. Selain itu pengembangan budi daya ikan laut berupa budidaya ikan karang dan teripang juga sangat potensial dilakukan di Desa Mallari.

3. Dimensi Perairan Darat

Dimensi perairan darat dapat dikembangkan dengan revitalisasi usaha budi daya ikan di kolam, sawah (mina padi) dan perairan umum. Berbagai jenis ikan sangat berpotensi untuk dibudidayakan di perairan darat Mallari seperti ikan mas, nila, lele dan udang galah.

Sebelum tahun 1800, Desa Mallari berada di bawah kepemimpinan Arung, yang lambat laun berubah status menjadi Mado. Seiring perjalanan waktu, istilah Mado kemudian berubah menjadi desa sejak 1957. Hingga 1966 dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa. Saat ini Desa Mallari dipimpin seorang kepala desa perempuan yaitu Andi Wahyuli, S. Pd.

Fenomena tersebut menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Di bawah kepemimpinan Andi Wahyuli sebagai kepala desa perempuan, Desa Mallari menjadi desa yang terkenal dengan berbagai bentuk inovasi khususnya proses pembangunan yang sangat inklusif. Inovasi tersebut muncul karena tingkat disabilitas Desa Mallari yang cukup tinggi. Rata-rata di setiap dusun terdapat minimal 15 jiwa penduduk difabel. Secara spesifik, pembangunan yang inklusif dapat diketahui dari proses pembangunan Desa Mallari yang *Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel*. Inovasi tersebut merupakan misi besar pembangunan Desa Mallari yaitu melaksanakan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas kelembagaan, kualitas pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana agama, olahraga, pertanian, perkebunan dan peternakan. Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat serta program dan kegiatan indikatif sangat difokuskan pada kaum disabilitas. Berbagai usaha pembangunan di Desa Mallari didasarkan pada penerapan nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, demokrasi, profesionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pemanfaatan potensi desa berupa sumberdaya perikanan dan kelautan telah dilaksanakan dengan cukup optimal. Fenomena ini terbukti dari produksi pertanian dan perikanan laut Mallari yang telah menjadi sumber konsumsi desa-desa dan kabupaten lain. Meskipun demikian komoditas pertanian dan perikanan Mallari masih berbentuk bahan mentah seperti berbagai jenis ikan dan rumput laut.

Inovasi berupa proses pembangunan *Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel* ternyata masih belum berdampak positif pada aspek pembangunan dasar khususnya di bidang pendidikan. Berdasarkan rekapitulasi penduduk pada data dasar keluarga tahun 2015, tingkat pendidikan masyarakat desa pada lulusan tingkat SD sebesar 299 jiwa, lulusan tingkat SMP 159 jiwa dan lulusan SMA 163 jiwa. Hanya 67 jiwa yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Diploma atau Sarjana dan sisanya tidak mengenyam pendidikan formal. Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat inovasi pembangunan yang inklusif, Mallari masih mengalami permasalahan pembangunan pendidikan.

Berdasarkan temuan inovasi dan eksistensi permasalahan pembangunan maka tulisan ini akan diarahkan untuk mengetahui dinamika inovasi proses pembangunan inklusif di Desa Mallari yang meliputi bentuk, proses, dampak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembahasan mengenai dinamika inovasi juga akan dilakukan pada berbagai inovasi pembangunan lainnya yang ada di Desa Mallari. Pada akhir tulisan akan disajikan pembelajaran berupa kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis inovasi pembangunan. Rekomendasi tidak hanya dirumuskan bagi desa lain berdasarkan praktik baik inovasi Desa Mallari namun juga bagi Mallari sendiri untuk mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang ada.

Pembelajaran mengenai inovasi pembangunan di Mallari diharapkan dapat digunakan desa-desa lain di Indonesia sebagai salah satu acuan dalam mewujudkan inovasi pembangunan desa. Harapan tersebut menjadi perhatian penting karena saat ini seluruh desa dihadapkan pada sumber daya pembangunan yang sangat berlimpah terutama pembiayaan pembangunan. Pembiayaan yang saat ini terfokus pada pembangunan di tingkat desa perlu diiringi dengan inovasi agar dapat dialokasikan lokasikan secara efektif dan efisien.

4.2 Bentuk-bentuk Inovasi Desa

Berdasarkan langkah penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan mengenai berbagai bentuk inovasi di Desa Mallari. Desa Mallari dapat dikatakan sebagai desa inovatif karena inovasi yang dihasilkan terletak pada berbagai sektor pembangunan. Inovasi di Desa Mallari dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Proses Pembangunan *Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel*

Berbeda dengan sebagian besar perencanaan pembangunan di berbagai daerah, Desa Mallari memiliki program-program pembangunan yang berorientasi pada kelompok masyarakat perempuan, masyarakat miskin dan difabel. Fokus pada pembangunan yang inklusif tersebut mewarnai seluruh proses pembangunan di Desa Mallari. Perencanaan, pelaksanaan dan orientasi substansi pembangunan Mallari selalu bersifat inklusif.

Sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan, masing-masing kelompok inklusif melakukan musyawarah untuk menentukan isu-isu pembangunan yang terkait langsung dengan kehidupan mereka. Setelah proses musyawarah tersebut dilaksanakan, kelompok inklusif juga tidak segan-segan menyampaikan aspirasi dalam proses Musrenbangdes.

Berdasarkan proses tersebut, hasil Musrenbangdes di Desa Mallari selalu berwawasan inklusivitas. Pembangunan tidak hanya diarahkan bagi kelompok mayoritas namun juga diselenggarakan dengan asas peduli terhadap kelompok minoritas. Kelompok yang mungkin terpinggirkan di desa-desa lain justru menjadi kelompok yang berpartisipasi aktif dalam merumuskan rencana pembangunan di Desa Mallari.

4.2.2 Program Stop SBS (Buang Air Besar Sembarangan) atau *Open Defecation Free (ODF)*

Program SBS atau ODF sebenarnya bukan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Program ini adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program tersebut Pemerintah Desa Mallari mampu berinovasi dan mendorong keberhasilan program secara optimal.

Open *Defecation Free* (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak memiliki perilaku buang air besar sembarangan. Perilaku BAB sembarangan dan tidak sesuai dengan standar kesehatan sangat berpotensi menimbulkan penyebaran berbagai jenis penyakit. Untuk menekan penyebaran penyakit yang berasal dari budaya BAB sembarangan, pemerintah Desa Mallari menurunkan program ODF sebagai bagian dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kedalam program jamban

keluarga. Program ini memiliki misi bahwa setiap keluarga harus memiliki jamban permanen tersendiri dengan standar kesehatan yang jelas.

Jamban keluarga dianggap sebagai sebagai sebuah solusi dan turunan program pemerintah pusat yang logis karena budaya masyarakat Mallari yang masih kurang memiliki perhatian terhadap budaya hidup sehat. Sebelum Program Jamban Keluarga dilaksanakan, sebagian besar masyarakat Desa Mallari masih memiliki budaya BAB sembarangan. Kebun, tanah lapang, sungai dan lahan terbuka di Mallari seringkali dijadikan tempat BAB oleh masyarakat desa.

Sebagai sebuah bentuk inovasi desa, Program Jamban Keluarga dilandasi dengan semangat partisipasi dan berbasis pada upaya penyadaran pola pikir masyarakat. Program tersebut selanjutnya menghasilkan keluaran berupa jamban keluarga yang dimiliki oleh 100% Kepala Keluarga di Mallari. Berdasarkan prestasi tersebut, Desa Mallari kemudian mendeklarasikan diri sebagai desa ODF. Selain itu Mallari juga mendeklarasikan diri sebagai desa yang bergerak menuju lima pilar desa STBM yaitu stop SBS, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pengelolaan air minum di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

4.2.3 Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Bawang Merah

Desa Mallari memiliki potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah. Potensi tersebut sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Selain potensi hasil laut yang besar, potensi lain yang belum dioptimalkan di Desa Mallari adalah lahan perkebunan subur yang cukup luas. Oleh karena itu, pada 2014 digalakkan program pemanfaatan lahan kosong untuk perkebunan bawang merah.

Program ini merupakan program dampingan dari Yayasan Hadji Kalla. Yayasan Hadji Kalla meluncurkan program pemberdayaan ekonomi sektor pertanian dengan konsep *one village one product* di Kecamatan Awangpone. Mallari menjadi satu desa yang difokuskan untuk menghasilkan bawang merah dengan langkah pemanfaatan lahan kosong.

Selain diselenggarakan untuk meningkatkan perekonomian desa, program ini diarahkan untuk menghasilkan ketahanan pangan di level kecamatan. Ketika masing-masing desa memiliki komoditas pangan yang khas maka akan terjadi transaksi bahan pangan yang berakhir pada terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat lokal. Apabila kebutuhan lokal telah terpenuhi, masing-masing desa juga dapat memasarkan komoditas yang dimiliki ke kecamatan atau daerah-daerah lain.

4.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Desa

Inovasi di Desa Mallari sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan proses penelitian di lapangan dan hasil analisis tim peneliti, faktor pendukung inovasi di Desa Mallari dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Kearifan Lokal Masyarakat

Sebagai sebuah desa yang cukup terpencil, Desa Mallari masih memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang cukup terjaga dengan baik. Salah satu fenomena yang menggambarkan nilai kearifan lokal masyarakat adalah struktur bangunan rumah yang masih berbentuk rumah panggung. Ketika desa maupun daerah lain telah mulai mengubah desain rumahnya menjadi lebih modern, Desa Mallari masih melestarikan desain rumah tradisional yang diturunkan secara turun temurun.

Secara lebih jelas, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan inovasi desa. Terdapat dua nilai kearifan lokal yang berpengaruh terhadap inovasi Desa Mallari yaitu budaya *sirik* dan budaya malu. Budaya *sirik* adalah nilai budaya kepedulian. Ketika terdapat sesama yang sedang membutuhkan bantuan, setiap individu seharusnya peduli dan turut membantu meringankan pekerjaan. Nilai budaya ini adalah dasar dari nilai gotong-royong yang dimiliki masyarakat Mallari. Budaya malu adalah nilai budaya yang mengharuskan setiap individu berubah menjadi lebih baik. Ketika terdapat sesama yang memberi contoh kebaikan, setiap individu seharusnya terbuka dan turut mengubah dirinya.

Budaya *sirik* dan budaya malu sangat teraktualisasi dalam program SBS atau ODF. Budaya ini dimulai dari kepedulian kepala desa terhadap perilaku hidup sehat masyarakatnya dengan ajakan untuk membuat jamban keluarga. Ketika beberapa keluarga telah membuat jamban dan merasakan manfaat dari program tersebut, mereka kemudian memiliki kepedulian untuk mengajak masyarakat lainnya membangun jamban keluarga. Budaya *sirik* ini kemudian disambut dengan budaya malu yang dimiliki oleh masyarakat. Berubah untuk menjadi lebih baik dengan kepemilikan jamban keluarga selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh keluarga di Mallari. Secara bertahap, budaya *sirik* dan budaya malu mampu menghasilkan capaian berupa 100% jamban keluarga di Desa Mallari.

4.3.2 Politik Dinasti

Politik dinasti sebenarnya merupakan bagian dari nilai kearifan lokal Desa Mallari. Meskipun demikian, posisi politik dinasti terhadap inovasi desa dijelaskan dalam sub bahasan tersendiri karena faktor tersebut sangat mempengaruhi seluruh program dan bentuk inovasi di Desa Mallari.

Di era yang telah sangat demokratis, fenomena politik dinasti masih berlangsung di Desa Mallari. Kepala desa atau *Mado* dipilih berdasarkan silsilah keluarga kaum kerajaan atau bangsawan. Meskipun mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara pemilu, masyarakat selalu memilih kepala desa berdasarkan garis keturunan bangsawan. Fenomena menarik yang ditemukan peneliti adalah digunakannya calon kepala desa "bayangan" untuk melancarkan pencalonan kepala desa dari golongan bangsawan. Calon kepala desa "bayangan" hanya digunakan sebagai persyaratan agar pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan.

Keberlanjutan politik dinasti di Mallari dimulai dari kepemimpinan Haji Mandje pada tahun 1966. Setelah kepemimpinan Haji Mandje berakhir, jabatan kepala desa beralih ke anaknya, Abul Khaeri, SE. Karena aturan tentang batas periode kepemimpinan kepala desa, jabatan kepala desa selanjutnya beralih ke sang istri, Andi Wahyuli S.Pd. berdasarkan riwayat kepemimpinan tersebut, dapat dipahami bahwa politik dinasti masih menjadi dasar utama penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mallari. Nama 'Andi' juga semakin menegaskan patrimonialistik di desa karena nama tersebut merupakan gelar yang melekat pada golongan bangsawan di Sulawesi.

Apabila diposisikan sebagai sesuatu yang negatif, politik dinasti merupakan suatu bentuk dominasi kekuasaan yang berlangsung dalam sebuah sistem politik. Dominasi kekuasaan yang terlalu besar kemudian berpotensi menimbulkan budaya koruptif dan non-patisipatif. Meskipun demikian, politik dinasti justru menjadi faktor penting dalam mendukung kemunculan berbagai bentuk inovasi di Desa Mallari.

Kualitas personal karena gelar bangsawan yang dimiliki kepala desa menjadi pendorong kepatuhan dan kerelaan masyarakat. Berbagai bentuk pemikiran kreatif yang muncul dari kepala desa tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat desa. Masyarakat Desa Mallari memiliki pemahaman bahwa kelas bangsawan merupakan kelas yang berhak menentukan seluruh agenda maupun aktivitas pembangunan di desa. Mereka beranggapan bahwa kaum bangsawan tidak akan membawa perubahan ke arah yang tidak dikehendaki.

Politik dinasti dan kepatuhan masyarakat Mallari semakin berlanjut karena selama ini kepala desa yang berasal dari golongan bangsawan selalu menjalankan amanat pembangunan secara efektif. Politik dinasti justru mampu mendorong partisipasi dan kepedulian masyarakat desa terhadap aktivitas pembangunan. Budaya yang berpusat pada bangsawan mendorong masyarakat desa menaruh perhatian dan kepedulian pada rencana dan pelaksanaan pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah desa.

4.3.3 Kepemimpinan Kepala Desa

Meskipun pemimpin di Desa Mallari terpilih karena politik dinasti dan gelar kebangsawannya, Kepala Desa Andi Wahyuli memiliki kepemimpinan yang visioner.

Secara berkelanjutan, Andi Wahyuli selalu melakukan akomodasi aspirasi masyarakat dalam berbagai kesempatan. Sebagai kepala desa, Andi Wahyuli seringkali mendatangi rumah-rumah warga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kehidupan masyarakat.

Andi Wahyuli menyebut langkah tersebut sebagai politik silaturahmi dan *blusukan*. Seorang pemimpin sudah seharusnya memahami kondisi dan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, seorang pemimpin juga perlu membangun relasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif. Andi Wahyuli mengutip peribahasa lokal bahwa silaturahmi bisa memperlancar rejeki, memperbanyak kawan, menjaga kesehatan serta umur panjang. Silaturahmi adalah konsep ketimuran dan tentu saja aplikasinya di lapangan sangat cocok dengan kondisi dan situasi bangsa Indonesia termasuk sangat cocok diterapkan kawasan pedesaan.

Selain karakteristik kepemimpinan yang terbuka dan visioner, kepemimpinan yang sangat berorientasi pada isu-isu inklusif juga tampak pada Andi Wahyuli. Ketika melakukan silaturahmi dan *blusukan*, Andi Wahyuli selalu mendahulukan golongan masyarakat miskin dan difabel. Fenomena ini disampaikan oleh salah satu warga desa yang pernah menderita penyakit tertentu. Ketika dia tidak memiliki biaya untuk berobat, Andi Wahyuli tiba-tiba datang dan memfasilitasi dirinya untuk berobat ke kota.

Secara lebih spesifik, orientasi Andi Wahyuli pada kelompok inklusif tampak pada fokus perhatian pada bidang pembangunan perempuan dan difabel. Ibu rumah tangga dan difabel yang ada di Desa Mallari telah memiliki unit usaha yang bergerak di



Gambar 4.2
Andi Wahyuli, Kepala
Desa Perempuan yang
Muncul dari Politik
Dinasti Desa Mallari

bidang kerajinan. Secara aktif, Andi Wahyuli memfasilitasi pelatihan, permodalan dan pemasaran produk kerajinan agar masyarakat difabel di Mallari lebih berdaya.

Andi Wahyuli merupakan kepala desa perempuan pertama di Desa Mallari. Fenomena ini kemudian menjelaskan bahwa saat kepemimpinan Andi Wahyuli, isu perempuan dan difabel mulai menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Temuan tersebut menjelaskan sebuah pembelajaran bahwa kesetaraan gender dalam kepemimpinan desa dapat berasal dari mekanisme politik dinasti yang masih lestari. Seringkali terdapat pandangan bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan lokal selalu berbenturan dengan nilai budaya. Demokrasi selalu diposisikan sebagai lawan dari nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan Andi Wahyuli sebagai kepala Desa Mallari menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan ternyata muncul dari nilai kearifan lokal berupa politik dinasti.

4.3.4 Peran Aktor Luar Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran aktor luar desa menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kemunculan inovasi desa. Setidaknya terdapat dua aktor utama dari luar desa yang berperan mendorong perubahan di Desa Mallari yaitu Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kabupaten Bone dan Yayasan Hadji Kalla. LPP merupakan lembaga nirlaba di tingkat Kabupaten yang terdaftar di Departemen Sosial sedangkan Yayasan Hadji Kalla merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki fokus pada usaha pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan LPP di Desa Mallari tidak lepas dari upaya Andi Wahyuli memfasilitasi kaum inklusif di desanya. Secara khusus peran LPP Kabupaten Bone tampak pada pendampingan kaum perempuan dan difabel. LPP memberikan pendampingan berupa pelatihan demokrasi dan peatihan keterampilan. Pelatihan demokrasi diberikan dengan pendampingan *public speaking* serta simulasi penyampaian aspirasi. Melalui langkah ini, kaum perempuan dan difabel di Desa Mallari tidak lagi enggan atau bahkan malu untuk menyampaikan aspirasinya dalam setiap kesempatan musyawarah pembangunan di desa.

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla atau disingkat dengan Yayasan Kalla didirikan 24 April 1984. Melalui yayasan ini, Kalla Group menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dan menyalurkan dana zakat perusahaan dengan aktivitas pada bidang pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Salah satu yang dikembangkan Yayasan Hadji Kalla di Desa Mallari untuk membantu perekonomian masyarakat desa adalah Kalla Agro Ekonomi.

Bentuk kegiatan Kalla Agro Ekonomi adalah pembinaan petani melalui pengwilayahan komoditi dan pengembangan kawasan *agro center* serta peningkatan

kesejahteraan petani dengan meningkatkan nilai jual komoditas pertanian untuk pasar domestik dan mancanegara. Pengembangan yang dilakukan Yayasan Hadji Kalla di Desa Mallari adalah pengembangan bawang merah pada musim kemarau.

Tim *Agro and Green Care* Yayasan Kalla berencana mengembangkan tanaman bawang merah seluas 5 ha di Desa Mallari. Kegiatan awal dengan mengadakan seminar program kerja dengan pihak pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan petani untuk menyepakati beberapa bentuk kegiatan teknis yang melibatkan warga lokal. Setelah seminar tersebut dilakukan maka dilaksanakan diskusi untuk membahas teknis pertanian mulai dari persiapan benih, pengolahan lahan, penanaman, pengelolaan air, penyiangan dan penyulaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen serta kendala yang dihadapi selama penanaman bawang merah sebelumnya. Upaya ini dikhususkan pada penggunaan teknologi budi daya bawang merah secara efisien dan efektif.

4.3.5 Faktor Historis

Keberadaan Yayasan Hadji Kalla di Mallari tidak lepas dari sejarah pengusaha besar asal Mallari. Hadji Kalla dan anaknya, Jusuf Kalla yang saat ini menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai pendiri Kalla Group, Hadji Kalla terkenal sebagai pengusaha besar yang memulai usahanya dari bawah. Alm. Hadji Kalla lahir tahun 1920 di Desa Mallari. Sejak umur tiga tahun, dia sudah hidup yatim karena ayahnya meninggal dunia. Keadaan tersebut membuatnya tumbuh sebagai laki-laki mandiri dan berjiwa usaha. Kemandirian dan jiwa usaha Kalla dibuktikan dengan mulai berdagang bersama temannya. Pada usia 15 tahun Kalla telah memiliki kios sendiri di Pasar Bajoe Watampone, ibukota Kabupaten Bone.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Hadji Kalla dan istrinya menjalankan usaha bersama dengan mengembangkan kios mereka di Pasar Bajoe. Pada 1950, seiring kemajuan usaha, Hadji Kalla dan istrinya Athirah membuka toko yang menjual barang kebutuhan pokok dan pakaian. Pada 18 Oktober 1952, Hadji Kalla kemudian mendirikan perusahaan bernama Hadji Kalla Trading Company yang saat ini bernama Kalla Group. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, tekstil, ekspor-impor, dan jasa transportasi. Perusahaan Hadji Kalla berkembang sangat pesat dan menjadi perusahaan nomor satu di Makassar atau wilayah timur Indonesia.

Karena kepedulian terhadap masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Desa Mallari, Kalla Group memberikan pendampingan pemberdayaan ekonomi lokal di bidang pertanian. Beberapa desa termasuk Mallari menjadi sasaran kerja dari Yayasan Hadji Kalla. Pembanguna Desa Mallari yang cukup maju dibandingkan desa sekitar juga tidak lepas dari nama besar Jusuf Kalla, politisi yang sudah dua periode menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

4.4 Proses Inovasi Desa

Berbagai bentuk inovasi di Desa Mallari muncul melalui proses yang cukup panjang. Berdasarkan langkah penelitian yang telah dilaksanakan, proses inovasi di Desa Mallari dapat diuraikan sebagai berikut:

4.4.1 Proses Pembangunan *Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel*

Orientasi pembangunan pada perempuan, masyarakat miskin dan difabel merupakan bentuk inovasi yang dibangun berdasarkan kepemimpinan kepala desa perempuan yaitu Andi Wahyuli. Selain karena kepemimpinan kepala desa perempuan, inovasi pembangunan yang *pro poor, pro gender dan difabel* juga muncul dari pendampingan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) terhadap proses perencanaan pembangunan di desa. LPP melakukan pendampingan di Desa Mallari atas inisiatif dan undangan dari kepala desa beserta jajaran pemerintah desa.

Pada tahun 2015 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta *The Asia Foundation* mendukung YASMIB Sulawesi (Swadaya Mitra Bangsa, LSM yang berfokus pada pemulihan krisis multidimensi 1999) dan LPP Bone menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Pembangunan Kesehatan yang Berbasis Kebutuhan Disabilitas di Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari Program Peduli Pilar Difabel di Sulawesi Selatan. Program tersebut memiliki tiga pilar yaitu meningkatkan pemahaman stakeholder terkait disabilitas/difabilitas, melakukan pemetaan permasalahan pembangunan kesehatan yang responsif disabilitas di Kabupaten Bone dan menyusun rumusan rekomendasi kepada pemerintah terkait akses layanan kesehatan yang pro disabilitas.

Atas keterbukaan kepala desa, Desa Mallari menjadi salah satu desa mitra kerja program peduli karena memiliki tingkat disabilitas yang cukup tinggi. Selain seminar dan lokakarya tingkat kabupaten, terdapat kegiatan lain yang dilakukan training dengan tema “Perencanaan dan Penganggaran Daerah Program Pendampingan Desa dan Peduli Difabel.”, Diskusi warga di Desa Mallari dan *workshop* penyusunan data kependudukan yang inklusif.

Training dengan tema “Perencanaan dan Penganggaran Daerah Program Pendampingan Desa dan Peduli Difabel” merupakan lanjutan dari *training* Perencanaan Desa Program Peduli Difabel di Kabupaten Bone dan Gowa, *training* ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perangkat desa diharapkan mampu membaca anggaran dan menganalisis APBD di daerah masing masing. Kegiatan ini juga bertujuan membekali kemampuan advokasi perencanaan dan penganggaran di daerah atau desa yang berwawasan inklusif.

Program Peduli yang berbentuk diskusi warga dilaksanakan pada 28 dan 29 Agustus 2015 di kantor Desa Mallari. Kegiatan tersebut dihadiri pemerintah Desa Mallari, beberapa perwakilan kelompok masyarakat serta keluarga penyandang disabilitas. Diskusi warga ini memiliki tujuan untuk memetakan kebutuhan dan hambatan serta mewujudkan impian para penyandang disabilitas. Diskusi warga menghasilkan sebuah permintaan yaitu perhatian pemerintah terhadap kelompok disabilitas.

Berbeda dengan dua program sebelumnya, *workshop* penyusunan data kependudukan yang inklusif dilaksanakan untuk tujuan yang lebih operasional. Secara terfokus *workshop* tersebut diarahkan untuk membangun data kependudukan inklusif di tingkat desa dengan finalisasi draft awal form data kependudukan. Upaya tersebut diharapkan dapat

- a) Membangun persepsi yang sama tentang data kependudukan inklusif di tingkat desa
- b) Menyediakan form data kependudukan yang inklusif di desa yang nantinya digunakan dalam proses pendataan.

Kegiatan *workshop* ini diinisiasi karena sejumlah temuan pada proses pendataan di tingkat desa. Data kependudukan seringkali tidak berorientasi pada pembangunan kelompok disabilitas. Data kependudukan yang disusun untuk merencanakan pembangunan desa juga seringkali belum menaruh perhatian pada kehidupan kelompok disabilitas. Data yang telah disusun belum mengakomodasi data jumlah orang dengan disabilitas. Proses pendataan juga belum dijalankan untuk memperhatikan jenis dan ragam disabilitas.

Melalui berbagai program tersebut, proses pembangunan di Desa Mallari mulai berorientasi pada kehidupan difabel. Data sebagai informasi penting yang digunakan pada proses pembangunan telah memiliki wawasan inklusif dengan menempatkan kaum disabilitas sebagai salah satu subjek yang perlu diakomodasi. Program-program tersebut juga mendorong proses pembangunan di tingkat desa menjadi lebih berpihak pada kaum perempuan serta masyarakat kecil. Musyawarah yang dilakukan oleh seluruh pihak desa dalam perencanaan pembangunan selalu memposisikan perempuan dan masyarakat miskin sebagai aktor sentral yang perlu diberdayakan.



Gambar 4.3
Unit Usaha Kerajinan
Peci/Songkok Lontar
Beranggotakan
Perempuan dan Difabel

4.4.2 Program Stop SBS (Buang Air Besar Sembarangan) atau *Open Defecation Free (ODF)*

Bentuk inovasi ini muncul atas inisiasi pemerintah Desa Mallari yang kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat desa. Sebelum program ini dicetuskan, masyarakat Desa Mallari memiliki budaya buang air besar secara sembarangan. Mereka cenderung memanfaatkan sungai dan lahan-lahan kosong yang ada di lingkungan desa untuk aktivitas buang air besar.

Memberikan kesadaran dan pemahaman untuk mengubah perilaku buang air besar kepada masyarakat bukanlah sebuah perkara yang mudah. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih sangat tradisional. Mereka merasa tidak memiliki masalah dengan budaya buang air besar di sembarang tempat. Masyarakat Desa Mallari bahkan sudah berada pada tahap nyaman untuk buang air besar di lahan kosong, sungai dan perkebunan.

Melihat fenomena tersebut, kepala desa beserta jajarannya dengan sangat proaktif mencoba memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi diberikan baik secara formal maupun informal. Sesuai dengan program Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dicanangkan pemerintah pusat, pemerintah Desa Mallari menekankan pentingnya kepemilikan jamban keluarga oleh masyarakat desa. Melalui langkah tersebut masyarakat perlahan-lahan mengubah pola pikirnya dan kemudian terbuka dengan gagasan jamban keluarga.

Melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan pemanfaatan budaya malu dan *sirik*, akhirnya program jamban keluarga 2015 diterima dengan sangat terbuka oleh masyarakat Desa Mallari. Setelah mendapat penerimaan yang baik, dilakukan musyawarah lanjutan untuk menentukan sasaran program yaitu rumah yang belum dilengkapi dengan jamban keluarga. Musyawarah juga dilakukan untuk mengelola aspek teknis pembangunan jamban keluarga seperti jadwal pembangunan jamban serta tenaga dan peralatan yang diperlukan.

Seluruh proses pembangunan jamban keluarga dilakukan masyarakat Desa Mallari dengan swadaya. Pemerintah desa tidak mengeluarkan anggaran khusus setelah sosialisasi Program Stop Buang air Besar Sembarangan. Masyarakat tidak merasa keberatan meskipun untuk membangun satu unit jamban dibutuhkan biaya sebesar Rp 500.000,00-Rp. 1.000.000,00. Secara sukarela, masyarakat juga bergotong-royong membangun jamban di setiap rumah.

Setelah proses tersebut dilaksanakan, dalam 1 tahun Desa Mallari menjadi desa pertama di Kabupaten Bone yang dideklarasikan sebagai Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau *Open Defecation Free (ODF)* oleh Bupati Bone. Prestasi tersebut diraih karena partisipasi masyarakat yang tinggi pada program jamban keluarga. Bupati

juga mengapresiasi kerelaan masyarakat dalam mengeluarkan biaya sendiri dan saling gotong royong untuk membangun jamban keluarga. Angka 100% keluarga pengguna jamban permanen menjadi bukti nyata keberhasilan program jamban keluarga di Desa Mallari.

Setelah dideklarasikan sebagai desa ODF, Desa Mallari saat ini dipersiapkan untuk menjadi desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sanitasi secara total mencakup 5 pilar yaitu Stop SBS, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, pengelolaan air minum di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

4.4.3 Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Bawang Merah

Pada tahun 2014, Yayasan Hadji Kalla menginisiasi program pemberdayaan desa. Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian. Program ini menyasar desa-desa di Kabupaten Bone. Desa Mallari menjadi satu - satunya desa dari kecamatan Awangpone yang turut menjadi sasaran dari program Yayasan Hadji Kalla. Bone menjadi kabupaten yang strategis karena memiliki lahan garapan yang luas, namun tidak berdampak banyak pada ekonomi masyarakat. Fenomena ini terjadi karena masyarakat hanya mengandalkan pertanian padi dengan masa panen yang sangat terbatas.

Melihat permasalahan itu, Yayasan Kalla kemudian mencoba mengambil peran untuk mengembangkan ekonomi di wilayah pedesaan setelah melakukan pemetaan wilayah. Program tersebut kemudian difokuskan pada pengembangan tanaman hortikultura dengan memanfaatkan lahan petani yang tidak digunakan selama musim kemarau dan lahan-lahan kosong lainnya. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, lahan di Kabupaten Bone sangat cocok untuk digunakan sebagai media tanam bawang merah, labu, semangka, melon, cabai dan beragam jenis sayur.

Berdasarkan temuan tersebut, Yayasan Hadji Kalla kemudian membagi wilayah sasaran program dengan komoditas pertanian hortikultura yang spesifik. Upaya ini dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bone dengan produksi komoditas pertanian yang beragam. Pemikiran tersebut kemudian menempatkan Desa Mallari sebagai penghasil komoditas bawang merah. Proses yang dilakukan oleh Yayasan Hadji Kalla kepada masyarakat Desa Mallari dalam hal pengembangan tanaman bawang adalah melakukan pendampingan dari awal menanam hingga tanaman bawang siap dipasarkan. Yayasan Hadji Kalla melakukan pendampingan mulai dari memberikan pengetahuan tata cara menanam tanaman bawang, awal penanaman, hingga pada saat tanaman bawang siap dipasarkan.

4.5 Dampak Inovasi Desa

Setiap inovasi yang muncul di Desa Mallari diarahkan untuk dapat menghasilkan dampak-dampak spesifik. Meskipun demikian, setiap inovasi yang muncul juga menghasilkan dampak-dampak positif lain. Secara lebih komprehensif berbagai dampak dari inovasi yang telah dihasilkan di Desa Mallari dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Pembangunan *Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel*

Dampak yang cukup besar dari inovasi ini adalah perubahan taraf hidup masyarakat miskin, perempuan dan difabel. Mereka tidak lagi tersingkirkan namun justru menjadi aktor utama dalam proses pembangunan desa. Proses pembangunan di Desa Mallari telah berwawasan inklusif karena mengakomodasi aspirasi dan juga diarahkan untuk pemberdayaan golongan yang termarginal. Melalui inovasi tersebut terbentuk kelompok pengrajin songkok lontar dan kerajinan limbah plastik yang beranggotakan perempuan dan kelompok difabel. Selain itu terbentuk pula kelompok petani, petani rumput laut dan nelayan yang berfungsi sebagai organisasi yang mengakomodasi kebutuhan petani dan nelayan.

Terbentuknya pusat kerajinan, kelompok petani dan kelompok nelayan tersebut kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat difabel yang sebelumnya kurang diberdayakan kemudian dapat memperoleh penghasilan tambahan yang bermanfaat bagi ekonomi rumah tangga. Petani dan nelayan yang ada di Desa Mallari juga lebih sejahtera karena mampu melakukan proses produksi dan pemasaran berbagai jenis komoditas secara lebih efisien.

Inovasi pembangunan yang berorientasi pada masyarakat miskin, perempuan dan difabel juga berhasil mewujudkan budaya demokrasi baru pada pemerintahan tingkat desa. Kelompok difabel, perempuan dan masyarakat miskin tidak lagi memiliki keengganan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa semakin bersifat partisipatif dengan tidak lagi berorientasi pada kelompok mayoritas.

2. Program Stop SBS (Buang Air Besar Sembarangan) atau Open Defecation Free (ODF)

Penerimaan dan partisipasi masyarakat secara aktif pada program jamban keluarga kemudian berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat. Masyarakat perlahan-lahan mulai meninggalkan pola hidup yang kurang sehat. Berdasarkan perubahan pola hidup tersebut dapat dipahami bahwa program jamban keluarga dan STBM berhasil mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih berwawasan pada aspek kesehatan.

Masyarakat menyadari bahwa jamban keluarga memberikan manfaat kenyamanan dalam melakukan aktivitas BAB. Semenjak memiliki jamban keluarga, masyarakat Desa Mallari tidak lagi menggunakan lahan terbuka, sungai dan perkebunan untuk BAB. Mereka juga mulai merasakan dan memiliki pemahaman bahwa penggunaan jamban keluarga jauh lebih sehat dan higienis.

Sebagai rangkaian program STBM, program jamban keluarga juga memunculkan perhatian masyarakat yang lebih besar terhadap aspek kesehatan. Mereka menjadi lebih terbuka saat dilakukan berbagai jenis program yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, masyarakat Desa Mallari juga semakin pro aktif mencari dan meminta berbagai informasi mengenai kesehatan. Fenomena tersebut selanjutnya direspon oleh pemerintah desa dengan fasilitasi penyelenggaraan program pemberdayaan kesehatan masyarakat.

3. Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Bawang Merah

Inovasi ini secara langsung memberikan dampak berupa pemanfaatan lahan pertanian dan lahan kosong di lingkungan desa secara lebih efektif dan efisien. Apabila sebelumnya para petani hanya menggunakan lahan pertanian untuk menanam padi pada waktu tertentu, saat ini mereka dapat memanfaatkan jeda tanam padi untuk memberdayakan bawang merah. Melalui langkah ini, produktivitas lahan juga dapat terus terjaga karena terdapat variasi jenis tanaman yang dikembangkan. Pemanfaatan lahan secara efektif dan efisien juga terasa pada lahan-lahan kosong di Mallari. Apabila sebelumnya masyarakat hanya rutin membersihkan atau bahkan memanfaatkan lahan tersebut untuk BAB, saat ini masyarakat telah mendapatkan manfaat yang mendukung kondisi perekonomian rumah tangga.

Inovasi pemanfaatan lahan untuk budidaya bawang merah kemudian juga memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi petani. Mereka tetap mendapatkan penghasilan meskipun musim tanam dan panen padi belum tiba. Melalui inisiatif spesifikasi komoditas pertanian pada setiap desa yang digagas oleh Yayasan Hadji Kalla, para petani dapat memasarkan komoditas bawang merahnya ke desa-desa dan kecamatan lainnya. Pendampingan pemasaran oleh Yayasan Hadji Kalla bahkan telah berhasil membawa komoditas bawang merah Mallari ke pasar negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Secara tidak langsung, pemanfaatan lahan untuk budidaya bawang merah juga telah memberikan edukasi bagi para petani dan masyarakat Desa Mallari. Melalui pendampingan intens dari Yayasan Hadji Kalla, petani dan masyarakat desa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai teknologi di bidang pertanian. Mereka menjadi lebih memahami prinsip-prinsip teknis pertanian seperti pemilihan benih, penggunaan pupuk, pengelolaan lahan, pengairan, kegiatan panen dan pasca panen.

Selain edukasi di bidang teknis pertanian, inovasi pemanfaatan lahan untuk budidaya bawang merah membawa dampak edukasi kewirausahaan bagi para petani dan masyarakat Desa Mallari. Para petani terdorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan jenis dan jumlah komoditas pertanian. Mereka juga lebih menaruh perhatian yang besar pada kegiatan pemasaran komoditas dibandingkan sebelumnya. Para petani menyadari bahwa untuk meraih keuntungan yang maksimal, kegiatan pertanian juga perlu difokuskan pada aktivitas pasca panen yaitu pemasaran komoditas. Masyarakat desa yang awalnya tidak bekerja sebagai petani juga mulai mengoptimalkan sumber daya lahan yang dimiliki untuk memperoleh manfaat ekonomi.

4.6 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan langkah penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inovasi-inovasi yang muncul dan berkembang di Desa Mallari dihasilkan dari proses yang berkelanjutan. Proses inovasi yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai macam aktor menjadi kunci keberhasilan inovasi di Desa Mallari. Meskipun demikian, proses inovasi yang berkelanjutan tersebut hanya akan muncul apabila terdapat inisiatif dari inisiator inovasi untuk mengoperasionalkan dan melaksanakan berbagai ide yang dimiliki.

Melalui kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa kepala desa sebagai elit politik lokal masih menjadi inisiator utama dalam proses inovasi di Mallari. Selain karena faktor kepemimpinan kepala desa, fenomena ini muncul karena pemimpin di tingkat lokal masih berasal dari golongan bangsawan yang dianggap sebagai masyarakat kelas atas oleh masyarakat Desa Mallari. Relasi golongan bangsawan dan masyarakat kecil tersebut pada akhirnya menghasilkan politik dinasti yang terus berlanjut.

Keberadaan politik dinasti pada tata kelola pemerintahan di Mallari ternyata memiliki berbagai dampak positif terhadap proses inovasi desa. Politik dinasti di Desa Mallari berhasil memunculkan pemimpin perempuan sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi kesetaraan gender. Kemunculan kepala desa perempuan tersebut kemudian mendorong kemunculan inovasi proses pembangunan yang *pro poor*, *pro gender* dan *pro difabel*. Politik dinasti juga berhasil menghasilkan kepemimpinan yang terbuka dan sangat bersifat inklusif.

Berdasarkan pembelajaran ini, dirumuskan dua saran penting bagi pengembangan inovasi bagi desa-desa lain di Indonesia sebagai berikut:

1. Pelembagaan Demokrasi Lokal

Politik dinasti sebagai karakteristik demokrasi lokal terbukti bermanfaat bagi proses inovasi di Desa Mallari. Politik dinasti tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip umum demokrasi karena kepala desa juga dipilih melalui proses pemilihan umum yang sah. Berdasarkan temuan tersebut, perlu dilakukan pelebagaan tata kelola demokrasi lokal untuk menjamin keberlanjutan inovasi di wilayah desa. Langkah pelebagaan ini dapat dilakukan dengan merancang Peraturan Desa (PerDes) yang mengatur pengelolaan lembaga politik lokal yang ada di desa. Lembaga adat dan lembaga politik lokal perlu lebih diberdayakan dan untuk mencapai kondisi tersebut pendekatan institusional perlu dilakukan. Proses demokratisasi tidak perlu dipaksakan menyebar luas ke wilayah desa. Langkah yang perlu diupayakan justru melindungi keberlanjutan demokrasi lokal untuk menjamin keberlanjutan inovasi dengan mekanisme kelembagaan yang jelas.

2. Pelebagaan Kearifan Lokal

Selain pelebagaan nilai-nilai demokrasi lokal, pelebagaan juga perlu dilakukan untuk menjaga nilai kearifan lokal. Melalui kelembagaan yang jelas, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sebuah desa akan terus terjaga. Langkah ini penting dilakukan agar arus modernisasi yang terjadi tidak menghilangkan karakteristik budaya lokal. Ketika kearifan lokal yang sangat berkontribusi terhadap inovasi desa hilang maka masyarakat desa tidak lagi memiliki modal secara kultural untuk dapat berinovasi. Pelebagaan nilai kearifan lokal dapat dinisiasi oleh kepala desa dengan mengeluarkan PerDes yang menjelaskan operasionalisasi nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam proses pembangunan desa.

Bagi Desa Mallari sendiri, beberapa upaya untuk menyempurnakan inovasi desa masih perlu dilakukan. Salah satu langkah yang perlu dilaksanakan adalah pemanfaatan sumber daya pesisir sebagai destinasi pariwisata. Hingga saat ini sumber daya pesisir Desa Mallari masih diarahkan untuk produksi perikanan dan rumput laut. Melalui pemanfaatan sumber daya pesisir bagi kegiatan pariwisata, berbagai keuntungan dapat diperoleh dan hal tersebut juga bermanfaat bagi penambahan PADes sebagai sumber pembangunan desa. Revitalisasi pariwisata pada wilayah pesisir dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa karena industri pariwisata cenderung memiliki nilai tambah yang cukup tinggi. Karakteristik industri pariwisata yang nirlimbah juga dapat bermanfaat menjaga kelestarian lingkungan pantai.

Selain pemanfaatan sumber daya pesisir untuk kegiatan pariwisata, Desa Mallari juga perlu mengembangkan aktivitas produksi berwawasan produk jadi. Sejauh ini masyarakat Desa Mallari masih mengembangkan sektor pertanian dan kelautan yang terbatas pada produk hulu. Mereka hanya memasarkan hasil pertanian dan kelautan berupa rumput laut serta berbagai macam jenis ikan. Apabila komoditas pertanian dan perikanan tersebut dapat diolah menjadi produk hilir maka manfaat nilai tambah ekonomi akan lebih dirasakan oleh para petani dan nelayan Desa Mallari.

V

MEMAHAMI PRAKTIK BAIK INOVASI PEMBANGUNAN DESA NITA

Trisno Sakti Herwanto

5.1 Profil dan Dinamika Pembangunan Desa

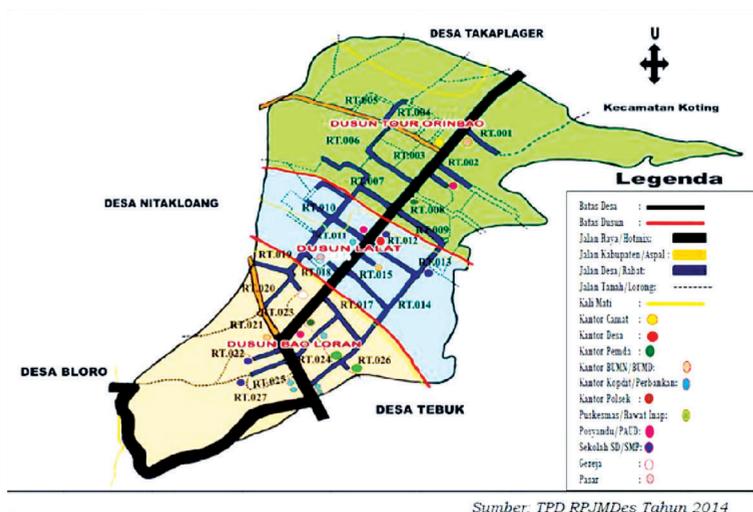
Desa Nita adalah salah satu desa yang dikenal karena praktik baik inovasi pembangunan yang terus bermunculan. Salah satu inovasi yang menonjol dari Desa Nita adalah proses pembangunan yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi tata kelola pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Melalui berbagai inovasi pada proses dan berbagai aspek pembangunan, Desa Nita telah memperoleh sejumlah penghargaan baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional.

Nita merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Secara administratif pemerintahan, desa ini terbagi atas 3 wilayah dusun yaitu dusun Bao Loran, dusun Lalat dan dusun Tour Orin Bao. Secara fisik administratif, Desa Nita berbatasan dengan Desa Nita Nitakloang di sebelah utara, Desa Tebuk di sebelah selatan, Desa Bloro di sebelah barat dan Desa Takaplager di sebelah timur. Luas wilayah Desa Nita adalah 19,6 km² atau 196 hektar dengan rincian wilayah per dusun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Luas Wilayah Desa Nita Per-Dusun

No	Dusun	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	RW	RT
1	Bao Loran	0,65	33,16	2	11
2	Lalat	0,53	27,05	2	7
3	Tour Orin Bao	0,78	39,79	2	9
JUMLAH		1,96	100	6	27

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2013



Gambar 5.1
Peta Wilayah
Administrasi Desa Nita

Menurut sejarah tertulis dan tradisi lisan yang berkembang dari waktu ke waktu, nama desa 'Nita' diambil dari nama sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah-tengah perkampungan bernama pohon Nita. Di bawah naungan pohon inilah pada zaman dahulu menjadi tempat berteduh atau istirahat bahkan menjadi 'terminal antar kampung', termasuk menjadi pasar atau tempat jual beli antar warga kampung pada masa itu.

Adapun penduduk Nita pada waktu itu hidup berkelompok atau disebut 'kloang' dalam satu kesatuan adat atau suku dengan rumah adat bersama yang disebut 'lepo' dan dikepalai oleh seorang kepala suku. Dari 'kloang' atau 'suku' dan 'lepo' inilah yang membentuk satu kesatuan yang disebut 'Natar' atau kampung dibawah pimpinan kepala kampung. Dari catatan sejarah dan cerita lisan berkembang, tercatat kurang lebih 7 (tujuh) suku atau lepo yang hidup dan berkembang pada masa itu sampai dengan sekarang seperti; Lepo Gete (Ratu/Raja), Lepo Kolit, Lepo Degodona, Lepo Geronpun, Lepo Lorat, Lepo Orin Bao dan Lepo Tour Orin Gete.

Dalam perjalanan waktu seiring dengan ekspansi Hindia Belanda ke Indonesia dan Flores pada khususnya, maka terbentuk pula model pemerintahan baru di setiap kampung dengan penyebutannya masing-masing. Antara lain 'Natar Nita' menjadi wilayah Kapitan Nita (kurang lebih sama dengan Kampung) dengan Kepala Kampung atau Kapitan pertamanya Philipus Muda Meak da Silva dan Raja Nita (sebutan untuk Kepala persekutuan Kampung atau disebut Kerajaan) Don Juang da Silva. Selanjutnya oleh Pemerintah Hindia Belanda, Kerajaan Nita kemudian berafiliasi pada Kerajaan Sikka dan Nita sendiri menjadi Hamente di bawah kepemimpinan Kapitan Don Pederico da Silva.

Pada tahun 1958, terbentuklah Pemerintahan Kabupaten Sikka dan Hamente Nita menjadi Kecamatan Nita dengan Camat Pertamanya Philipus Muda Meak da Silva dan yang menjadi Kepala Kampung Nita pada saat itu adalah Hendrikus Gleko Kolit. Adapun

para kepala desa yang memimpin Desa Nita berturut-turut sejak bernama Desa Gaya Baru sampai dengan sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Riwayat Pimpinan Desa Nita

No.	Nama	Jabatan	Periode	MB
1.	H. Gleko Kolit	Kepala Desa	1967 s/d 1972	5 thn
	Leopold da Silva	Wakil Kades	1967 s/d 1972	5 thn
2.	Petrus Kanisius	Kepala Desa	1972 s/d 1978	6 thn
3.	Aloysius Sina	Kepala Desa	1978 s/d 1986	8 thn
4.	Samuel Amadeus	Kepala Desa	1986 s/d 2000	14 thn
5.	Y.N. Sirilus D. Gobang	Kepala Desa	2000 s/d 2007	7 thn
6.	Herman Ranu, SP	Kepala Desa	2007 s/d 2013	6 thn
7.	Antonius B. Luju	Kepala Desa	2013 s/d 2019	6 thn

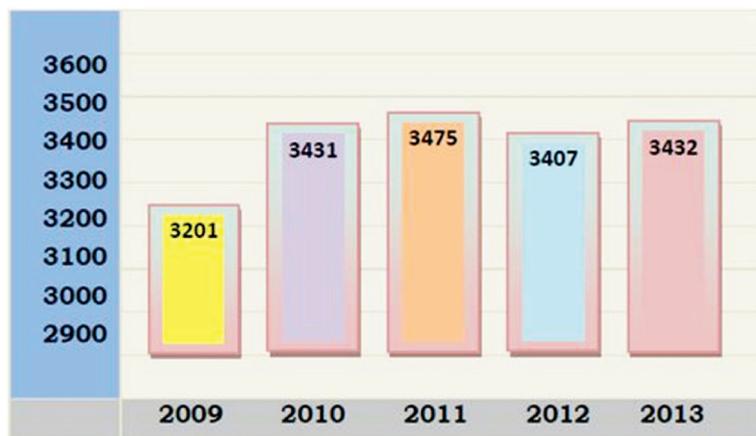
Sumber: Arsip Desa Nita.

Berdasarkan observasi yang dilakukan tim peneliti, Desa Nita masih menampilkan karakteristik dan nuansa pedesaan yang sangat kental. Hal ini juga dapat diketahui dengan melihat struktur penduduk Desa Nita. Desa Nita hanya memiliki kepadatan penduduk 1,75 jiwa/Km². Jumlah penduduk Desa Nita juga tidak terlalu mengalami peningkatan maupun penurunan yang signifikan setiap tahun. Fenomena ruralisasi dapat dikatakan masih sangat jarang terjadi di Desa Nita. Terkait dengan demografi jenis kelamin penduduk, Desa Nita memiliki perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang cukup berimbang.

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2009-2013

Dusun	2009		2010		2011		2012		2013	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Bao Loran	563	676	556	666	581	669	551	632	558	635
Lalat	370	356	443	465	444	476	426	437	430	442
Tour Orin Bao	648	588	727	574	726	579	755	606	761	606
Jumlah L/P	1581	1620	1726	1705	1751	1724	1732	1675	1749	1683
Jumlah KK	771		800		809		801		804	
Total Jiwa	3201		3431		3475		3407		3432	

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2009-2013



Gambar 5.2
Jumlah Penduduk Desa
Nita 2009-2013

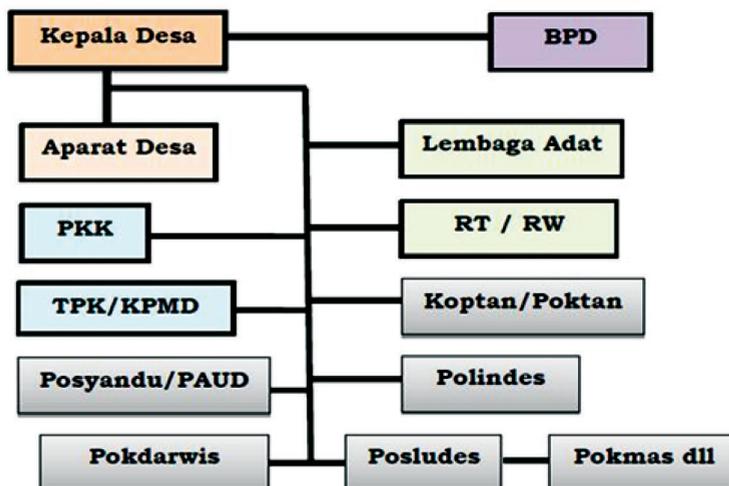
Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2009-2013

Sebagai sebuah wilayah yang masih menunjukkan karakteristik desa, Nita memiliki ciri utama proses pembangunan berdasarkan tradisi dan budaya yang berkembang dari masa ke masa. Secara umum aktivitas pembangunan di Desa Nita berlandaskan prinsip musyawarah, kebersamaan dan gotong-royong. Gotong-royong sebagai pola hidup bersama menjunjung tinggi asas solidaritas dan fraternitas, serta musyawarah sebagai model komunikasi partisipatif melibatkan semua golongan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Nilai gotong-royong di Desa Nita secara umum masih bertahan dan terpelihara dengan baik. Fenomena ini tampak pada berbagai bidang kehidupan termasuk dalam proses pengambilan kebijakan serta perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Pola hidup gotong royong dan musyawarah dapat dilihat dari aktualisasi berbagai nilai kearifan lokal sebagai berikut:

- a. Kebiasaan gotong royong dalam pengerjaan kebun dan penggarapan lahan, kegiatan bhakti desa, pembangunan rumah warga atau sarana prasarana umum lainnya yang dikenal dengan istilah 'Sako Seng' atau 'Lahi Lekang'.
- b. Kebiasaan partisipatif dalam komunitas adat dan kehidupan bersama ketika menghadapi peristiwa kematian, kelahiran, perkawinan dan musibah melalui cara dan upaya saling mengajak atau 'Gaging Gatang', saling mengunjungi atau 'Dulu Dalang' dan dalam ikatan persahabatan atau 'Imung Deung'.
- c. Kebijakan melalui musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan bersama serta penyelesaian masalah publik lainnya melalui komunikasi 'Kula Babong' atau 'Bibo Babong' bersama.

Akomodasi nilai kearifan lokal masyarakat dalam proses pembangunan juga tampak dari keterlibatan lembaga adat dalam struktur formal organisasi pemerintahan desa.



Gambar 5.3
Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa Nita

Proses pembangunan yang sangat menjunjung tinggi nilai kearifan lokal tersebut berhasil memunculkan berbagai keluaran pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Tabel 5.4 Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Nita Hingga 2013

No.	Jenis Kegiatan Pembangunan	Keterangan
I. Pembangunan Fisik		
1	Pengadaan Lahan/Tanah Desa	APBDes/Swadaya
2	Pembangunan dan Pemugaran Kantor Desa	APBDes/Swadaya
3	Pembangunan Polindes/Posyandu	PNPM-MPd
4	Pembangunan Jalan/Rabat Jalan Desa	PNPM-MPd / PPIP
5	Pembukaan Jalan Usaha Tani	APBDes/Swadaya
6	Pembangunan Bak Air Minum Desa	APBDes/Swadaya
7	Pembangunan Sarana Penerangan Jalan Desa	APBDes
8	Pembangunan/Pemugaran Rumah Warga	APBDes/APBN
9	Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya	APBDes/APBD/APBN
10	Pengembangan Infrastruktur/Suprastruktur dll	APBDes/APBD/APBN
II. Pembangunan Non Fisik		
1	Penguatan Modal Usaha Kelompok/Warga	APBDes/APBD/APBN
2	Pemanfaatan Dana UEP/SPP	PNPM-MPd
3	Pelatihan Kapasitas Kelembagaan	APBDes/APBD/LSM
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	APBDes/APBD/APBN
5	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	APBDes/APBD/APBN
6	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	APBDes/APBD/APBN
7	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	APBDes/APBD/APBN
8	Bantuan Sosial RTM/RTSM/MBR dll	BLM/BLSM/Bansos dll
9	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PKH/Raskin dll
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya	APBDes/APBD/APBN/BLM dll

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 1967-2013

Pelayanan dasar dan fasilitas umum Desa Nita juga terlihat sangat memadai dan mendukung kehidupan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya serta sarana dan prasarana di Desa Nita sebagai berikut:

- a. Pada aspek pendidikan, sebagian besar masyarakat telah mengenyam pendidikan formal pada berbagai jenjang. Pembangunan di sektor pendidikan semakin terlihat maju dengan fenomena terjadinya peningkatan jumlah penduduk jenjang pendidikan perguruan tinggi. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, dibangun fasilitas pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP di Desa Nita.
- b. Terkait dengan aspek pembangunan kesehatan, Desa Nita telah melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Polindes, Posyandu, hingga apotek desa.
- c. Pada aspek ekonomi, Desa Nita memiliki fokus yang tinggi pada perkembangan koperasi dan UKM. Fokus pada koperasi dan UKM terlihat dari terbentuknya Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) dan lembaga keuangan lainnya, sektor industri rumah tangga serta perkembangan usaha di bidang pertanian/ perkebunan dan peternakan.

Tabel 5.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Nita 2009-2013

No.	Kategori	Tahun / Jumlah Jiwa				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Tidak/Belum Sekolah	297	373	416	333	376
2.	Tidak Tamat SD	330	434	435	420	418
3.	Tamat SD	768	894	885	915	898
4.	Tamat SLTP	522	627	628	501	501
5.	Tamat SLTA	637	754	759	711	715
6.	Universitas	322	349	352	524	523
7.	Diploma I-II	58	63	64	29	29
8.	Diploma III/Akademi	30	36	36	77	77
9.	Diploma IV/S1	219	230	232	403	402
10.	S-II	18	20	20	16	16
11.	S-III	-	-	-	2	2
JUMLAH		3201	3431	3475	3407	3432

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2009-2013

Tabel 5.6 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Nita Hingga 2013

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Tempat/Lokasi
1.	Pos Pendidikan Anak Usia Dini	3	- PAUD Dahlia - PAUD Melati - PAUD Mawar
2.	Taman Kanak-Kanak	3	- TKK Fransiskan - TKK Nita 1 - TKK Nita 2
3.	Sekolah Dasar	2	- SDK Nita 1 - SDK Nita 2
4.	Sekolah Menengah Pertama	2	- SMPN Negeri 1 Nita - SMPK Kimbul

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2013

Tabel 5.7 Jumlah Sarana Kesehatan Desa Nita Hingga 2013

No.	Sarana Kesehatan	Nama SK	Lokasi/Dusun	Jumlah
1.	Puskesmas	Puskesmas Nita	Bao Loran	1
2.	Rawat Inap	Ranap Nita	Bao Loran	1
3.	Polindes	Polindes Nita	Lalat	1
4.	Posyandu	Posyandu Dahlia	Lalat	3
		Posyandu Melati	Tour Orin Bao	
		Posyandu Mawar	Bao Loran	
5.	Balai Pengobatan	BP St. Elisabeth	Tour Orin Bao	1
6.	Apotek	- Apotek St. Elisabeth	Tour Orin Bao	2
		- Apotek Olivia	Lalat	

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2013

- d. Desa Nita juga memiliki ketersediaan sarana prasarana wilayah desa atau infrastruktur dan suprastruktur yang sangat mendukung. Jalan dan drainase, perumahan warga, fasilitas air bersih, energi dan sumber mineral, sarana telekomunikasi dan informatika dan akses perhubungan secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Tabel 5.8 Tingkat Perkembangan Jalan dan Drainase Desa Nita Hingga 2013

No.	Keterangan	Jenis	Jumlah
1.	Jalan Desa/Lingkungan	Agregat	2 Km ²
2.	Jalan Desa/Lingkungan	Rabat Beton	3 Km ²
3.	Jalan Usaha Tani	Tanah	1,5 Km ²
4.	Saluran/Drainase	Permanent	1 Km ²

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2013

Tabel 5.9 Keadaan Jalan Desa Nita Hingga 2013

No	Uraian	Jalan / M ²	
		Desa	Usaha Tani
1.	Jenis Permukaan		
	- Diaspal	1001	-
	- Rabat	2000	-
	- Tanah	800	1500
	- Tidak Terinci	-	-
2.	Kondisi jalan		
	- Baik	300	-
	- Sedang	500	2000
	- Rusak	1001	-
	- Rusak Berat	500	-

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2013

Meskipun hingga 2013 berbagai aspek pembangunan Desa Nita telah berada pada taraf yang cukup tinggi, berbagai bentuk inovasi pembangunan justru berkembang pesat semenjak 2014. Dari perspektif manajemen pembangunan, inovasi yang bermunculan di Desa Nita sebenarnya berawal dari RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019. Rencana pembangunan tersebut mengacu pada pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan desa yang meliputi tata kelola pemerintahan, standar mutu pelayanan, keterpaduan antara urusan wajib dan urusan pilihan, perencanaan dan penganggaran yang *'go public'* dan responsif sosial serta atensi pada karakter budaya dan kelestarian lingkungan.

RPJMDes Desa Nita 2014-2019 ini disusun berdasarkan 5 isu penting dan mendesak yang perlu segera diatasi dalam perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dini akibat kurangnya aktivitas dan produktivitas kerja serta keterbatasan lapangan kerja.
- b. Menurunnya usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat akibat keterbatasan pengetahuan, kekurangan modal dan akses permodalan serta minimnya sarana sarana prasarana pendukung.
- c. Menurunnya akseibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta rendahnya kualitas lingkungan biotik dan abiotik.

- d. Menurunnya kualitas pelayanan publik serta tingkat partisipasi masyarakat dan kepemudaan dalam pembangunan.
- e. Menurunnya tingkat keamanan dan ketertiban lingkungan akibat melemahnya pemahaman budaya, norma agama dan hukum adat serta berkembangnya potensi konflik kemasyarakatan.

Isu-isu tersebut kemudian diterjemahkan dalam visi jangka panjang yaitu “Menggapai Harmoni Desa Membangun”. Visi tersebut kemudian diturunkan dalam visi tahunan pembangunan Desa Nita yang berkelanjutan yaitu Desa Sadar Hukum, Desa Wisata, Desa STBM, Desa Siaga/Desa Sehat, Desa Layak Anak, Desa Sadar Hukum dan Desa STBM.

Berdasarkan visi tahunan desa yang sangat spesifik, semenjak 2014 bermunculan berbagai inovasi pembangunan di Desa Nita. Fenomena kemunculan berbagai inovasi ini kemudian menjadi fokus yang menarik dan penting untuk dipelajari. Keterbatasan sumber daya desa terutama pada sektor Sumber Daya Alam tidak menjadi penghalang bagi Desa Nita untuk berinovasi. Meskipun APBDes Nita 2016 telah mencapai Rp. 1.198.672.356,00, Nita tergolong merupakan desa yang minim SDA apabila dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Desa Nita tidak memiliki wilayah perkebunan yang relatif luas untuk dapat memproduksi berbagai komoditas perkebunan. Selain itu komoditas perkebunan di Desa Nita hanya terdiri dari kopra, biji kakao dan jambu mede. Desa Nita juga tidak memiliki potensi alam untuk menopang kegiatan pariwisata. Satu-satunya potensi pariwisata di Desa Nita adalah keberadaan 14 Biara Katolik yang salah satunya pernah dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus II.

Rincian anggaran yang dimiliki oleh Desa Nita adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rp. 453.740.275,00), Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rp. 332.134.081,00), Pembinaan Kemasyarakatan Desa (Rp. 45.444.000,00), Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rp. 367.354.000,00)



Gambar 5.4
Penghargaan Bagi Desa Nita Sebagai Juara 1 Lomba Desa Regional Papua, Maluku dan NTT 2016

Selain berbagai bentuk inovasi di Desa Nita, perhatian pada aktivitas penelitian inovasi di desa saat ini juga merupakan hal yang sangat penting. Apabila tidak diiringi dengan kreativitas dan inovasi, sumber dana yang saat ini difokuskan pada pembangunan desa justru terancam tidak dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya inovasi, berbagai potensi desa yang semestinya dapat dioptimalkan juga tidak akan berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya penelitian yang telah dilaksanakan tim peneliti dapat dipahami bahwa Desa Nita telah mampu menghasilkan inovasi untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunannya. Untuk memberikan pemahaman praktik baik inovasi pembangunan desa, pada bab ini akan diuraikan berbagai komponen inovasi pembangunan Desa Nita meliputi bentuk-bentuk, faktor-faktor pendorong, proses dan dampak inovasi.

5.2 Bentuk-Bentuk Inovasi Desa

Melalui langkah penelitian, diperoleh gambaran mengenai berbagai bentuk inovasi di Desa Nita. Secara mendasar Desa Nita dapat disebut sebagai desa inovatif karena inovasi yang dihasilkan merupakan inovasi yang beragam dan dilaksanakan di berbagai sektor pembangunan. Bentuk-bentuk inovasi Desa Nita dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Proses Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan Desa Transparan dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan saat ini menjadi fokus utama pemerintah, tidak terkecuali pemerintah desa. Pada level pemerintah desa, transparansi dan akuntabilitas penganggaran menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Urgensi keterbukaan penganggaran di desa didorong oleh peralihan dana dari sumber APBN ke pemerintah desa. Transparansi dan akuntabilitas sebagai kontrol realisasi anggaran di desa menjadi alat penting untuk memastikan efektivitas serta efisiensi penggunaan dana.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penganggaran, Desa Nita menuangkannya dalam misi pertama RPJPDes Nita 2014-2034 yaitu : "Mewujudkan Desa Nita yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *go public* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa." Misi tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk inovasi pada proses penganggaran Desa Nita.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran adalah dengan menginisiasi partisipasi atau keterlibatan luas masyarakat dalam proses pembangunan dan penganggaran desa. Kepala desa melihat bahwa transparansi dan akuntabilitas penganggaran sulit dilaksanakan jika masyarakat tidak partisipatif. Selama ini partisipasi masih menjadi masalah utama yang ditemui di Desa Nita sehingga inisiasi partisipasi masyarakat adalah hal penting pertama yang harus dilakukan.



Gambar 5.5
Infografik RAPBDes Nita yang Diunggah ke Media Sosial Facebook

Inisiasi partisipasi dilakukan dengan cara memampang APBDes dalam spanduk besar di halaman Rumah Desa Nita. Selain itu, seluruh masyarakat juga menerima laporan alokasi anggaran desa dalam bentuk leaflet yang disampaikan oleh pemerintah desa. Pada tahun 2017 bahkan Desa Nita mulai menghadirkan RAPBDes melalui media sosial. Melalui upaya tersebut, muncul partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. Partisipasi dalam penganggaran juga diinisiasi kepala desa dengan mengundang LSM Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk melakukan pendampingan proses demokrasi desa.

Melalui upaya-upaya tersebut, masyarakat kemudian menjadi lebih teredukasi dan merasa bertanggungjawab terhadap penggunaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dibangun pada akhirnya tidak hanya terbatas pada transparansi dan akuntabilitas pada ketentuan perundangan namun lebih terarah pada transparansi dan akuntabilitas sosial.

5.2.2 Partisipasi Anak dalam Musrenbang

Bentuk inovasi berupa inisiasi partisipasi dalam proses pembangunan tidak hanya dilakukan Desa Nita dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran. Perhatian juga diberikan pemerintah desa terhadap keberadaan anak-anak di Desa Nita. Perhatian ini terwujud dalam inovasi berupa pelibatan anak-anak secara khusus dalam proses musyawarah pembangunan desa.

Sebelum forum Musrenbangdes dilaksanakan, terlebih dahulu golongan anak-anak berkumpul untuk merumuskan orientasi pembangunan yang bermanfaat bagi mereka. Proses ini secara intens didampingi oleh WVI. Secara khusus WVI juga memberikan

Gambar 5.6
Musyawarah
Pembangunan Forum
Anak Nita (FANTA)



pendampingan untuk meningkatkan kemampuan penyampaian pendapat anak pada forum Musrenbangdes. Setelah aspirasi pembangunan dirumuskan, anak-anak kemudian diundang dalam proses Musrenbangdes untuk menyampaikan keinginannya dalam proses pembangunan desa.

Inovasi tersebut muncul dari pemikiran kepala desa bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara inklusif dan tidak diskriminatif. Untuk mengakomodasi hal ini maka dirumuskan visi tahunan Desa Nita yaitu Desa Layak Anak. Pembangunan harus dapat mendukung segala aktivitas anak karena anak adalah generasi penerus pembangunan desa. Sejumlah sarana seperti sanggar kesenian dan keterampilan selanjutnya muncul dari hasil partisipasi anak dalam pembangunan di Desa Nita. Sarana tersebut digunakan anak-anak untuk belajar dan mengembangkan bakatnya.

5.2.3 Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebenarnya merupakan program yang dicanangkan pemerintah pusat dalam rangka memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat melalui pengadaan sanitasi yang memadai. Meskipun STBM adalah mandat dari pemerintah pusat, Pemerintah Desa Nita meimplementasikan program ini secara inovatif.

Inovasi ini tampak dari pengadaan jamban keluarga yang dikemas dalam bentuk kompetisi. Setiap keluarga diminta untuk membuat jamban dan dilakukan penilaian dari segi kesehatan dan berbagai aspek lainnya. Melalui upaya ini masyarakat menjadi memiliki motivasi untuk membuat jamban keluarga. Inisiatif masyarakat dalam membuat jamban yang sebelumnya terkendala justru muncul dengan sendirinya melalui kompetisi ini.

Inovasi terkait STBM juga dilakukan dengan memanfaatkan budaya atau kearifan lokal masyarakat yang ada. Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) tidak hanya dilaksanakan dengan mengandalkan dana yang tersedia. SPAL justru dibangun dengan berlandaskan nilai kearifan lokal gotong royong yaitu *gaging gatang* yang berarti saling mengajak. Berdasarkan nilai lokal ini SPAL dapat dibangun secara kolektif.

5.2.4 Revitalisasi BUMDes

Keberadaan BUMDes adalah salah satu kondisi yang diharapkan ada di desa oleh pemerintah pusat. Setiap desa diberi kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola badan usaha demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. BUMDes di Desa Nita sebenarnya telah terbangun cukup lama. Meskipun demikian, BUMDes benar-benar menjadi perhatian dan area inovasi Pemerintah Desa Nita pada tahun 2016.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa, berbagai bentuk koperasi telah muncul di Desa Nita. Berbagai koperasi yang telah diinisiasi oleh pemerintah desa bersama masyarakat tersebut masih diarahkan pada pelayanan jasa kredit. Pelaksanaan urusan Koperasi di Desa Nita ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi dan prototype koperasi atau kelompok UBSP/ SPP sampai tahun 2013 yang mencapai 18 unit. Dari jumlah tersebut terdapat 4 unit koperasi yang telah berbadan hukum dan 13 pra koperasi atau UBSP/SPP yang belum berbadan hukum.

Berbagai koperasi yang ada di Desa Nita berdiri untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat. Ketika UKM atau UMKM milik masyarakat hendak memperbesar skala usaha, mereka dapat melakukan peminjaman modal dengan bunga yang sangat rendah. Berikut berbagai jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat Desa Nita:

Tabel 5.10 Jenis UKM di Desa Nita Hingga 2013

No.	Jenis UKM/UMKM	Jumlah
1.	Toko	4 Unit
2.	Kios	38 Unit
3.	Warung	4 Unit
4.	UD Komoditi/UPH	4 Unit
5.	Penggilangan/Heuller	4 Unit
6.	Ternak Ayam Pedaging/Petelur	7 Unit
7.	Bilyard	1 Unit
8.	Salon Kecantikan	1 Unit
9.	Bengkel Kayu	1 Unit
10.	Bengkel Motor/Mesin	3 Unit
11.	Tambal Ban	5 Unit
12.	Kios Phone/Seluler	5 Unit
13.	Fotocopy	3 Unit
14.	TV Kabel	1 Unit
15.	Persewaan Tenda dll	2 Unit
Jumlah		83 Unit

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2013

Pada tahun 2016, kepala desa menyadari bahwa BUMDes maupun koperasi yang ada di Desa Nita harus dapat mendukung usaha masyarakat secara signifikan. Pemikiran ini diturunkan dalam visi tahunan Desa Nita yaitu Desa Koperasi. Nilai penting lain yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan BUMDes yaitu harus mendukung usaha pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah musyawarah dengan masyarakat desa, dirumuskan bentuk-bentuk BUMDes inovatif yang tidak hanya bergerak di bidang jasa peminjaman modal.

Salah satu inovasi pada penyelenggaraan BUMDes Desa Nita dilaksanakan dengan membangun fasilitas pengelolaan kakao. Apabila sebelumnya masyarakat desa hanya menjual biji kakao kering kepada pengepul maka melalui BUMDes diharapkan akan muncul produk yang lebih memiliki nilai jual yaitu bubuk coklat siap seduh. Pemerintah Desa Nita juga mengelola pasar desa sebagai bagian dari fokus kerja BUMDes untuk menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Selain untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara jelas pengelolaan BUMDes di Desa Nita juga diarahkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat terutama bidang kesehatan. Upaya ini terlihat dari pembangunan apotek yang masuk dalam bentuk BUMDes Desa Nita.

5.2.5 Pemerataan Layanan Kesehatan

Budaya masyarakat yang belum memiliki orientasi pada penggunaan tenaga medis untuk mengatasi masalah kesehatan mendorong pemerintah desa berinovasi di bidang kesehatan. Berbagai penyakit kurang tertangani dengan efektif karena masyarakat enggan mendatangi bidan desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, kepala desa berinisiatif untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan.

Bentuk inovasi pelayanan kesehatan dilakukan dengan memberikan tenaga bidan tidak hanya pada tingkat desa namun juga di tingkat dusun. Masing-masing bidan dusun bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di dusunnya. Fungsi bidan dusun juga tidak hanya difokuskan pada pelayanan kesehatan namun juga pada penyuluhan budaya hidup sehat. Secara pro aktif para bidan dusun kemudian tidak hanya bekerja di poliklinik desa namun juga menyambangi rumah-rumah warga untuk memberikan pemahaman hidup sehat.

5.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Desa

Keberhasilan Inovasi di Desa Nita tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Kepemimpinan, keberadaan kearifan lokal dan kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi beberapa faktor yang mendukung kemunculan inovasi di Desa Nita. Temuan yang menarik dari analisis faktor pendukung inovasi adalah keterbatasan Sumber Daya Alam yang tidak menjadi penghalang namun justru pendorong terciptanya inovasi. Secara lebih komprehensif berbagai faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang Visioner, Terbuka, Inovatif

Kepala Desa Nita, Antonius B. Luju memiliki visi jangka panjang yang jelas serta kepemimpinan terbuka dan inovatif. Kecenderungan ini terbukti dari visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMDes Desa Nita 2014-2019. Berdasarkan gambaran umum kondisi kewilayahan dan kemasyarakatan serta mengacu pada peraturan perundang-



Gambar 5.7
Visi Jangka Panjang dan
Tahunan Desa Nita Selalu
Menjadi Slogan dalam
Berbagai Acara

undangan yang berlaku dalam tatanan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, atau secara khusus mengacu pada RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 sebagai pedoman adaptif perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, maka ditetapkan Visi Pembangunan Desa Nita yaitu "MENGGAJAI HARMONI DESA MEMBANGUN". Visi ini merupakan bagian dari visi umum yaitu "Terwujudnya Harmoni Desa Nita Membangun Secara Aktif, Kreatif, Partisipatif, Dinamis dan Humanis".

Menggapai Harmoni, dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari masyarakat Desa Nita dalam ikatan keluarga besar Rumah Desa yang harmonis. Pengertian harmoni memberikan penekanan pada kesempurnaan hidup bersama dalam menciptakan kebijakan dan kebajikan bestari antara pemerintah desa beserta seluruh komponen masyarakat dan para pemangku kepentingan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Makna, arti dan nilai harmoni, harmonis atau harmonisasi adalah impian dan pretensi tertinggi yang harus digapai dalam kebersamaan hidup.

Desa Membangun, dimaknai sebagai upaya mendorong spirit dan kemampuan desa dan masyarakat untuk mengelola, memanfaatkan, memberdayakan dan mengembangkan segala potensi sumber daya desa secara aktif, kreatif, partisipatif, dinamis dan humanis demi tercapainya kesejahteraan bersama. Pengertian Desa Membangun lebih diarahkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat secara swadaya, swakarsa dan swakelola dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara otonomi dan mandiri.

Demi mewujudkan visi "Menggapai Harmoni Desa Membangun", ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Pelayanan dan Kemitraan Pembangunan Desa dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya Pemerintah Desa beserta para pemangku kepentingan desa yaitu BPD beserta LKD/LPMD sebagai mitra penting dalam menjalankan tugas pemerintahan

dan pembangunan desa sesuai tupoksi eksekutif, legislatif dan yudikatif secara adil, jujur, kondusif dan responsif sosial.

- b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengembangan Potensi SDA dan Ekonomi Kreatif Desa dimaknai sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA desa secara tepat guna dan daya guna demi pembangunan desa. Potensi yang menjadi sektor unggulan desa seperti Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi daya tumbuh kembang sosial budaya dan ekonomi masyarakat desa.
- c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya melalui peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga sosial kemitraan serta pihak ketiga lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara aktif, kreatif, partisipatif, dinamis dan humanis berdasarkan perencanaan pembangunan yang terarah dan '*go public*', berasaskan keadilan dan demokrasi serta berlandaskan gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
- d. Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur maupun suprastruktur pedesaan yang memadai sebagai sarana prasarana dasar dan utama dalam pemberdayaan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA dan SDM desa.
- e. Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Sebagai Agen Pembaruan Desa dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi bakat dan kemampuan serta kreasi dan kreatifitas kaum muda sebagai generasi penerus cita-cita bangsa pada umumnya dan masa depan desa pada khususnya dalam segala kegiatan pembangunan pedesaan melalui wadah pemersatu Karang Taruna Desa sebagai media untuk menginternalisasikan nilai mental dan spiritual, pengembangan bakat dan kreativitas serta mempererat rasa solidaritas dan sportifitas antar pemuda dan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Strategi yang dibangun untuk mendukung upaya pelaksanaan Visi dan Misi tertuang dalam 5 (lima) pilar perwujudan harmoni desa membangun yaitu :

- a. Memaksimalkan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam upaya peningkatan kerja sama dan musyawarah mufakat antara aparaturnya pemerintahan dan masyarakat melalui komunikasi '*KULA BABONG*'.
- b. Membangun komunikasi yang komunikatif antar budaya dan lintas sektor serta pihak ketiga lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi SDA dan SDM melalui komunikasi '*GAGING GATANG*'.

- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta usaha kemandirian lainnya secara swadaya dan mandiri melalui komunike ' LAHI LEKANG '.
- d. Meningkatkan kepedulian sosial budaya dan religiositas masyarakat secara dinamis dan humanis melalui komunike 'DULU DALANG'.
- e. Memaksimalkan peran serta remaja dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan pembangunan desa dalam upaya pengembangan bakat dan kemampuan, kreasi dan kreatifitas melalui komunike 'IMUNG DEUNG'.

2. Pemanfaatan Kearifan Lokal

Selain visioner dan terbuka, Kepala Desa Nita juga memanfaatkan keberadaan kearifan lokal dalam melaksanakan inovasi pembangunan. Komunike *kula babong* merupakan nilai tradisi yang dapat dimengerti sebagai kebiasaan berdialog atau berdiskusi '*bibong babong*' melalui forum musyawarah bersama antar keluarga atau orang perorangan, antar warga atau masyarakat, antar kampung atau wilayah dan antar lembaga kemasyarakatan untuk menggali gagasan, ide dan usul saran dalam pengambilan keputusan tertentu atau penetapan suatu kesepakatan dan kebijakan bersama. Kemudian Komunike *Gaging Gatang* dimengerti sebagai suatu bentuk ajakan atau saling mengajak antar warga atau orang perorangan untuk turut berpartisipasi dalam sebuah proses pengerjaan, pembangunan atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam semangat gotong royong untuk saling membantu dan saling mendukung satu sama lain atau disebut '*Lakang*', termasuk dalam kebersamaan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Pola kebiasaan inilah yang dimengerti dan disebut sebagai bentuk komunike *Lahi Lekang*.

Setelah itu juga komunike *Dulu Dalang* dimengerti sebagai suatu kebiasaan saling kunjung mengunjungi antar orang per orangan, keluarga atau antar warga dalam kerangka membangun komunikasi dan koordinasi bersama. Secara khusus lebih ditujukan untuk membangun tali silaturahmi dan kebersamaan, persaudaraan dan persahabatan atau disebut sebagai *Imung Deung*. *Kula Babong*, *Gaging Gatang*, *Lahi Lekang*, *Dulu Dalang* dan *Imung Deung* tersebut yang akan dikedepankan oleh Pemerintah Desa dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa, penyelenggaraan pemerintahan maupun secara khusus dalam penerapan RPJMDes demi mencapai target dan sasaran pembangunan.

3. Peran Yayasan Sosial Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Flores

Wahana Visi Indonesia adalah salah satu yayasan sosial Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan berkelanjutan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat

yang hidup dalam kemiskinan dengan penguatan demokrasi desa. Dalam kerjasamanya dengan Desa Nita yang terjalin sejak Februari 2014 Wahana Visi Indonesia mengambil peran untuk melakukan advokasi program bagi kesehatan dan gizi ibu, bayi dan anak. Advokasi akan dilakukan terus-menerus dengan memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada masyarakat terutama menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan.

Wahana Visi Indonesia menyadari bahwa sebenarnya pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, peran ini belum bisa dijalankan secara maksimal karena keterbatasan dan berbagai kendala seperti anggaran, sumber daya manusia, dan juga komitmen. Di pihak lain, masyarakat juga belum terlalu sadar akan hak-hak mereka. Malahan, masyarakat sering tidak mau tahu dengan pembangunan di bidang kesehatan. Wahana Visi Indonesia melihat pemerintah dan masyarakat harus saling bertemu, saling berkolaborasi dan berelaborasi, untuk menghadapi dan memecahkan tantangan pembangunan di bidang kesehatan. Karena itu Wahana Visi Indonesia akan melaksanakan proyek ini dengan menjadi fasilitator sehingga persoalan-persoalan kesehatan dan gizi bagi ibu, bayi dan anak bisa terjawab.

4. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Inovasi yang muncul di Desa Nita ternyata tidak muncul dari ketersediaan sumber daya yang berlimpah. Sumber daya yang terbatas di beberapa sektor justru mendorong Desa Nita untuk berinovasi. Sebagai contoh, keterbatasan Sumber Daya Alam di Desa Nita memunculkan inovasi revitalisasi BUMDes yang bergerak pada usaha pengelolaan biji kakao.

Apabila dibandingkan dengan desa lain di Kabupaten Sikka, Desa Nita cenderung tidak memiliki SDA yang mendukung kegiatan ekonomi. Desa-desa lain di Kabupaten Sikka merupakan desa pesisir dan pantai kemudian menjadi komoditi unggulan pembangunan ekonomi di bidang pariwisata. Apabila dilihat dari kondisi alam geografis dan topografis kewilayahan Desa Nita memiliki lahan dan iklim yang dinamis. Keadaan lahan dan penggunaannya didominasi oleh lahan tidur dengan luas 0,80 Km² yang hanya dapat digunakan untuk pertanian maupun perkebunan dalam skala kecil atau menengah.

Keterbatasan ini kemudian mendorong kemunculan inovasi pengembangan ekonomi yang tidak hanya berbasis komoditi pertanian maupun perkebunan namun berorientasi produk jadi yang lebih bernilai tambah. Masyarakat Desa Nita tidak dapat mengandalkan skala produksi biji kakao yang terbatas sehingga melalui BUMDes, pemerintah desa mendirikan tempat pengolahan biji kakao untuk diubah menjadi minuman cokelat instan.

5.4 Proses Inovasi Desa

Proses inovasi di Desa Nita berawal dari berbagai penyebab yang beragam. Inovasi yang muncul berawal dari keberadaan permasalahan tertentu, program yang dicanangkan pemerintah pusat hingga cita-cita atau orientasi pembangunan dari kepala desa sendiri. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar inovasi di Desa Nita muncul atas inisiasi kepala desa. Proses inovasi di Desa Nita dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan Desa Transparan dan Akuntabel

Bentuk inovasi berupa proses penganggaran dan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel berawal dari fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelumnya, masyarakat tidak terlalu aktif melibatkan diri dalam berbagai forum musyawarah desa yang dilakukan untuk menentukan prioritas maupun teknis pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa dapat dikatakan menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan.

Berdasarkan fenomena ini, kepala desa mencari cara strategis untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi semakin partisipatif dalam proses pembangunan desa. Untuk mendukung usaha ini, kepala desa melakukan analisis kondisi dan ditemukan fakta bahwa nilai kearifan lokal *dulu dalang, gaging gatang, imung deung, lahi lekang, kula babong* sudah tidak lagi berlangsung di desa. Masyarakat mulai lupa dengan nilai-nilai lokal dalam aktivitas sehari-hari

Kondisi nilai kearifan lokal yang sudah tidak lagi teraktualisasi kemudian menjadi celah bagi kepala desa untuk berinovasi. Nilai *dulu dalang, gaging gatang, imung deung, lahi lekang, kula babong* kemudian ditempatkan sebagai semboyan utama pembangunan desa. Kepala desa mengangkat lagi nilai ini dalam berbagai kesempatan dan cara selama berinteraksi dengan warga. Melalui langkah ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemudian meningkat.

Untuk memperkuat partisipasi dan efektivitas pembangunan desa, kepala desa tidak hanya mengangkat kembali nilai kearifan lokal namun juga menjaga kolaborasi dengan masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran serta perencanaan pembangunan. Kepala desa mengundang LSM WVI untuk melancarkan upaya tersebut.

Keterbukaan kepala desa terhadap aktor lain tersebut kemudian membawa perubahan pada aspek transparansi dan akuntabilitas penganggaran serta perencanaan pembangunan desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, dilakukan sejumlah inovasi yaitu musrenbangdes yang didahului dengan musyawarah di tingkat RT. Pada tahap ini upaya perencanaan pembangunan dan penganggaran sudah



Gambar 5.8
Partisipasi Masyarakat
Juga Tampak pada
Berbagai Lomba
Menyambut 50 Tahun
Desa Nita

dilaksanakan. Transparansi dan akuntabilitas juga dibangun dengan keterbukaan penganggaran desa (APBDes) melalui spanduk dan leaflet detail anggaran yang diberikan ke seluruh warga desa.

b. Partisipasi Anak dalam Musrenbang

Partisipasi Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan inovasi yang berawal dari visi kepala desa. Kepala desa menginginkan inklusivitas dalam proses pembangunan. Kelompok inklusif seharusnya tidak hanya diakomodasi sebagai sasaran pembangunan namun juga harus ditempatkan sebagai subjek pada proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, aktivitas pembangunan juga seharusnya tidak diarahkan sebagai proses bisnis golongan masyarakat dewasa. Inklusivitas pembangunan perlu dibangun dengan melibatkan kelompok anak. Anak juga harus mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan di desa. Fokus pembangunan ini sangat penting karena kelompok anak adalah generasi yang perlu diberdayakan agar kesejahteraan desa di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Perhatian yang besar terhadap anak dalam pembangunan selanjutnya diturunkan dalam visi tahunan Desa Nita yaitu Desa Layak Anak. Visi tersebut menggambarkan orientasi pembangunan desa yang harus memiliki dampak pada kesejahteraan anak. Melalui visi tersebut pembangunan desa tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan anak namun juga diposisikan sebagai wahana pemberdayaan anak.

Untuk memenuhi visi tersebut, LSM WVI secara intens melakukan pendampingan pada kelompok anak di Desa Nita. Sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, diinisiasi langkah musyawarah pembangunan anak-anak. Pada forum tersebut secara aktif anak-anak mendiskusikan isu pembangunan yang menjadi kebutuhannya. Usulan pembangunan yang telah dirumuskan selanjutnya disampaikan pada saat Musrenbangdes dilaksanakan.

c. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Berbeda dengan dua proses inovasi yang telah dijelaskan sebelumnya, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM sebenarnya bukanlah inovasi yang berawal dari inisiasi pemerintah desa. STBM merupakan program dari pemerintah pusat yang diarahkan untuk perbaikan sanitasi tingkat desa. Program ini menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi di lingkungan pedesaan.

Melihat karakteristik program yang menghendaki posisi sentral pada masyarakat, kepala desa mencari cara untuk dapat mewujudkan program tersebut. Kendala terbesar untuk dapat mewujudkan STBM di Desa Nita adalah sikap apatisme dan partisipasi warga yang rendah. Berdasarkan temuan ini, upaya yang dilakukan kepala desa kemudian difokuskan untuk mengubah aspek perilaku masyarakat.

Secara mendasar terdapat dua langkah yang kemudian dicetuskan oleh kepala desa yaitu menumbuhkan motivasi eksternal dan motivasi internal masyarakat. Penumbuhan motivasi eksternal dilakukan dengan cara melaksanakan pembangunan jamban keluarga dalam format kompetisi. Penumbuhan motivasi internal dilakukan dengan menyoroti nilai kearifan lokal '*dulu dalang*' atau saling mengunjungi. Secara intens, kepala desa melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk menjelaskan manfaat dari pembangunan aspek sanitasi. Selanjutnya dilakukan '*gaging gatang*' atau mengajak warga untuk membangun jamban keluarga.

d. Revitalisasi BUMDes

Keterbatasan Sumber Daya Alam Desa Nita dibanding desa lainnya menjadi dasar upaya revitalisasi BUMDes. Kepala desa menyadari bahwa untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, keterbatasan SDA harus didukung oleh manajemen usaha yang baik dan berbasis komunitas. Sebelum terdapat upaya revitalisasi BUMDes, sebenarnya telah diinisiasi koperasi-koperasi yang berfungsi untuk mendukung permodalan usaha. Meskipun demikian, kepala desa berpikir untuk lebih mendorong keberadaan koperasi atau kelompok usaha yang berbasis jenis usaha spesifik untuk mencapai efisiensi.

Selain karena pemikiran tersebut, kepala desa sebagai seorang pemimpin menginginkan nilai tambah yang tinggi dari berbagai produk usaha masyarakat. Kepala

desa memiliki visi bahwa masyarakat harus menguasai kegiatan usaha dari hulu hingga hilir. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, BUMDes menjadi instrumen penting dalam membantu penguasaan kegiatan usaha hilir oleh masyarakat.

Berdasarkan pola pikir kepala tersebut, dibangun berbagai jenis usaha yang menjadi ranah dari BUMDes Nita yaitu jasa pengolahan biji kakao. Sebelum unit usaha BUMDes ini didirikan, masyarakat hanya menjual produk kakao dalam bentuk biji kering. Setelah terbentuk unit pengolahan biji kakao, masyarakat diharapkan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena dihasilkan bubuk cokelat siap minum yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Fokus lain yang menjadi perhatian kepala desa terkait BUMDes yaitu harus dapat mendukung usaha pemerintah desa untuk mewujudkan perbaikan pelayanan dasar. Atas dasar pemikiran ini, pasar desa kemudian menjadi bagian dari bidang kerja BUMDes. Pasar desa perlu dikelola untuk menjamin keberlanjutan pasokan kebutuhan masyarakat. Selain itu BUMDes Nita juga diarahkan untuk mengelola apotek desa. Ketersediaan apotek desa yang dikelola oleh BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan masyarakat.

e. Pemerataan Layanan Kesehatan

Selain BUMDes yang memiliki tugas mengelola apotek desa, perhatian pemerintah desa terhadap kesehatan juga diarahkan untuk mengatasi perilaku hidup sehat masyarakat yang rendah. Ketika masyarakat terserang penyakit, mereka cenderung enggan memeriksakan diri ke bidan desa atau tenaga medis yang lain. Selain itu, pola hidup sehari-hari masyarakat juga masih seringkali belum berwawasan pemeliharaan kesehatan.

Melihat fakta tersebut, kepala desa berinisiatif melakukan penguatan tenaga medis desa. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menambah jumlah tenaga bidan. Apabila sebelumnya hanya terdapat satu bidan desa, kepala desa merekrut tiga tenaga bidan yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat di tiga dusun di Desa Nita.

Bidan Dusun tersebut tidak hanya bertugas memberikan perawatan medis namun juga berkewajiban membentuk pola hidup sehat keluarga. Upaya ini dilakukan untuk menggapai visi 'desa siaga'. Secara intens mereka melakukan pemantauan dan sosialisasi perilaku hidup sehat masyarakat dengan mendatangi rumah rumah warga. Langkah ini dilaksanakan dalam rangka mencegah kemungkinan penyakit endemik dan gizi buruk di kalangan masyarakat.

5.5 Analisis Dampak Inovasi Desa

Berbagai inovasi yang muncul di Desa Nita membawa sejumlah dampak yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat namun juga oleh pemerintah desa. Bagi masyarakat, inovasi-inovasi yang muncul membawa dampak pada perbaikan aspek pembangunan seperti aspek ekonomi dan kesehatan. Selain itu tercipta pula penguatan demokrasi pemerintahan desa yang berbasis partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Secara lebih komprehensif, dampak inovasi-inovasi di Desa Nita dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan Desa Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk mendorong terbentuknya penganggaran dan perencanaan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bersikap apatis kemudian menjadi sangat proaktif melibatkan diri dalam forum-forum musyawarah pembangunan seperti musyawarah RT/RW, musyawarah dusun dan Musrenbangdes. Selain itu terjadi peningkatan animo keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang berbasis gotong royong.

Fenomena ini juga menjadi bukti bahwa terbentuk kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah desa. Dampak lanjutan ini tidak terlepas dari fokus kerja pemerintah desa yang tidak hanya berusaha mewujudkan akuntabilitas terhadap berbagai peraturan namun juga mewujudkan akuntabilitas sosial. Transparansi anggaran melalui pembagian *leaflet* kepada seluruh warga desa menjadi bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan pemerintah desa terhadap masyarakat.

b. Partisipasi Anak dalam Musrenbang

Dampak spesifik dari inovasi partisipasi anak dalam musrenbang yaitu terbentuk program-program pembangunan desa yang berorientasi pada anak. Berdasarkan hasil musyawarah desa, dibentuk sebuah sanggar kreativitas yang menjadi wahana bagi anak untuk mengembangkan bakat di bidang kesenian. Sanggar tersebut juga menjadi ruang bagi kelompok anak untuk belajar dan berlatih mengembangkan kemampuan diskusi dalam forum formal.

Dampak lain yang muncul dari inovasi partisipasi anak dalam musrenbang yaitu meningkatnya kemampuan dan budaya anak dalam mengemukakan pendapat di depan forum. Melalui pendampingan dari WVI, kelompok anak memiliki rasa percaya diri dan mampu mengkonstruksikan gagasannya dalam forum resmi. Mereka memiliki budaya baru yaitu tidak malu, enggan atau bahkan apatis untuk terlibat dalam proses pembangunan desa.



Gambar 5.9
Latihan Menari Anak
di Halaman Sanggar
Kesenian

c. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Inovasi program STBM yang dikelola dalam format kompetisi dan berbasis kearifan lokal mampu mewujudkan terbangunnya jamban keluarga dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Terbentuknya jamban keluarga menghasilkan dampak berupa terbentuknya perilaku hidup sehat masyarakat. Masyarakat menjadi lebih peduli kesehatan dengan mengubah perilaku BAB. Terbentuknya SPAL juga memberikan kontribusi perbaikan lingkungan. Lingkungan permukiman warga menjadi lebih bersih karena air limbah rumah tangga dapat dikelola secara lebih baik.

d. Revitalisasi BUMDes

Revitalisasi BUMDes Nita menghasilkan sejumlah dampak yang beragam. Dampak pertama yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan taraf ekonomi. Melalui keberadaan fasilitas pengelolaan biji kakao, usaha perkebunan masyarakat lebih efisien. Produk hilir berupa bubuk cokelat siap minum mampu menambah keuntungan usaha karena lebih memiliki nilai tambah dibandingkan biji kakao kering.

Dampak lain yang muncul dari inovasi revitalisasi BUMDes adalah keberlanjutan pasokan kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan pasar desa oleh BUMDes mampu menjamin ketersediaan berbagai komoditi yang dibutuhkan rumah tangga. Melalui langkah ini, masyarakat pedagang juga diuntungkan karena pasar terkelola secara kolektif dengan lebih baik. Lingkungan pasar menjadi lebih tertata, bersih dan tertib.

Apotek desa yang menjadi salah satu jenis usaha BUMDes juga menghasilkan dampak berupa peningkatan pelayanan kesehatan. Melalui keberadaan apotek desa, ketersediaan obat yang dibutuhkan masyarakat menjadi lebih terjamin. Masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh berbagai obat yang dibutuhkan karena obat-obatan tersedia secara lengkap dan terjangkau.



Gambar 5.10
Bidan Desa dan Bidan
Dusun Desa Nita

Revitalisasi BUMDes juga memiliki dampak yang besar bagi pemerintah desa. Beragam jenis usaha yang dimiliki BUMDes mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Desa. Inovasi ini juga dapat membantu mempercepat upaya pembangunan desa karena terjadi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Pemerataan Layanan Kesehatan

Pemerataan kesehatan melalui pengadaan bidan di tingkat dusun mampu memberikan dampak berupa perbaikan perilaku hidup sehat masyarakat. Melalui sosialisasi intens yang dilakukan Bidan Dusun, terbentuk perilaku hidup masyarakat yang lebih memperhatikan aspek kesehatan. Selain itu, upaya pro aktif bidan dusun juga menghasilkan dampak berupa terpantaunya kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Kunjungan Bidan Dusun ke rumah-rumah warga juga membantu upaya pencegahan berbagai jenis penyakit seperti demam berdarah, tifus dan lain sebagainya.

5.6 Kesimpulan Dan Rekomendasi Bagi Inovasi Pembangunan Desa

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada praktik baik inovasi pembangunan di Desa Nita, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan inovasi. Meskipun didasari oleh berbagai latar belakang, sebagian besar bentuk inovasi yang tercipta berasal dari inisiasi kepala desa. Kepemimpinan kepala desa yang visioner dan terbuka menjadi karakteristik penting untuk mendorong terjadinya inovasi. Karakteristik kepemimpinan seperti ini dapat dipahami menjadi sebuah modal bagi proses inovasi di Desa Nita. Pembelajaran ini diperkuat dengan fenomena

keterbatasan Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa Nita. SDA yang terbatas tidak menjadi penghalang bagi kepala desa untuk berinovasi namun justru menjadi pemicu munculnya kreativitas dan inovasi.

Proses inovasi pembangunan yang berlangsung di Desa Nita menegaskan bahwa inovasi tidak selalu muncul dari ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang terbatas justru melahirkan kreativitas untuk menyelesaikan permasalahan. Ketika kreativitas didukung oleh karakteristik kepemimpinan yang terbuka maka muncul inovasi pembangunan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Selain karena adanya permasalahan, inovasi pembangunan yang muncul di Desa Nita juga dihasilkan dari cita-cita, harapan atau visi yang jelas. Kepemimpinan yang visioner dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting. Untuk dapat mewujudkan perubahan kondisi, seorang pemimpin perlu memiliki target dan gambaran jelas mengenai kondisi yang akan dicapai oleh desanya.

Melalui langkah penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, dapat dipahami pula bahwa nilai-nilai kearifan lokal berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan inovasi desa. Pembelajaran yang menarik dan ditemukan di Desa Nita adalah bahwa kearifan sebagai modal terbentuknya inovasi tidak selalu dalam keadaan lestari dan siap dimanfaatkan. Kearifan lokal masyarakat Nita berupa nilai '*Kula Babong, Gaging Gatang, Lahi Lekang, Dulu Dalang dan Imung Deung*' perlu diberdayakan kembali untuk dapat menjadi modal kultural dalam mewujudkan inovasi desa.

Kearifan lokal yang telah diposisikan sebagai modal kultural terbukti dapat menghasilkan berbagai bentuk inovasi di Desa Nita. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar inovasi tersebut juga ternyata mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat selanjutnya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Kolaborasi dan keberlanjutan inovasi kemudian muncul sebagai implikasi dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan dua langkah penting untuk menjaga keberlanjutan berbagai praktik inovasi yang terwujud di desa sebagai berikut:

a. Pelembagaan Proses Inovasi Berbasis Nilai Demokrasi

Langkah pertama yang perlu diterapkan adalah pelembagaan inovasi berbasis demokrasi dengan operasionalisasi prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Upaya ini tentu harus diarahkan pada pencapaian visi dan misi strategis desa. Meskipun kepemimpinan merupakan faktor penting dalam mewujudkan inovasi, langkah pelembagaan perlu dilakukan agar keberlanjutan inovasi dapat terjamin tanpa bergantung pada karakteristik kepemimpinan yang ada. Aktivitas pelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang diarahkan

untuk mengatur revitalisasi peran dan sistem tata kelola BUMDes. Melalui Perdes sebagai payung hukum, BUMDes tidak hanya dapat diposisikan sebagai badan usaha yang berorientasi pemenuhan pelayanan dasar dan keuntungan namun juga dapat diposisikan sebagai organisasi pusat inovasi desa. BUMDes perlu lebih diberdayakan menjadi unit yang dapat berkolaborasi dengan pihak luar. Upaya ini penting untuk dilakukan agar terjadi sinergi pembangunan serta inovasi bersama pihak luar seperti swasta dengan program CSR, perguruan tinggi dengan pengabdian masyarakat serta LSM dengan program advokasinya.

b. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Proses Pembangunan

Langkah kedua yang juga perlu diperhatikan agar tercipta keberlanjutan inovasi desa yaitu revitalisasi kearifan lokal. Pada tahap ini kontekstualisasi inovasi dengan memanfaatkan modal kultural desa perlu menjadi perhatian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Nita, dapat dipahami bahwa nilai-nilai kearifan lokal perlu direvitalisasi agar partisipasi dan kolaborasi bersama masyarakat dalam mewujudkan inovasi dapat terlaksana. Nilai kearifan lokal secara formal kelembagaan dapat dioperasionalkan dalam aktivitas pembangunan serta inovasi desa. Kepala desa juga dapat merevitalisasi nilai kearifan lokal melalui pendekatan informal dalam menjalankan kepemimpinannya. Satu pemikiran penting yang perlu dipahami oleh pemimpin sebagai inisiator inovasi, kearifan lokal merupakan salah satu jenis modal atau sumber daya yang berperan sangat krusial. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan modal kultural yang dapat melengkapi bahkan menggantikan kekurangan modal material dan potensi SDA dalam proses inovasi pembangunan desa.

VI

MEMBANGUN INOVASI DESA YANG BERKELANJUTAN: PERJALANAN DESA SEBAYAN DALAM MENGGAPAI IMPIAN

Theresia Gunawan

6.1 Lokasi dan Profil Desa Sebayan

Desa Sebayan adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Sambas- Kalimantan Barat. Desa ini terdiri dari 3 kampung yaitu: Kampung Senyawan, Kampung Sebambang dan Kampung Sedayan. Pada 1987, kampung ini bergabung menjadi Desa Sebayan. Sejak penggabungan ketiga desa tersebut, telah terjadi 4 kali pergantian kepala desa yaitu: Bapak Mokminin (1987-2002), Bapak Husni (2002-2007), Bapak Alibarudin (2007-2012) dan Bapak Ismet (2012-2018). Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa formal, sehari-harinya masyarakat Desa Sebayan menggunakan bahasa daerah mereka yaitu bahasa Sambas dan bahasa Melayu.

Secara geografis, Desa Sebayan berada di daerah dataran, 2 meter di atas permukaan laut, dengan luas 1.210 hektar dan curah hujan yang tinggi. Jarak tempuh Desa Sebayan dari ibu kota Provinsi (Kota Pontianak) sekitar 230 km (5-6 jam perjalanan darat). Selain itu, Desa Sebayan juga merupakan desa yang berada pada jalur daerah pendidikan yaitu Politeknik Negeri Sambas, IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas serta SMK Subur Insani dan juga SLB Negeri sehingga warga masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses pendidikan. Desa Sebayan juga berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya:

Bagian Utara: Berbatasan dengan Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung
Bagian Selatan: Berbatasan dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas
Bagian Barat: Berbatasan dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas
Bagian Timur: Berbatasan dengan Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Desa Sebayan juga memiliki beberapa fasilitas desa yang dapat di manfaatkan oleh warga desanya:



Gambar 6.1
Peta Desa Sebayan

Tabel 6.1 Fasilitas untuk Warga Desa Sebayan

Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Lokasi
PAUD	2 buah	Dusun Senyawan dan Dusun Sebayang (PAUD Mawar dan PAUD Anugerah)
SD	3 buah	Dusun Sadayan, Dusun Senyawan dan Dusun Sebayang (SDN 18 Sadayan, SDN 19 Sebayang dan SLB Negeri Sambat)
SMK	1 buah	Dusun Senyawan (SMK Subur Insani)
Perguruan Tinggi	2 buah	Dusun Senyawan (POLTEK Negeri Sambat dan IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambat)
Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Lokasi
Posyandu	4 buah	Dusun Senyawan, Dusun Sebayang dan Dusun Sadayan
Polindes	1 buah	Dusun Senyawan
Fasilitas Keagamaan	Jumlah	Lokasi
Mesjid	3 buah	Dusun Senyawan, Dusun Sebayang dan Dusun Sadayan
Mushola	2 buah	Dusun Senyawan, Dusun Sebayang dan Dusun Sadayan
Fasilitas Olah Raga	Jumlah	Lokasi
Lapangan Sepak Bola	2 buah	Dusun Senyawan dan Dusun Sebayang
Lapangan Volly	5 buah	Dusun Senyawan, Dusun Sebayang dan Dusun Sadayan
Lapangan Badminton	4 buah	Dusun Senyawan, Dusun Sebayang dan Dusun Sadayan

Fasilitas Olah Raga	Jumlah	Lokasi
Perpustakaan	1 buah	Dusun Senyawan
BUMDES	Jumlah	Lokasi
Toko Pertanian dan Perkebunan	1 buah	Dusun Senyawan

Desa Sebayan juga memiliki RPJMDes atau RKPDes dan jumlah RAPBDes di Desa Sebayan pada 2016 : Rp. 1.123.637.147,00-. Secara demografis, Desa Sebayan memiliki komposisi penduduk sebagai berikut:

Tabel 6.2 Desa Sebayan Dalam Angka Demografis 2016

Profil Penduduk	Jumlah
Wanita	1.515 orang
Pria	1.509 orang
Usia Produktif	1.331 orang
Anak- anak	642 orang
Kepala Keluarga	892 orang
Difabel	5 orang
Total Penduduk	3.024 orang

6.2 Potret Desa dalam Aspek Ketahanan Pangan, Kesehatan, Pendidikan dan Sanitasi

Dalam aspek pangan, penduduk Desa Sebayan tidaklah berkekurangan, karena mayoritas warga petani memiliki profesi sebagai petani. Padi yang dipanen lebih banyak dari pada yang dikonsumsi namun hasil padi tidak dijual karena diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri karena nasi merupakan kebutuhan penting bagi warga. Hasil panen padi tersebut disimpan di rumah masing-masing. Rata-rata warga memiliki lahan pribadi untuk menanam padi, lada, karet dan sawit. Untuk pendapatan masyarakat diatur sebagai berikut: padi untuk dimakan, karet untuk pengasilan harian (selama musim panas), sawit untuk penghasilan bulanan dan lada untuk penghasilan tahunan. Pengelolaan multi komoditas ini merupakan salah satu strategi yang baik dalam mengelola ketahanan pangan di desa.

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sebayan adalah akses ke air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, sehari-harinya warga masih bersandar pada air hujan. Masalah akses ke air ini semakin semakin pelik pada saat musim kemarau. Lokasi Desa Sebayan terletak agak jauh dari sungai Sambas Kecil, mengakibatkan warga terpaksa mengandalkan air hujan dari tempayan penampungan- yang digunakan untuk

menampung air ketika musim hujan. Kalau sumur tadah atau tempayan sudah habis airnya, maka masyarakat akan membeli air dari mobil tangki atau PDAM. PDAM sudah masuk desa namun masih sedikit masyarakat desa yang dapat mengaksesnya. Masalah air ini, dirasakan perlu untuk mendapat perhatian dan bantuan serius dari kabupaten sebab memerlukan koordinasi dengan dengan desa-desa lainnya dan biayanya juga cukup besar.

Dalam aspek sanitasi, di Desa Sebayan, dulu banyak warga yang tidak memiliki jamban, namun saat ini masyarakat sudah mengikuti pelatihan jamban agar warga tidak buang air besar di sembarangan tempat. Sedangkan ketersediaan listrik bukan lagi menjadi masalah buat warga Desa Sebayan, karena listrik sudah masuk desa sejak 1983. Demikian pula dengan akses jalan-jalan antardesa, kini sebagian besar sudah beraspal.

Untuk bidang kesehatan, Desa Sebayan mendapatkan juara I lomba desa untuk Posyandu. Posyandu ini dinyatakan juara dikarenakan warga dapat secara rutin membawa balitanya untuk melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala. Pelayanan posyandu diberikan secara gratis, bahkan bayi yang sudah selesai imunisasi, diberikan tambahan makanan bayi. Selain itu, Desa Sebayan juga memiliki rumah singgah bagi ibu yang ingin melahirkan dan sarana *ambulance* juga sudah tersedia, dalam hal ini, penggerak posyandu ini adalah ibu-ibu PKK setempat.

Dalam hal pendidikan, pemerintah Desa Sebayan cukup gencar untuk mengedukasi dan mendorong anak-anak dari warga desa untuk menyekolahkan anaknya minimal tamat SMA. Terutama karena di kawasan Desa Sebayan ini terdapat sekolah mulai dari tingkat SD hingga universitas. Untuk mendukung pendidikan, pemerintah Desa Sebayan juga sudah memberikan Kartu Pintar, Beasiswa Siswa Berprestasi, atau Beasiswa Siswa Kurang Mampu sehingga masyarakat pun dipermudah dalam hal pendidikan.

Di sisi lapangan kerja, hanya sedikit warga desa yang pengangguran. Warga yang menganggur biasanya berasal dari kalangan yang sudah berusia tua atau tidak produktif. Di Desa Sebayan juga terdapat sebuah Balai Latihan Kerja, namun saat ini belum dapat dimanfaatkan. Warga berharap nantinya jika Balai Latihan Kerja sudah dapat digunakan, akan bermanfaat untuk mendidik para lulusan sekolah atau warga yang ingin berkerja namun tidak memiliki bekal pendidikan sekolah yang cukup. Sebagai gambaran, bangunan Balai Latihan Kerja yang lokasinya bersebelahan dengan Kantor Desa Sebayan saat ini sedang mangkrak kondisinya. Penyebabnya karena pendirian Balai Latihan Kerja ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Masalah ini pun menyeret Kepala Desa Sebayan sebelumnya, yang ditengarai melakukan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan balai tersebut. Kasus ini belum selesai di pengadilan sehingga pendirian Balai Latihan Kerja itupun menjadi tertunda.

6.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sebayan Dan Tantangannya

a. Sumber Penghasilan Desa Sebayan

Sebagai sumber mata pencaharian, penduduk Desa Sebayan pada umumnya menggeluti usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan jasa. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa adalah memiliki tanah yang luas dan berpotensi untuk menanam padi, lada dan karet. Dari potensi komoditas tersebut, produk yang diunggulkan dalam 5 tahun terakhir ini adalah lada dan karet.

Alazmi, salah seorang warga dusun Senyawan, Desa Sebayan, merupakan salah satu penggerak kelompok tani di dusunnya mengatakan, selama beberapa tahun, dia bercocok tanam padi dan berladang pohon karet namun sekarang ini dia juga menanam tanaman lada, karena menurutnya sedang ngetren dan hasil yang diperoleh dari sekali panen lebih menguntungkan dibanding hasil dari bertanam pohon karet.

Selain karet, Alazmi pernah juga menanam Jeruk Siam. Namun sayangnya, karena para petani bergerak sendiri-sendiri dan tidak berkelompok, usaha menanam jeruk Siam pun gagal. Kegagalan ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari sisi pemasaran dari dinas pemerintah terkait. Akibatnya, usaha yang dikembangkan bersama dengan beberapa petani lainnya tidak berlanjut.

Alazmi lantas mencontohkan, harga karet selama empat tahun terakhir masih di bawah Rp10.000/ kg sehingga hasil yang diterima masyarakat juga kecil dan cukup berat untuk hidup. Kini beranjak menuju penghujung 2016, harga karet disyukurinya telah naik menjadi Rp12.000/kg.

Kini selain karet, dia bersama kelompok taninya, menanam lada yang dinilainya lebih menjanjikan dilihat dari sisi harga jual dibanding dengan karet. Dengan masa tanam dua tahun, tanaman lada bisa menghasilkan keuntungan berlipat dibanding karet. Cukup jauh perbandingannya. Harga lada per kilo bisa mencapai Rp 100.000, sedangkan karet hanya sepersepuluhnya. Selain itu, masa tanam pohon karet bisa mencapai 8 tahun hingga bisa diambil getahnya.

Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua untuk terbesar penghasil lada dunia setelah negara Vietnam. Kualitas lada Indonesia dikatakan merupakan kualitas lada terbaik di dunia karena cita rasa dan aroma spesifik lada Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kedepan diprediksikan konsumsi lada dalam negeri akan terus meningkat seiring dengan semakin menjamurnya bisnis restoran dan kuliner. Permintaan lada untuk ekspor juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama untuk pasar Eropa dan Asia. Tantangan yang di industri lada di Indonesia saat ini dan tahun-tahun ke depan adalah sulitnya untuk mendongkrak minat kaum muda untuk membudidayakan lada sehingga regenerasi petani lada tidak berjalan dengan baik . Di Vietnam sendiri,



Gambar 6.2
Hasil Komoditas Desa
Sebayan: Lada, Padi dan
Karet (Dari Kiri ke Kanan)

pemerintah berupaya untuk memoderinsasi perkebunan lada untuk menarik minat generasi muda terjun ke perkebunan lada (Kabar Bisnis, 2014).

Menurut Alazmi, justru tanaman padi mengalami keterpurukan karena gagal panen pada tahun ini. Penyebabnya adalah musim panas yang terlalu panjang. Beras dari hasil bercocok tanam padi pun rata-rata hanya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual.

Pak Azmi – demikian dia dipanggil - kini telah memiliki tanaman lada sebanyak 800 batang dalam waktu tiga tahun terakhir. Jika dihitung, satu batangnya minimal menghasilkan 1 -2 kg tergantung dari perawatan. Butuh waktu selama dua tahun untuk bisa memanen ladanya pertama kali. Menurut Azmi, yang dibutuhkan dalam menanam pohon lada adalah bibit, pupuk (organik dan kimia), insektisida. Lada yang termasuk dalam program pertanian hortikultura, kini menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat dusun Senyawan.

Berbagai program penyuluhan pertanian menurut Azmi juga pernah diadakan di Desa Sebayan. Pelatihan di bidang pertanian dirasa masih kurang, hanya setahun sekali. Azmi berharap dengan adanya dana desa, program penyuluhan pertanian bisa lebih ditingkatkan, mengingat 80% masyarakat hidup bergantung pada pertanian.

Selain perkebunan Karet dan Lada, produk yang dihasilkan oleh Desa Sabayan adalah Capil (Topi Petani) dan songket (kain tenun khas daerah Sambas). Pembuatan capil dan songket di Desa Sebayan masih sangat tradisional dimana pembuatan capil masih murni dilakukan dengan tenaga manusia dan pembuatan songket masih menggunakan mesin tenun tenaga manusia. Para pembuat capil dan songket ini mengeluhkan susahinya untuk aspek pemasaran untuk menerobos pasar. Pola penjualan yang dilakukan adalah menerima order dan menjual produk-produk yang di hasilkan kepada pengepul. Pengepul merupakan salah satu aktor rantai nilai yang memediasi proses pendistribusian dari para petani dan pengrajin dengan para distributor lainnya di pasar. Karena kurangnya akses informasi dan akses transportasi serta kemampuan negosiasi, para petani dan pengrajin sepenuhnya menyerahkan hasil produksinya kepada pengumpul yang menekan harga beli dengan sangat rendah.

Gambar 6.3
Hasil Produksi Desa
Sebayan: Capil dan Kain
Songket (Dari Kiri ke
Kanan)



2. Permasalahan dan Tantangan Bisnis Masyarakat Desa Sebayan

Walaupun Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara agraris namun permasalahan yang dihadapi oleh para penduduk desa yang mayoritas adalah petani adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan elemen bisnis pertanian. Para petani hanya mengikuti cara produksi tradisional yang diwariskan turun-temurun atau melihat bagaimana petani lainnya melakukan aktivitas produksinya. Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Dimiyati (2007) bahwa aktivitas petani Indonesia masih terfokus pada kegiatan produksi, namun belum secara maksimal menyentuh aspek distribusi, keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran. Peran dan kelembagaan petani seperti kelompok tani, lembaga penyedia input, lembaga penampung output, lembaga penyuluhan dan lembaga permodalan juga belum terasa maksimal dalam rangka meningkatkan daya saing petani.

Permasalahan tersebut diatas, juga terjadi pada pelaku usaha lainnya di desa. Desa Sebayan, penduduk desa mayoritas adalah petani, namun desa ini juga dikenal sebagai desa pengrajin songket Sambas (kain tenunan khas daerah) dan capil (topi untuk petani), juga mengalami permasalahan yang sama. Lemahnya daya saing para pelaku usaha di Desa Sebayan dikarenakan permasalahan: rendahnya akses ke pasar, permodalan dan kurang terinformasi mengenai harga pasar.

Permasalahan-permasalahan tersebut membawa imbas yang negatif terhadap pelaku usaha di Desa Sebayan. Akibatnya, mereka berada pada posisi yang lemah dalam menegosiasikan harga hasil produksinya. Ketidakberdayaan masyarakat desa ini seringkali di perburuk oleh pihak-pihak lain yang hanya ingin mengeruk keuntungan semata. Karena masyarakat desa memiliki ketergantungan yang tinggi pada pengepul, maka peningkatan produktivitas tidak menjadi jaminan dalam memberikan keuntungan yang layak bagi penduduk desa.

Karena itu selain peningkatan kapabilitas masyarakat desa, kami juga memandang bahwa kelembagaan yang ada di desa perlu di perkuat. Penguatan dan pemberdayaan lembaga desa seperti BUMDES dapat dijadikan sebagai wadah untuk menopang aktivitas pembangunan dan inovasi di desa dengan melatih warga desa, menampung, membeli



Gambar 6.4
Permasalahan Umum
yang Dihadapi Pelaku
Usaha Desa Sebayan

dan menjual produk-produk warga. Lembaga-lembaga seperti ini seharusnya dikelola oleh pemerintah desa bekerja sama dengan warga desa serta melibatkan pihak-pihak ahli sebagai penasehat bagi tumbuh kembangnya lembaga sehingga daya tawar masyarakat desa semakin meningkat dan membawa kepada kemandirian ekonomi .

6.3 Praktik Baik dan Potensi Inovasi Di Desa Sebayan

Meskipun Desa Sebayan memiliki permasalahan-permasalahan klasik yang juga di alami oleh desa-desa lain seperti minimnya modal, kualitas SDM yang rendah, minimnya akses ke pasar dan masalah produktivitas yang masih rendah, namun berdasarkan studi lapangan kami menemukan potensi inovasi di desa maupun praktik baik yang telah di lakukan masih dapat dieksplorasi lebih lanjut pengembangannya. Beberapa hal yang inovasi di desa dan praktik baik di Desa Sebayan adalah:

- Pelembagaan usaha bersama untuk membangun ekonomi desa.
- Pengelolaan informasi desa dengan pemanfaatan informasi teknologi.
- Pemimpin desa yang visioner dan terbuka
- Budaya lokal sebagai potensi inovasi dalam pengembangan desa wisata
- Nilai-nilai kearifan lokal Desa Sebayan.

Berikut ini dijelaskan bagaimana proses inovasi dalam bidang-bidang tersebut dilaksanakan di desa.

a. BUMDES Desa Sebayan dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa

Untuk mendorong kemandirian pembangunan ditingkat desa, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada para pemerintah desa untuk mengelola desanya sendiri. Salah satu program yang digagas oleh pemerintah adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan cara menggali dan mengelola potensi-potensi sumber daya yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Budiono, 2015). Untuk pembentukannya, BUMDes ini dilandaskan pada kesepakatan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui musyawarah desa yang kemudian dikelola bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Gagasan untuk membuat BUMDes Desa Sebayan sendiri merupakan inisiatif dari kepala desa bersama-sama dengan masyarakat. Awal gagasan ini muncul sebelum turunnya dana desa, sehingga awal pendirian BUMDes ambil dari APBD. Berdasarkan dengan kebiasaan musyawarah yang ada Desa Sebayan, kepala desa bersama dengan penduduk desa berupaya untuk menggali potensi apa yang ingin di kembangkan dengan BUMDes Desa Sebayan. Persiapan pendirian BUMDes di Desa Sebayan ini sendiri memakan waktu 6-12 bulan. Karena sebagian besar penduduk memiliki profesi petani, maka pada tahun 2016 dibangunlah BUMDes Sebayan yang melayani dibidang sarana pertanian dan perkebunan. Dengan masuknya bantuan dana desa dari pemerintah tentunya memberikan angin segar kepada masyarakat Desa Sebayan untuk menjadi aktif untuk mengoperasikan BUMDesnya.

Tidak berpuas pada BUMDes yang telah didirikan, kepala Desa Sebayan yang juga dikenal sebagai inisiator dan penggerak desa masih terus mengupayakan pengembangan bidang-bidang usaha yang baru untuk perluasan BUMDes. Kepala Desa Sebayan memiliki cita-cita agar suatu saat nanti Desa Sebayan memiliki kemandirian ekonomi

Gambar 6.5
BUMDES Sarana
Pertanian dan
Perkebunan



sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Hal ini terinspirasi dari desa yang berada di daerah Jawa yang penghasilan BUMDes nya mencapai Rp. 7 miliar, sehingga desa tersebut tidak perlu lagi menerima bantuan dari pemerintah.

Karena Desa Sebayan merupakan desa dengan jalur pendidikan, terdapat 2 fakultas, ada SMA, ada STM dan SMAN maka BUMDes yang baru di rencanakan akan bergerak pada bidang usaha jasa penginapan (hotel dan indekos). Ide membuat jasa penginapan di anggap memiliki pasar yang potensial karena anak-anak sekolah dan kuliah serta para pendatang dari kota lain membutuhkan tempat penginapan. Selain dapat menciptakan sejumlah tenaga kerja, usaha penginapan dan pemondokan ini dapat membuka kesempatan usaha-usaha baru untuk melengkapi kebutuhan hotel dan pemondokan seperti rumah makan, *laundry*, *warnet* dan *fotocopy*. Usaha ini diprediksikan dapat memberikan multiplier efek bagi pengembangan ekonomi di pedesaan.

Untuk memberikan dampak yang lebih besar, Kabupaten mengusulkan kerjasama tingkat desa untuk membuat BUMDes bersama. Sinergi dari beberapa desa untuk membentuk satu BUMDes yang dikelola bersama-sama akan membuat sumberdaya dan daya saing yang dimiliki oleh BUMDes akan menjadi lebih besar.

Pada 2016, Pak Ismet selaku kepala Desa Sebayan mengusulkan kepada desa-desa yang lain untuk bekerja sama membuat usaha hotel dan pemondokan. Masing-masing dari 18 desa mensuplai @ Rp. 100.000.000,- sehingga modal yang di kumpulkan dapat mencapai Rp. 1,8 Miliar Rupiah. Usulan ini sedang di kaji lebih lanjut dan dibuat dasar hukumnya. Jika upaya ini berhasil maka manfaat BUMDes bersama ini dapat mendorong pembangunan ekonomi desa dan mengurangi tingkat perantauan. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan anak-anak yang putus sekolah tidak lagi pergi bekerja ke Malaysia, karena kebanyakan anak-anak yang putus sekolah menjadi TKI di Malaysia.

Untuk kedepan, masih banyak jenis usaha bersama desa yang dapat dikembangkan untuk BUMDes. Pak Ismet menambahkan, BUMDes untuk bahan material misalnya pasir, batu bata, dll juga memiliki potensi ekonomi yang baik. Selain itu, mengingat minimnya potensi sumber daya alam di Desa Sebayan, maka potensi yang dapat dikembangkan maka potensi kreativitas dan inovasi harus diciptakan, misalnya membuat tempat hiburan anak-anak. Saat ini Desa Sebayan tidak memiliki tempat hiburan untuk anak-anak. Jika Desa Sebayan memiliki tempat hiburan anak-anak, hal ini dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal dari desa-desa disekitar Desa Sebayan untuk menikmati tempat hiburan tersebut. Untuk kedepannya memang sudah di rencanakan dan sedang dicari tempat yang strategis untuk mengembangkan membuat tempat hiburan anak-anak. Dengan adanya tempat hiburan tersebut, maka usaha penginapan akan berjalan sinergi sebab sebagian para pengunjung juga memerlukan tempat penginapan. Jika konsep ini berhasil diaplikasikan, maka BUMDes dapat menjadi sumber ekonomi yang inovatif bagi masyarakat desa.

Namun, pada proses implementasi kebijakan BUMDes, tentunya banyak hal perlu untuk dikaji dan didiskusikan lebih lanjut mengingat keputusan final berada pada kesepakatan masyarakat Desa Sebayan. Ada banyak faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut. Ada kepentingan aktor pelaksana kebijakan, baik kepentingan individu maupun kelompok yang memengaruhi kebijakan tersebut. Jika karakteristik lembaga pemerintah desa cenderung tertutup, maka rencana implementasi kebijakan tersebut bisa terhambat, dan sebaliknya, lembaga yang cenderung terbuka akan dapat mendorong pelaksanaan kebijakan (Budiono, 2015).

b. Pengembangan IT dalam Membangun Informasi di Desa Sebayan

Dengan semangat mudanya, Pak Ismet secara konsisten membangun sistem informasi berbasis teknologi internet. Konsistensi kepala desa ini mulai menghantar Desa Sebayan menjadi desa berpredikat *online*. Berbagai informasi di desa dapat di akses melalui *website* atau portal desa. Keberadaan Desa Sebayan di pelosok Kalimantan, kini dapat di akses dari berbagai tempat di Indonesia dan di dunia. Dengan teknologi informasi ini, harapannya produk-produk yang dihasilkan oleh Desa Sebayan dapat dipromosikan secara *online*. Bahkan jika kedepannya desa wisata dan usaha penginapan sudah terealisasi maka media ini dapat digunakan untuk sebagai sarana *marketing*.

Sejalan dengan keinginan dari KEMENDes, pemerintah menghendaki semua produk-produk desa yang *tangible* maupun yang *intangible* dapat diakses secara *online*. Sehingga pemerintah, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan calon *stakeholder* yang potential dapat mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh setiap desa dan bantuan apa yang perlu diberikan untuk desa tersebut. Harapannya, publikasi di *website* dapat menjadi salah satu solusi masalah pemasaran di desa.

Untuk masalah infrastruktur teknologi informasi, Desa Sebayan sudah memiliki akses yang memadai untuk akses ke internet. Untuk menunjang akses ke internet, saat ini sudah ada beberapa provider yang sudah dapat dijangkau dari Desa Sebayan seperti, Simpati; M3 dan Indosat.

Website Desa Sebayan sendiri dapat di akses melalui alamat <http://sambassebayan.desa.kemendes.go.id/>.



Gambar 6.6
Portal Website Desa
Sebayan

Ide pembuatan *website* Desa Sebayan pertama kali datang dari pemerintah pusat. Desa Sebayan dilatih untuk menjadi desa percontohan untuk desa *online*. Tidak berpuas hanya dengan memiliki *website*, pemerintah Desa Sebayan juga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan *update website*-nya dengan mengikuti pelatihan di Kalimantan Timur. Pada saat pelatihan di Kalimantan Timur, ada 18 desa dari kecamatan Sambas yang diundang, namun hanya 2 desa yang berangkat, yaitu Desa Sebayan dan Desa Kartiyasa. Adapun kendala yang mengakibatkan mengapa banyak desa yang tidak ikut berpartisipasi adalah masalah biaya. Panitia dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal hanya menyediakan uang transportasi sebesar Rp. 4.000.000,- . namun pada faktanya harga tiket pesawat sudah mencapai Rp. 4.800.000,-. Namun karena rasa ingin belajar yang tinggi, Desa Sebayan dan Desa Kartiyasa mensubsidi biaya keberangkatan mereka untuk mengikuti pelatihan tersebut. Sesampainya di Kalimantan Timur, pihak panitia penyelenggara merasa terharu dengan niat belajar peserta dari Kalimantan Barat, sehingga pihak penyelenggara berupaya untuk menanggung semua biaya dan bahkan memberikan tambahan uang saku.

Dari kejadian tersebut, salah satu catatan yang mungkin dapat menjadi perhatian pemerintah adalah untuk memberikan support yang memadai untuk desa yang tertinggal untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang jauh lokasinya, sangat disayangkan ada 16 desa yang batal ikut karena masalah biaya.

c. Potensi Wisata Budaya Sebagai Potensi Inovasi Desa

Desa Sebayan adalah desa yang dikenal sebagai desa yang memiliki budaya melayu yang kental. Di tengah tantangan arus globalisasi, Desa Sebayan masih terus berupaya untuk tetap mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang di wariskan generasi terdahulu dari masa kemasa. Pelestarian budaya adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan secara aktif dan sadar, yang bertujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat yaitu benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003).

Dalam upaya untuk melestarikan budaya, lembaga adat Desa Sebayan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan dan menggali adat istiadat masyarakat dalam pembinaan masyarakat;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat dalam masyarakat;
- c. Mencatat adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- d. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat;
- e. Menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat dalam masyarakat;

- f. Melaksanakan kerja sama antar Lembaga Adat;
- g. Membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah .

Untuk itu dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, Desa Sebayan mencoba untuk mengangkat kembali budaya-budaya setempat yang sudah lama tenggelam. Karena dari segi potensi alam dari Desa Sebayan tidak banyak yang dapat di kembangkan, maka alternatif wisata yang dapat dilakukan adalah mendorong Desa Sebayan menjadi Desa Wisata Budaya Daerah. Desa wisata yang dimaksudkan adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang dapat dijadikan daerah tujuan wisata dimana penduduk setempat masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, desa wisata juga harus memiliki beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata (Zakaria dan Suprihardjo, 2014).

Beberapa budaya daerah Sambas Desa Sebayan yang memiliki potensi untuk diangkat menjadi daya tarik wisatawan adalah dalam pakaian adat, pernikahan adat, lomba sampan, acara dzikiran, upacara tepung tawar (salah satu prosesi dalam upacara adat Melayu, yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, memberikan nama, menyambut jemaah haji, syukuran, menyambut tamu agung, dan lainnya) dan budaya Bepapas untuk khitanan dimana beras yang telah di rendam dihaluskan dan ditumbuk dan dijadikan sabun yang dibalur kesekujur tubuh anak. Bila adat- istiadat ini dapat dikemas dan dipromosikan dengan baik maka pelestarian budaya setempat dapat dijadikan daya tarik turis lokal maupun manca negara untuk datang mengunjungi desa



Gambar 6.7
Pernikahan Adat Desa
Sebayan

Sebayan. Terutama karena dulunya Kecamatan Sambas merupakan salah satu kerajaan Melayu dan Keraton Sambas masih berdiri sampai sekarang dan merupakan salah satu tempat wisata sejarah yang ramai di kunjungi.

Untuk mewujudkan Desa Wisata, perlu melakukan pengkajian dan peninjauan yang serius. Untuk memberikan gambaran bagaimana sebuah desa wisata di kemas dan kelola, Desa Sebayan dapat melakukan studi banding ke desa wisata yang sudah berhasil di Indonesia seperti Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul yang didaulat menjadi desa wisata terbaik se-Asean dan akan menerima penghargaan *dari Asean Community Bases Tourism Award* (Asean CBT Award) dan Desa Panglipuran- Bangli, Bali.

d. Peranan Pempinan Desa dalam Mendorong Keberhasilan Inovasi di Desa Sebayan

Penggerak atau pendorong pembangunan dan berbagai inovasi di Desa Sebayan sebagian besar diprakarsai adalah kepala Desa Sebayan. Pemimpin desa saat ini (Pak Ismet) memiliki visi dan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif bagi warga Desa Sabayan. Dengan visi dan inovasi yang kuat dalam bidang pembangunan, Pak Ismet, dalam kepemimpinannya berhasil untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perubahan yang tampak terutama dalam aspek pembangunan jalan, kegiatan organisasi pemuda masjid, BUMDes, desa *online* dan lainnya.

Implementasi kebijakan-kebijakan baik di kota maupun di desa selalu akan melibatkan aktor, namun sejauh mana intensitas keterlibatan aktor tersebut dapat dipengaruhi oleh seberapa besar komitmen dan keterbukaan aktor tersebut didalam sebuah kebijakan. Alazmi sebagai salah satu warga Desa Sebayan menilai bahwa ada perubahan signifikan dengan kepemimpinan kepala desa yang sekarang dijabat oleh Pak Ismet. Selain visioner, kepala Desa Sabayan memiliki pola kepemimpinan terbuka terhadap ide-ide dan partisipasi yang dapat mendorong terwujudnya inovasi. Kepala desa membuka ruang untuk berkomunikasi dan berbagi ide dan masukan dalam musyawarah desa. Hal ini merupakan aspek yang esensial, sebab pembangunan yang berkelanjutan memerlukan aktor pemimpin yang dapat menumbuhkan partisipasi warganya untuk bersama-sama membangun desa.

Masyarakat Desa Sebayan pada umumnya sangat antusias untuk diajak musyawarah walau dengan daya tangkap yang kurang, namun dengan pengertian yang diberikan berulang kali, mereka mau ikut serta mendukung dan terlibat dalam pembangunan desa.

Dengan pola kepemimpinan ini, pemimpin desa yang ada saat ini dianggap mampu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Desa Sabayan dalam mewujudkan desa yang inovatif. Alazmi warga Desa Sebayan, juga menyatakan optimismenya bahwa

dengan keterbukaan dan transparansi kepemimpinan yang ada saat ini, Desa Sebayan akan maju.

d. Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Faktor Pendorong inovasi di Desa

Nilai kearifan lokal yang di junjung tinggi dalam keseharian masyarakat Desa Sebayan adalah nilai musyawarah dan gotong-royong. Hal ini sangat jelas teraplikasikan dalam proses pengambilan keputusan dalam kebijakan operasional desa dimana masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah ini keterwakilan berbagai elemen masyarakat ikut dilibatkan seperti tokoh masyarakat, para tetua desa, ibu-ibu penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Musyawarah ini sangat berguna untuk mempertajam ide-ide inovasi dalam desa. Kegiatan musyawarah desa ditujukan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang permasalahan desa dan kegiatan yang akan dilakukan di desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan diharapkan akan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap program-program desa yang akan dilaksanakan. Salah satu aspek penting dari partisipasi adalah munculnya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktivitas fisik sehingga rasa memiliki, ingin mewujudkan, ingin menjaga, ingin mensukseskan akan muncul dalam masyarakat.

Sistem gotong-royong juga masih terlihat sangat kental dalam proses pertanian, pembangunan dan kegiatan kekeluargaan. Masyarakat masih saling bahu membahu secara bergantian untuk menanam bibit, memanen hasil pertaniannya. Untuk pekerjaan pertanian ini, warga yang ikut serta menolong tidak dibayar sama sekali, namun setelah panen, maka akan dibuat syukuran bersama, dimana warga bersama-sama berdoa mensyukuri hasil dan panen sambil menikmati hidangan khas daerah daerahnya. Selain itu, setiap ada masyarakat yang sedang mengadakan pesta pernikahan,



Gambar 6.8
Budaya Gotong Royong
dalam Kegiatan Pesta
Setempat

seluruh masyarakat Desa Sebayan bergotong royong dalam mempersiapkan tenda, mempersiapkan masakan, mencuci piring, dan mengantarkan makanan kepada tamu undangan dan membereskan semua peralatan setelah acara pernikahan berakhir tanpa diberikan honor oleh keluarga yang sedang melakukan acara pernikahan. Bahkan pembangunan yang dilakukan di Desa Sebayan seperti membangun jalan, jembatan, perbaikan kantor desa juga dilakukan oleh warga secara bergotong-royong. Selain itu masyarakat juga melakukan tolong menolong secara spontan jika ada warga yang mengalami musibah.

Nilai musyawarah dan gotong royong tersebut merupakan praktik baik dan modal sosial masyarakat yang dapat menciptakan kebersamaan, *trust*, kerja sama, kepekaan sosial, kemampuan menyelesaikan konflik dan harmoni dalam masyarakat sehingga konflik-konflik internal dalam perguliran ide inovasi menjadi realisasi inovasi dapat diminimalisir.

6.4 Dampak Praktik Baik dan Inovasi Di Desa Sebayan

Praktik baik dan inovasi yang dilakukan di Desa Sebayan tentunya membawa beberapa dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat:

a. Dampak BUMDES bagi Desa Sebayan

Dampak BUMDes sarana pertanian dan perkebunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena masyarakat tidak perlu pergi ke kota untuk membeli kebutuhan pertanian mereka. Selain itu, harga jual dari produk-produk sarana pertanian dan perkebunan juga sangat terjangkau sehingga para petani merasa sangat terbantu dengan keberadaan BUMDes ini. Dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi, meningkatkan hasil panen masyarakat serta menjadi sumber pemasukan bagi Pendapat Asli Daerah. Dampak positif yang tidak langsung dirasakan adalah keberadaan BUMDes yang meningkatkan rasa percaya diri dalam pengelolaan BUMDes dan menjadi pemicu bagi pimpinan desa dan masyarakat untuk membuat inovasi lainnya yakni BUMDes yang bergerak di bidang lainnya. BUMDes yang sedang dikaji potensinya adalah BUMDes yang menjual bahan bangunan, wisma BUMDes (BUMDes yang bergerak pada jasa penginapan yang akan dikelola bersama desa-desa lainnya).

b. Dampak Implementasi IT di Desa Sebayan

Dengan adanya IT, masyarakat secara luas dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Sebayan. Keberadaan Desa Sebayan menjadi lebih ketahu oleh masyarakat luas dengan kemudahan mengaksesnya melalui internet. Keberadaan website desa juga dapat memperkenalkan produk-produk seperti lada, karet, songket

dan capil yang dihasilkan oleh Desa Sebayan ke pasar. Menurut kepala desa dengan adanya *website* desa, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat akan menjadi lebih cepat karena pendataan desa dapat dilihat dari *website* desa.

c. Dampak Kearifan Lokal dalam Menopang Inovasi dan Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Desa Sebayan

Nilai-nilai musyawarah dan gotong-royong merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Sebayan. Nilai gotong royong dalam masyarakat secara tidak langsung dapat menekan arus budaya *matrealistis* dan *individualis* yang semakin kuat pada jaman ini. Dengan nilai gotong royong di Desa Sebayan ini membuat para kaum muda belajar terlibat aktif dalam acara-acara kekeluargaan karena pada saatnya mereka akan mengadakan acara kekeluargaan, mereka juga suatu saat nanti akan membutuhkan bantuan dari warga.

Nilai gotong royong mengajarkan masyarakat dan kaum muda Desa Sebayan bahwa segala sesuatu tidaklah harus selalu di ukur dalam bentuk uang. Nilai gotong royong ini membawa kesadaran bahwa kepentingan bersama menjadi utama dalam keseharian masyarakat sehingga terjadi harmoni dalam hidup bermasyarakat. Dengan prinsip gotong royong ini masyarakat Desa Sebayan hidup dengan rukun dan saling tolong-menolong sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan berat menjadi terasa lebih ringan dan diselesaikan lebih cepat karena di tanggung bersama-sama.

6.5 Kesimpulan dan Rekomendasi Untuk Keberlanjutan Praktik Baik dan Inovasi Desa Sebayan

Dari hasil studi lapangan di Desa Sebayan, kami melihat ada beberapa faktor yang mendukung berkembangnya inovasi pembangunan di desa:

- a. Pemimpin merupakan aktor yang penting dalam mendorong dan mengimplementasikan kebijakan inovasi di desa. Kami melihat pemimpin yang visioner dapat membawa Desa Sebayan berjalan meraih masa depan yang lebih baik dengan lebih terarah. Selain visioner, pemimpin Desa Sebayan juga merupakan pemimpin yang demokratis yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide-ide dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini merupakan aspek yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan karena pemimpin yang baik saja tidaklah cukup. Pemimpin yang dapat membuat inovasi berkelanjutan adalah pemimpin yang mampu mendorong partisipasi aktif anggota masyarakatnya, sebab jika pembangunan hanya bergantung pada pimpinan saja, maka inovasi dapat terhenti begitu saja apabila terjadi bila terjadi kelumpuhan pada pemimpinnya.

2. Selain itu pelembagaan aktivitas ekonomi kolektif di tingkat desa juga menjadi syarat penting untuk membuat inovasi-inovasi yang telah dirintis selama ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kami melihat aspek BUMDes merupakan praktik yang baik dalam upaya mendukung keberlanjutan inovasi yang dilakukan di desa. Kebermanfaatannya dari BUMDes dapat dinikmati secara kontiniu jika BUMDes yang ada terjaga eksistensinya. Selain itu, keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan BUMDes akan kembali kepada rakyat dalam bentuk berbagai manfaat lainnya. Karena pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, maka rasa *sense of belonging* dari masyarakat untuk menjaga, merawat, mendayagunakan dan mengembangkannya akan semakin tinggi dibanding jika sebuah bidang usaha yang hanya dimiliki oleh segelintir orang maupun kelompok tertentu. Terkait dengan rencana pengembangan, BUMDes ini dapat diperluas area pelayanannya. Seperti yang sudah dicanangkan oleh pemimpin Desa Sebayan, BUMDes pengelolaan bahan bangunan dan tempat penginapan merupakan rencana yang inovatif dalam mengembangkan BUMDes Sebayan.
3. Tidak dapat di pungkiri, pentingnya peranan informasi teknologi (IT) dalam meningkatkan meningkatkan inovasi di desa dari waktu ke waktu dirasakan semakin meningkat. Dari hasil penelitian dilapangan, kami melihat bahwa Desa Sebayan sudah setahap lebih maju dibanding dengan desa-desa lainnya yang belum memanfaatkan *website* desa. Desa Sebayan sudah konsisten memperbaharui konten-konten di dalam *websitenya*. Namun dari *website* tersebut, konten-konten yang dimunculkan masih terbatas mengenai informasi deskriptif tentang pemetaan dan kegiatan desa. Pemanfaatan *website* Desa Sebayan masih dapat di kembangkan dan maksimalkan lebih jauh dalam menopang inovasi di desa. Beberapa peranan IT yang masih dapat dikembangkan dalam mendukung keberlanjutan proses inovasi di desa adalah sebagai berikut:
 - a) IT untuk memaksimalkan pembangunan di bidang pendidikan di desa. Dengan adanya program *e- learning*, masyarakat dapat belajar mengenai cara budidaya ternak, bagaimana memilih bibit yang unggul dan bidang-bidang lainnya. Untuk aspek ini, perguruan tinggi yang memiliki kompetensi sebagai suluh informasi dan ilmu dapat berkerjasama dengan pemerintah desa dengan menjadi kontributor *website* dengan konten-konten yang dapat mencerdaskan masyarakat desa.
 - b) IT juga dapat menjadi sarana peningkatan kesehatan warga desa. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia dalam mengisi konten yang terkait dengan informasi kesehatan seperti cara penanggulangan dan mencegah penyakit.

- c) IT juga dapat diimplementasikan pada bidang perniagaan, yaitu sebagai sarana promosi dan penjualan produksi secara digital sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan dapat memotong jalur distribusi yang terlalu panjang, serta meningkatkan nilai jual produk usaha kecil menengah di pedesaan.
 - d) IT juga dapat mendukung bidang pemerintahan dengan melayani pengurusan izin secara *online*, melayani permintaan data dan statistik dari pemerintah di tingkat lebih bawah dan maupun lebih tinggi. Penggunaan IT dalam penyusunan dan penggunaan *budget* dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial yang membantu proses pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
4. Pelestarian budaya dan kearifan lokal juga merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk membuat inovasi menjadi sustain. Budaya-budaya tradisional yang baik haruslah di lestari karena budaya merupakan salah satu aspek kekayaan dari keberagaman adat-istiadat di Indonesia. Budaya yang selama ini masih di praktikkan di Desa Sebayan seperti pernikahan adat, budaya tepung tawar, pepapas dan lainnya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya Sambas. Ide pembuatan desa wisata budaya merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong keberlangsungan budaya karena budaya Desa Sebayan akan menjadi lebih konsisten untuk dipraktikkan karena adanya peminatan dan permintaan dari pihak luar untuk mengenal budaya daerah setempat. Beberapa hasil penelitian desa wisata budaya di Indonesia mengatakan bahwa dengan adanya paket wisata budaya di daerah, wawasan masyarakat semakin terbuka luas melihat bagaimana para turis sangat mengapresiasi budaya daerah tersebut dan hal ini membuat penduduk setempat semakin bangga dengan budaya mereka. Bahkan, ada perubahan cara pandang kaum muda terhadap tradisi budaya daerah mereka. Sebelumnya, para kaum muda di desa memandang bahwa budaya itu adalah sesuatu yang sudah kuno dan tidak menarik. Namun dengan sejak adanya Desa Wisata Budaya, kaum muda desa yang pada umumnya senang berinteraksi dengan para turis menjadi lebih tinggi kesadarannya untuk melestarikan budaya lokal yang mereka miliki dan ada rasa bangga jika dapat memperkenalkan budaya daerah mereka kepada wisatawan. Dapat dikatakan, desa wisata budaya dapat meningkatkan kesadaran kaum muda tentang pentingnya pelestarian budaya.
5. Nilai kearifan lokal yang selama ini di junjung tinggi di Desa Sebayan adalah gotong royong dan musyawarah. Nilai-nilai ini merupakan aspek penting dalam menopang inovasi yang berkelanjutan. Gotong-royong merupakan modal sosial yang telah menjadi sistem budaya bangsa. Rasa kebersamaan, rasa saling percaya, secara intensif memberikan dukungan yang saling menguntungkan dan saling memberi merupakan semangat kebaikan yang harus dipertahankan di Desa Sebayan. Sedangkan musyawarah adalah wujud dari kegiatan berdemokrasi yang sangat diperlukan dalam mencari keputusan yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Musyawarah merupakan salah satu alat bantu untuk menyatukan kelompok

masyarakat maupun individu dalam menggali solusi yang dapat disepakati dan di taati bersama. Merujuk pada keindahan nilai gotong-royong dan musyawarah tersebut di atas, nilai-nilai berharga tersebut perlu di pertahankan dalam masyarakat bahkan penting diturunkan pada generasi-generasi berikutnya. Karena itu diperlukan institusionalisasi atau proses pelebagaan untuk mengangkat nilai-nilai tersebut menjadi pranata sosial atau lembaga yang memungkinkan warga masyarakat berinteraksi dengan pola-pola yang resmi. Pranata sosial ini dapat dicangkokkan ke dalam kebijakan-kebijakan desa yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menginternalisasi budaya gotong royong dan musyawarah menjadi pola pikir dan pola kerja masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.



CATATAN PENUTUP

Berdasarkan laporan survei di lima desa tersebut di atas menunjukkan bahwa berbagai praktik baik telah dilakukan oleh desa-desa tersebut dalam berbagai aspek yang menyangkut pengembangan ekonomi lokal, ketahanan pangan, sanitasi/kesehatan, pelibatan masyarakat yang banyak hal mengandalkan pada basis dan kearifan lokal. Beberapa catatan kritis yang bisa dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Kepemimpinan

Dari hasil survei lima desa tersebut menunjukkan bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan di desa-desa tersebut dalam banyak hal sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa yang ditandai dengan kekuatan visi yang dimilikinya. Visi yang merupakan ide awal yang menggerakkan kemauan dan potensi yang dimiliki oleh desa pada akhirnya akan mengalami perubahan dan perkembangan yang dapat memberikan dampak yang secara terus menerus akan bergulir memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga desa.

2. Partisipasi Warga

Keterlibatan warga desa untuk membangun desa dalam berbagai aspek kehidupan tentu saja menjadi suatu yang sangat fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan desa secara keseluruhan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut berimplikasi positif bagi warga pada rasa memiliki yang kuat sehingga berujung pada rasa ikut bertanggungjawab pada berbagai pembangunan di desa. Keterlibatan mereka dalam proses pembangunan mencakup baik aspek perencanaan maupun dalam implementasi program atau kegiatan. Perencanaan biasanya dilakukan melalui musyawarah-musyawarah yang dilakukan untuk menentukan berbagai program yang akan diterapkan di desa. Musyawarah di tingkat desa pada dasarnya harus digaribawahi sebagai suatu hal yang sangat fundamental ketika komunitas desa akan ditempatkan sebagai fundamen bangunan demokrasi pada tataran yang lebih luas. Musyawarah harus dimaknai sebagai suatu

dialog warga untuk berinteraksi dalam menyampaikan ide-ide konstruktif dalam membangun komunitas.

Ide yang disepakati dalam perencanaan pada akhirnya diwujudkan dalam kegotongroyongan untuk mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan. Musyawarah dan gotong royong pada akhirnya akan menegaskan bahwa kedua hal tersebut menjadi basis kearifan dan kekuatan lokal yang akan menopang keberlanjutan masyarakat di tataran desa. Dari fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa warga desa benar-benar terlibat secara demokratis (*democratic engagement*) dalam proses-proses pembangunan di desa.

3. Pelembagaan

Penelitian praktik baik yang dilakukan di desa menunjukkan bahwa berbagai program atau kegiatan yang inovatif tersebut tidak hanya semata-mata dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat atau dalam jangka waktu yang pendek, melainkan dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Untuk menjamin keberlanjutannya maka setiap program dan kegiatan yang inovatif dikelola secara terorganisir (pelembagaan) dengan menciptakan unit atau organisasi baru yang ada di desa yang bersangkutan seperti pelembagaan dalam pengelolaan air bersih, kawasan wisata desa, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangga. Dalam beberapa kasus pelembagaan tersebut bisa diwujudkan dalam format Badan Usaha Milik Desa – BUMDes.

Lembaga seperti ini sangat relevan untuk mendukung berbagai proses yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dalam berbagai aspek. Pelembagaan pada hakekatnya juga akan menegaskan bahwa adanya struktur dan pengorganisasian yang melibatkan warga desa untuk ikut aktif dalam tugas dan tanggungjawab untuk mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh desa sehingga bisa menjamin keberlanjutan berbagai usaha yang sudah dilakukan. Pelembagaan ini dapat memberikan dampak positif baik pada warga secara individu maupun kolektif warga desa.

Perlembagaan juga bisa menjadi cara dan wadah untuk melakukan kajian untuk pengembangan dari berbagai potensi yang dimiliki dan praktik baik yang sudah dirintis selama ini. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban jika dalam upaya untuk pengembangan tersebut memerlukan sumber daya seperti tenaga ahli yang dapat memberikan penguatan baik aspek pengetahuan maupun ketrampilan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini lembaga seperti BUMDes atau nama dengan format lainnya bisa menjadi semacam "*center of excellence*" untuk menopang berbagai aktivitas pengembangan di desa. Bahkan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi yang nota bene merupakan komunitas akademik yang memiliki kekayaan intelektual dapat berpartisipasi dalam menjadi penopang

dalam *centre of excellence* untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan inovasi di desa.

4. Kolaborasi

Kemajuan yang dicapai oleh desa-desa juga menunjukkan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak yang punya konsern untuk pengembangan desa. Kerjasama ini menjadi langkah yang strategis mengingat beberapa kawasan khususnya pedesaan sangat membutuhkan berbagai sumber baik yang menyangkut sumberdaya manusia, yang dalam hal ini tenaga ahli, serta sumberdaya non-manusia khususnya berupa finansial.

Kerjasama yang dilakukan oleh desa-desa tersebut melibatkan pihak-pihak baik perguruan tinggi, korporasi, maupun lembaga swadaya masyarakat. Perguruan tinggi dalam beberapa hal dapat memberikan berbagai konsultasi dan juga pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi para aparat desa (*capacity building*) misalnya dalam hal manajemen pelayanan publik. Demikian juga peningkatan kemampuan masyarakat misalnya dalam hal pengelolaan usaha-usaha ekonomi yang mereka lakukan. Sedangkan kerja sama dengan pihak korporasi seringkali dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* ketika dimanfaatkan dengan semestinya akan sangat mendukung pembangunan yang dilakukan di desa seperti pembangunan fisik untuk menunjang fasilitas desa wisata.

Kolaborasi juga dibutuhkan ketika desa dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang bersifat pembaharuan dalam hal pengelolaan atau manajemen pelayanan publik, termasuk juga misalnya dalam hal penganggaran yang menuntut akuntabilitas dan transparansi, maka peran pihak eksternal seringkali sangat dibutuhkan dalam hal memberikan pemahaman maupun dalam memberikan kemampuan praktik operasional.

Demikian pula halnya kolaborasi dengan pihak lembaga swadaya masyarakat – LSM yang dalam hal ini sering kali memberikan baik pelatihan maupun pendampingan yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat dan aparat desa. Pendampingan dari pihak LSM nampaknya juga merupakan alternatif pilihan bagi desa ketika fleksibilitas, yang tidak menekankan pada kekakuan birokrasi, menjadi salah satu karakteristiknya sehingga memudahkan aparat dan warga desa secara leluasa dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh para tenaga ahli dan relawan LSM.

5. Teknologi Informasi

Praktik pembangunan yang terjadi di beberapa desa menunjukkan bahwa mereka sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung program dan kegiatan yang dilakukan di desa seperti pelayanan administrasi pembuatan surat dan juga untuk menyebarkan informasi yang dianggap penting.

Memang pemanfaatan ini belumlah maksimal, oleh karena itu aparat dan masyarakat desa nampaknya perlu untuk diperkenalkan dan dibiasakan dalam aspek tersebut.

Teknologi informasi yang dimanfaatkan secara maksimal jelas akan memberikan efek yang sangat positif baik dalam hal efisiensi pelayanan kepada masyarakat maupun dalam upaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) khususnya dalam mendorong transparansi melalui sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*). Kemajuan teknologi dalam hal informasi ini juga akan bisa dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat seiring dengan semakin maraknya digitalisasi dalam proses pendidikan. Dalam hal ini masyarakat dapat mengikuti proses pembelajaran melalui sistem pembelajaran jarak jauh (*distance learning*)

6. Dampak Inovasi

Pada akhirnya kita dapat melihat secara nyata bahwa berbagai inovasi yang dilakukan di desa-desa yang disurvei tersebut telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan di desa. Secara ekonomi, berbagai inovasi yang dilakukan baik itu yang berkaitan secara langsung dengan usaha ekonomi maupun pemanfaatan dan atau pengembangan potensi/kekayaan alam secara nyata telah memberikan dampak pada peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat maupun memberikan keuntungan ekonomi pada desa seperti halnya usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan desa wisata, dan juga pengelolaan sumber air bersih yang berdimensi sosial maupun ekonomi.

Demikian juga inovasi yang semakin menguatkan interaksi sosial dalam komunitas desa. Dengan kepemimpinan yang visioner dan partisipatif pada akhirnya akan semakin menumbuhkan tanggungjawab sosial warga desa dalam menjaga dan membangun desa. Hal ini tentu saja akan semakin memperkuat "modal sosial" yang didukung oleh kearifan komunitas lokal.

Pada akhirnya berbagai hal yang terjadi dengan dinamika pembangunan desa yang konstruktif dan integratif tersebut akan dapat menjamin keberlanjutan desa baik yang menyangkut manusianya, warga desa yang bersangkutan, maupun lingkungan dengan segala unsur yang ada didalamnya.